



PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL MELALUI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

(Studi Kasus Pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Gadingrejo,
Kota Pasuruan)

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Jetiek Chusniaty Mu'is

NIM : 970910301145

Dosen Pembimbing

Dr. Pairan, MSI

NIP. 131 975 308

S
362.5
m u i
p
e.1

S.K.S

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal : ...
Terima : ...
No. ... 10236370

Kelas
2001

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Terjemahan Al-Qur'an, Q.S -- Alam Nasyrah, 94 : 6-8) *)

*) Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi kepada :

- ♥ “*Ayahanda H. Mu'allif*” dan “*Ibunda Istiqomah*” tercinta yang telah mencurahkan semua kasih sayangnya, perhatian, pengorbanan baik dalam bentuk moril maupun materil serta untaian do'a yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan ananda dalam studi.
- ♥ “*Bapak Iskandar*” dan “*Ibu Siti Fatchah*” tercinta yang telah memberikan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan terima kasih atas bantuan do'anya.
- ♥ “*Dik Eny*” dan “*Dik Faried*” yang kusayangi, terima kasih atas dukungan dan do'anya yang membuat penulis menjadi bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ♥ Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku kelak.
- ♥ Pembaca yang setia dan budiman.
- ♥ Nusa dan bangsa.
- ♥ Almamaterku tercinta, UNIVERSITAS JEMBER.

PENGESAHAN

Telah Diterima dan Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Hari : Senin
Tanggal : 18 Juni 2001
Pukul : 08.00 WIB

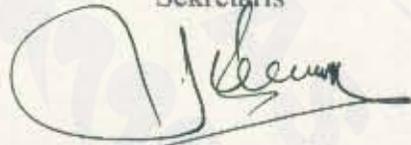
Panitia Penguji

Ketua



(DR. Bustami Rahman, MA)

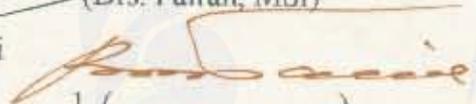
Sekretaris



(Drs. Pairan, MSi)

Anggota Tim Penguji

1. DR. Bustami Rahman, MA
Nip. 130 802 223
2. Drs. Pairan, MSi
Nip. 131 975 308
3. DR. H. Uung Nasdia, MS
Nip. 130 674 336
4. Dra. Elly Suhartini, MSi
Nip. 131 472 793



1. (.....)



2. (.....)



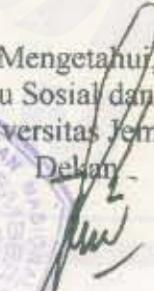
3. (.....)



4. (.....)

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan




Drs. H. Moch Toerki
Nip. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)** (Studi Kasus Pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan) guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menyusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Sebab dikhawatirkan apabila dalam penyusunannya jika kurang baik akan menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan uraian yang penulis sajikan. terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan oleh semua pihak untuk menambah dan memantapkan teori yang berhubungan dengan tema yang penulis ambil.

Maka dari itu, kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Pairan, MSi, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarah, nasihat dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Abdul Gani, MS, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Budi Santoso, S.Sos, selaku dosen wali.
5. Bapak dan ibu dosen Pembina Mata Kuliah beserta segenap unsur civitas akademika pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember.

6. Bapak Setyo Hadi, BA, selaku camat Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan yang telah memberikan izin pada penulis untuk mengadakan penelitian pada wilayah tersebut.
7. Ketua BKM di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
8. Semua saudara-saudaraku yang ada di Kediri maupun di Lumajang, terima kasih atas dorongannya dan do'anya selama ini.
9. *Mas Agus, Mas Teguh, Wiwit dan Ani*, terima kasih atas persaudaraannya selama ini.
10. Teman-temanku seperjuangan di FISIP, terutama *KS'97*, terima kasih atas kebersamaannya, persaudaraannya dan mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. *Mbak-mbakku dan adik-adikku* di Jalan Kalimantan X/1 Jember, terima kasih semuanya yang telah mengisi hari-hariku di saat penulis dalam keadaan senang maupun duka.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih banyak dari bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis baik dalam bentuk moril, materiil maupun spiritual. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi bagi pembaca khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.

Jember, Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan	14 ✓
1.4 Pokok Bahasan	15 ✓
1.5 Tinjauan Pustaka	17
1.6 Definisi Operasional	32
1.7 Metodologi Penelitian	45
1.7.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian	45
1.7.2 Metode Penentuan Populasi	46
1.7.3 Metode Penentuan Sampel	47
1.7.4 Metode Pengumpulan Data	47
a. Metode Observasi	48
b. Metode Kuesioner	48
c. Metode Interview	48
d. Informan	49
e. Teknik Dokumentasi	49
1.7.5 Analisa Data	49

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan	14 ✓
1.4 Pokok Bahasan	15 ✓
1.5 Tinjauan Pustaka	17
1.6 Definisi Operasional	32
1.7 Metodologi Penelitian	45
1.7.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian	45
1.7.2 Metode Penentuan Populasi	46
1.7.3 Metode Penentuan Sampel	47
1.7.4 Metode Pengumpulan Data	47
a. Metode Observasi	48
b. Metode Kuesioner	48
c. Metode Interview	48
d. Informan	49
e. Teknik Dokumentasi	49
1.7.5 Analisa Data	49

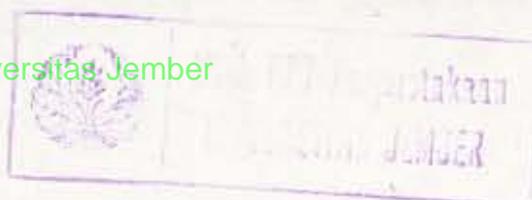
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	52
2.1 Keadaan Geografis dan Letak Wilayah	52
2.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk	55
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk	60
2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk	66
2.5 Sarana dan Prasarana	68
2.5.1 Prasarana Pendidikan Formal (Sekolah)	68
2.5.2 Prasarana Ibadah	70
2.5.3 Prasarana Kesehatan	72
2.6 Lembaga-lembaga Formal	75
2.6.1 Lembaga Keagamaan	75
2.6.2 Lembaga Kegotongroyongan	77
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)	80
3.1 Latar Belakang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	80
3.1.1 Tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	80
3.1.2 Strategi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	81
3.1.3 Struktur Organisasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	82
3.1.4 Komponen Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	87
3.1.5 Dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	89
3.1.6 Tolok Ukur Kinerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	89

3.2	Institusi Pemerintah	90
3.2.1	Pemerintah Pusat	91
3.2.2	Daerah Tingkat I	92
3.2.3	Daerah Tingkat II	93
3.2.4	Kecamatan	93
3.2.5	Kelurahan	94
3.3	Unsur-unsur Pelaksana KMW	95
3.3.1	Tim Koordinasi Pusat	95
3.3.2	Sekretariat P2KP Pusat	97
3.3.3	Project Management Unit dan Pemimpin Proyek Pusat	98
3.3.4	Tim Koordinasi Daerah Tingkat II	99
3.3.5	Penanggungjawab Operasional (PJOK)	100
3.4	Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	100
3.4.1	Tugas, Fungsi, Peran dan Ruang Lingkup Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	101
3.4.2	Mekanisme Kerja Konsultan Manajemen Pusat (KMP)	102
3.5	Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)	103
3.5.1	Tugas, Peran dan Ruang Lingkup Wilayah	103
3.5.2	Mekanisme Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)	104
3.6	Bantuan Teknis	105
3.6.1	Fasilitator Kelurahan	105
3.6.2	Kader Masyarakat	108
3.6.3	Tenaga Pembantu Kelompok (TPK)	108
3.7	Badan Keswadayaan Masyarakat	109
3.8	Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)	110

3.8.1	Proses Pembentukan	111
3.8.2	Lingkup Tugas dan Mekanisme Kerja Forum Konsultasi	111
3.9	Penetapan Lokasi Penerima Bantuan	112
3.9.1	Penentuan Status Perkotaan	112
3.9.2	Penetapan di Tingkat Pusat	113
3.9.3	Penetapan di Tingkat Daerah	113
3.9.4	Pengusulan Nama-nama Kelurahan	114
3.9.5	Lokasi	115
3.9.6	Penetapan Wilayah P2KP Tahap I	115
3.9.7	Penentuan Satuan Wilayah Kerja	116
3.10	Pendanaan	117
3.10.1	Alokasi dan Penggunaan Dana	117
3.10.2	Status Persyaratan Penggunaan Dana	117
3.10.3	Ketentuan Mengenai Pinjaman	118
3.10.4	Tanggung Jawab Pengelolaan Dana	119
BAB IV.	IDENTITAS RESPONDEN	120
4.1	Jenis Kelamin Responden	120
4.2	Umur Responden	122
4.3	Agama Yang Dipeluk Responden	123
4.4	Pendidikan Responden	124
4.5	Status Perkawinan Responden	126
4.6	Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannya di Dalam Masyarakat	127
BAB V.	ANALISA DATA	130
5.1	Adanya aturan main yang adil dan disepakati bersama	130
5.1.1	Aturan Pengambilan Keputusan	130
a	Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan	130

b. Mekanisme Pengambilan Keputusan	132
5.1.2 Pembagian Tugas	134
a. Distribusi Kekuasaan	134
b. Corak Kepemimpinan	135
c. Peran Anggota BKM	137
5.2 Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka	138
5.2.1 Proses Pembentukan BKM	138
a. Proses Pembentukan BKM	138
b. Pengaruh Dari Luar	140
5.2.2 Kelembagaan BKM	142
a. Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota	142
b. Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	143
5.2.3 Tujuan BKM	145
a. Tipe dan Tingkat Partisipasi	145
b. Kondisi Komunikasi	147
5.3 Adanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas	149
5.3.1 Menjaga Aturan Main	149
a. Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik	149
b. Hubungan Kerja Anggota BKM	151
5.3.2 Menegakkan Aturan Main	152
a. Posisi Masyarakat	152
b. Model Penanganan Pekerjaan	154

5.3.3 Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main	156
a. Motif Keterlihatan Anggota	156
5.3.4 Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main	
Dianggap Perlu Diubah	158
a. Adanya Umpan Balik	158
5.4 Perhitungan Untuk Mengukur Tingkat Pemberdayaan	
Kelembagaan Komunitas Lokal	160
5.4.1 Tingkat Kelayakan Peran BKM	160
5.4.2 Tingkat Kinerja BKM	164
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	167
6.1 Kesimpulan	167
6.2 Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	170
KUESIONER	

**DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Patokan yang Digunakan di Indonesia, pada tahun 1976-1993.
- Tabel 2. Indonesia : Jumlah Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Menurut Wilayah dan Daerah, 1990 (dalam persentase).
- Tabel 3. Penggunaan Tanah pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 4. Jumlah Penduduk di Seluruh Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 8. Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 9. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 10. Jumlah Prasarana Pendidikan Formal (Sekolah) di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 11. Jumlah Prasarana atau Tempat Ibadah Menurut Agama yang dianut Oleh Masing-masing Penduduk pada Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 12. Jumlah Prasarana Kesehatan pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 13. Jumlah Lembaga Keagamaan pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.

- Tabel 14. Kondisi Lembaga Kegotong-royongan pada Masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 15. Jenis Kelamin Dari Responden.
- Tabel 16. Kelompok Umur dari Responden.
- Tabel 17. Pendidikan Terakhir dari Responden.
- Tabel 18. Status Perkawinan dari Responden.
- Tabel 19. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannya di Dalam Masyarakat.
- Tabel 20. Tanggapan Responden Tentang Kinerja BKM Terhadap Perumusan Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 21. Tanggapan Responden Tentang Kinerja BKM Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 22. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Distribusi Kekuasaan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 23. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Corak Kepemimpinan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 24. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Peran Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 25. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Proses Pembentukan BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 26. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Pengaruh Dari Luar di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 27. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 28. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

- Tabel 29. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Tipe dan Tingkat Partisipasi di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 30. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Kondisi Komunikasi di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 31. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 32. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Hubungan Kerja Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 33. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Posisi Masyarakat di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 34. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model Penanganan Pekerjaan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 35. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Motif Keterlibatan dari Anggotanya di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 36. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Adanya Umpan Balik Untuk Mengadakan Perubahan pada Aturan Main di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 37. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap Kinerja BKM nya Masing-masing Berdasarkan 17 Aspek Penilaian pada Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 38. Skor Tingkat Kelayakan Peran BKM Berdasarkan Kinerja BKM pada Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.
- Tabel 39. Skor Tingkat Kinerja BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Rekapitulasi Identitas Responden.
- Lampiran II. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap 17 Aspek Penilaian Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo.
- Lampiran III. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap 17 Aspek Penilaian Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo.
- Lampiran IV. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap 17 Aspek Penilaian Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo.
- Lampiran V. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Aturan Pengambilan Keputusan.
- Lampiran VI. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Pembagian Tugas BKM.
- Lampiran VII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Proses Pembentukan BKM.
- Lampiran VIII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Kelembagaan BKM.
- Lampiran IX. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Tujuan BKM.
- Lampiran X. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Menjaga Aturan Main.
- Lampiran XI. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Menegakkan Aturan Main.
- Lampiran XII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main.

Lampiran XIII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannyanya Masing-masing Untuk Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main Dianggap Perlu Diubah.

- Surat Pernyataan.
- Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian (Lembaga Penelitian Universitas Jember).
- Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey/Riset/PKL, Pemerintah Daerah, Kantor Sosial Politik, Kota Pasuruan.
- Surat Ijin Penelitian/Survey, Pemerintah Kota, Camat Gadingrejo, Kota Pasuruan.
- Surat Keterangan Penelitian dari Perhimpunan Keswadayaan Masyarakat, BKM Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
- Surat Keterangan Penelitian dari Perhimpunan Keswadayaan Masyarakat (PKM) Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
- Surat Keterangan Penelitian dari Paguyuban "SEJAHTERA" Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.
- Peta Kecamatan Gadingrejo, Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang sifatnya multidimensional berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya. Kemiskinan ditandai oleh keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya tertangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebihan dengan tingkat produktivitas rendah dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan (Sumodiningrat, 1998:26).

Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga seringkali tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Masyarakat miskin pada umumnya tidak akan berdaya dan cenderung mudah ditekan serta dimanfaatkan oleh kelas sosial di atasnya. Untuk bertahan menegakkan hidup pada taraf yang layak hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan sosial di lingkungan sekitarnya terutama kerabat dan tetangganya.

Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan penentuan garis kemiskinan. Menurut sensus BPS bahwa kemiskinan di Indonesia, jumlah penduduk miskin pada tahun 1976 sebanyak 40,08 % (54,2 juta jiwa), menurun menjadi 28,56 % (42,3 juta jiwa) pada tahun 1980, menjadi 17,42 % (30 juta jiwa) pada tahun 1987 dan menurun lagi menjadi 15,08 % (27,2 juta jiwa) pada tahun 1990. Proporsi penduduk miskin tersebut sudah menurun lagi menjadi 13,67 % (25,9 juta jiwa) pada tahun 1993. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Patokan yang Digunakan di Indonesia, pada tahun 1976-1993 (Singarimbun dan HonLLD, 1996:153)

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)		Jumlah dan Prosentase (%)		Penduduk Miskin (jumlah dalam juta jiwa)
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1976	4.522	2.849	10,0	44,2	54,2
			(38,79)	(40,37)	(40,08)
1980	6.831	4.449	9,5	32,8	42,3
			(29,04)	(28,42)	(28,56)
1987	17.381	10.294	9,7	20,3	30,0
			(20,14)	(16,44)	(17,42)
1990	20.614	13.295	9,4	17,8	27,2
			(16,75)	(14,33)	(15,08)
1993	27.905	18.244	8,7	17,2	25,9
			(13,45)	(13,79)	(13,67)

Sumber : Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 1991

Selain menggunakan versi dari BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan bisa juga menggunakan ukuran Sayogya yaitu kebutuhan makanan sebanyak 2100 kalori per hari dan disamping itu keperluan bukan makanan yakni perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan transpor, maka kemiskinan disini masih diukur secara fisik yaitu orang tidak kekurangan makanan, pakaian. Tetapi melihat kondisi di kota-kota besar, kita bisa melihat bahwa kemiskinan sudah berubah bentuk dari kemiskinan absolut menjadi kemiskinan relatif, artinya orang bisa makan, berpakaian dengan cukup tetapi di bandingkan orang-orang kaya di kota perbedaan kepemilikannya atas materi dan sumber-sumber sangat mencolok

Sedangkan untuk mengukur rumah tangga miskin di perkotaan, Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) menggunakan ukuran umum standar dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2000. Adapun indikator ukuran yang dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) untuk suatu keluarga dikatakan prasejahtera ataupun sejahtera antara lain :

1. Keluarga Prasejahtera

adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan serta belum melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya secara teratur.

2. Keluarga Sejahtera Tahap I

yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal antara lain :

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Bila anak sakit dan atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB dibawa ke sarana atau petugas kesehatan serta diberi obat atau cara modern.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II

yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sebagai berikut :

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
- b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging, ikan atau telur sebagai lauk pauk.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru setahun terakhir.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter untuk tiap penghuni rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas atau fungsi masing-masing.
- f. Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 sampai dengan 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- h. Seluruh anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah pada saat ini.

- i. Bila anak dua atau lebih keluarga yang masih Pasangan Usia Subur (PUS) saat ini memakai kontrasepsi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III

yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera dapat I dan tahap II juga telah dapat memenuhi kebutuhan sebagai berikut :

- a. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- c. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- d. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Keluarga mengadakan rekreasi bersama atau penyegaran di luar rumah paling kurang sekali dalam 6 bulan.
- f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar atau radio atau televisi atau majalah.
- g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi atau yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I, tahap II, dan tahap III serta :

- a. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur (pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil).
- b. Kepala keluarga atau anggota keluarga, aktif sebagai pengurus perkumpulan atau yayasan atau institusi masyarakat.

Untuk mengetahui rumah tangga miskin dan tidak miskin yang ada di Indonesia baik yang berada di kota maupun di desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Indonesia : Jumlah Penduduk Miskin dan Tidak Miskin Menurut Wilayah dan Daerah, 1990 (dalam persentase)

Wilayah	Daerah	Status		Jumlah
		Miskin	Tidak Miskin	
Jawa + Bali	Kota	26,82	20,38	21,36
	Desa	29,80	42,22	40,32
	Kota + Desa	56,61	62,60	61,68
Luar Jawa + Bali	Kota	10,46	8,65	8,93
	Desa	32,93	28,75	29,39
	Kota + Desa	43,39	37,40	38,32
Kawasan Barat Indonesia	Kota	34,21	26,67	27,82
	Desa	50,42	60,72	59,15
	Kota + Desa	84,63	87,39	86,97
Kawasan Timur Indonesia	Kota	3,07	2,36	2,47
	Desa	12,30	10,25	10,56
	Kota + Desa	15,37	12,61	13,03
INDONESIA	Kota	37,28	29,03	30,29
	Desa	62,72	70,97	69,71
	Kota + Desa	100	100	100

Sumber : Susenas tahun 1990 yang dikutip oleh Anwar, dkk (1995:164)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa bagian terbesar dari penduduk miskin berada di Jawa-Bali, terutama di daerah perkotaan. Sebaliknya kemiskinan di luar Jawa+Bali terutama di daerah pedesaan. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa perbaikan kondisi kehidupan masyarakat di luar Jawa-Bali, terutama di daerah pedesaannya masih jauh tertinggal dibandingkan di Jawa-Bali. Hal ini

mengisyaratkan pula bahwa kemiskinan di desa di luar Jawa-Bali telah sama seriusnya dengan di Jawa-Bali. Pada tahun-tahun sebelumnya lebih banyak penduduk miskin berada di pedesaan Jawa-Bali dibanding pedesaan luar Jawa-Bali (Chernichovsky dan Meesook, 1984). Kecenderungan dapat dijadikan indikator "keberhasilan" program transmigrasi dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan Jawa. Bila kita pilah Indonesia menjadi kawasan Barat dan kawasan Timur maka terlihat bahwa penduduk miskin lebih banyak berada di Kawasan Barat Indonesia. Di kedua kawasan, domisili penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan.

Program penanggulangan kemiskinan dimulai sejak PJP I sudah menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, terlihat menjelang pelaksanaan Repelita III (1979/1980-1983-1984), pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu :

- 1) Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- 2) Melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi : pemerataan pembagian pendapatan, penyebaran pembangunan di seluruh daerah, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, kesempatan memperoleh keadilan (Singarimbun, 1996:151).

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Kenyataannya di lapangan, kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan semakin deras mencuat ke permukaan. Memang ada sejumlah pakar yang menyatakan bahwa apabila dibandingkan dengan keadaan beberapa negara di Asia, masyarakat kita memasuki kategori *moderate inequality*, artinya perbedaan tingkat kemakmuran antar berbagai golongan dalam masyarakat mulai mendekat. Buktinya jumlah golongan miskin masih besar dan terus membengkak.

Krisis moneter dan krisis ekonomi pada satu sisi menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan kemiskinan di pedesaan dan di-perkotaan. Karena itu, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang di pilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya

upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Meskipun pada Repelita VI dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan diperluas yaitu dilaksanakannya program IDT (Inpres Desa Tertinggal) pada bulan April 1994 sebagai program yang menggantikan program sebelumnya yaitu (PKT) Pengembangan Kawasan Terpadu (Manual Proyek Buku Satu, 1999:1).

Sejak awal Pelita V pemerintah telah melaksanakan PKT yang merupakan "uji coba" sebuah program anti kemiskinan, dengan kecamatan sebagai unit kerja. Sampai dengan akhir Pelita V program tersebut telah menjangkau 850 kawasan tiap kecamatan 23% dari seluruh kecamatan yang ada 3.680 dan sudah merata pada 4.100 desa di semua propinsi. Program IDT diarahkan untuk mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah-jumlah desa-desa miskin, dengan alokasi dana sebesar Rp. 20 juta untuk satu desa tertinggal. Ruang lingkupnya adalah kegiatan sosial, ekonomi penduduk miskin di desa-desa miskin (Singarimbun, 1996:153-154).

Selain IDT ada juga program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasarannya di pedesaan, dan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) untuk penanggulangan bagi masyarakat yang terkena hantaman krisis sudah berjalan, dimana program tersebut menjadi gerakan moral yang memberi kesempatan partisipasi pada semua pihak terutama penduduk miskin itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Hasan (dalam Noerjaya, 1996:9) bahwa :

Berbagai program pemerintah melalui proyek sebagai upaya penanggulangan kemiskinan seperti Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Bimas atau Imas, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), Koperasi Perkreditan Rakyat (KPR), Kredit Pengadaan Pangan maupun Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan secara menyeluruh di tingkat masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Hal ini terjadi antara lain karena aspek kelembagaan dalam program proyek dimaksud kurang mendapat perhatian yang memadai, seperti program IDT (Inpres

Desa Tertinggal) dan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dalam pelaksanaan kegiatannya mendapat sorotan kritis terutama dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Karena kemiskinan struktural di Indonesia menjadi masalah yang hangat. Penyebabnya adalah semakin tumbuh subur nya kolonialisme internal, adanya peluang kelompok kaya memeras kelompok miskin dan diskriminasi dalam pola peningkatan sumber daya manusia (SDM). Penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata membagi bantuan uang yang melibatkan aparat pemerintah melainkan harus ada penataan kembali atas struktur sosial yang selama ini membelenggu kehidupan kelompok miskin.

Masalah kemiskinan di perkotaan saat ini membutuhkan suatu program penanggulangan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang dimasa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan dan sebagai pendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal) atau yang baru berjalan seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasaramnya di pedesaan. Pemerintah telah merancang suatu proyek yang diharapkan dapat lebih terjamin kelanjutannya yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) *Urban Poverty Project* (Manual Proyek Buku Satu, 1999:1).

Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) mempunyai visi dan misi yaitu suatu program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada kesadaran tentang kelemahan program sejenis sebelumnya, yaitu mengabaikan kelembagaan komunitas sehingga keberlanjutannya tidak terjamin. Dalam konteks ini, "kemiskinan" bukanlah sekedar persoalan uang dan harta benda, tetapi juga persoalan keadilan. Sebagai persoalan uang dan harta benda, maka akar persoalannya hanyalah penghasilan yang kecil dan penyelesaiannya cukup apabila kepada masyarakat diberikan uang dan harta sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Sementara, sebagai persoalan keadilan, penanggulangan kemiskinan hanya dapat dilakukan jika sumber-sumber ketidakadilan diberantas yaitu melalui kelembagaan lokal (institusi lokal) dalam wadah organisasi tertentu.

Dengan pengertian di atas, maka jelaslah terdapat perbedaan amat mendasar antara P2KP dengan program sejenis sebelumnya, baik yang telah selesai maupun yang saat ini tengah berjalan. Perbedaan itu terletak pada skema program dan pendekatan yang digunakan. Pertama, skema program penanggulangan kemiskinan terdiri atas penyelamatan (*rescuing*), pemulihan (*recovering*), stabilisasi (*stabilizing*), dan pengembangan (*developing*). Jika program JPS lainnya (sebelumnya) menggunakan skema program penyelamatan, yaitu memberi tindakan kepada masyarakat agar tidak mati kelaparan akibat krisis, sehingga cukup dengan memberikan ikan kepada masyarakat miskin, maka P2KP menggunakan skema program pemulihan, yaitu memberikan kail kepada masyarakat agar mampu memanfaatkannya untuk mencari ikan.

Kedua, dilihat dari sisi pendekatan, P2KP juga berbeda dengan program JPS lain. Dalam P2KP, yang menjadi titik tumpu dan fokus perhatian utama adalah pemberdayaan kelembagaan komunitas. Jadi tidak langsung pada rumah tangga apalagi individu-individu. Alasan mendasar dibalik pilihan pendekatan ini ialah jika kelembagaan komunitas berhasil diberdayakan, maka individu dan rumah tangga di komunitas sasaran akan mempunyai pengayom, yaitu kelembagaan komunitas mereka sendiri. Di sini yang dimaksudkan dengan kelembagaan adalah gabungan dari aturan main, organisasi yang menjalankan aturan main, kesadaran seluruh warga komunitas untuk menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan aturan main. Jika ada kelembagaan semacam ini maka warga komunitas, baik di tingkat rumah tangga maupun pada tingkat individu, akan merasa terlindungi kepentingannya (Modul No 01/BKM, 2000:1).

Menurut Firmansyah (1998:97) bahwa, "Peningkatkan pendapatan apalagi kesejahteraan tidak akan terjadi apabila telah kritis pemberdayaan tidak akan diarahkan pada perspektif sistem misalnya pranata ekonomi rakyat, institusi dan yang lain".

Maksudnya bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan agar rumah tangga tidak dalam kondisi yang miskin secara terus menerus lagi, maka dalam

hal ini P2KP sebagai institusi atau lembaga berupaya untuk memberdayakan kembali kepada para anggota masyarakat supaya mereka bangun kembali dan bersemangat untuk berusaha supaya keluar dari kemiskinan. Institusi atau lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, berjalan tidaknya aturan main yang berlaku dalam sistem lembaga sangat tergantung pada anggota masyarakatnya. Untuk itulah P2KP mengharapkan adanya keikutsertaan yang aktif dari para anggota yang terhimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Akibat penanggulangan kemiskinan mengalami kegagalan, karena pada program sebelum adanya Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) seperti Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Bimas atau Imas, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Tani (KUT), Koperasi Perkreditan Rakyat (KPR), Kredit Pengadaan Pangan maupun Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tidak melibatkan lembaga komunitas lokal. Dengan kata lain keberadaan lembaga tidak begitu diperhatikan dalam upaya membantu untuk mengelola menyalurkan dana dari proyek tersebut agar bantuan dana tepat sasaran yaitu diterima oleh mereka yang termasuk golongan miskin atau golongan ekonomi lemah. Padahal dalam penanggulangan kemiskinan berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai tergantung pada berfungsinya lembaga dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari anggota masyarakat. Sebab lembaga merupakan tempat segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dana untuk kebutuhan warga.

Seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo (1999:158) bahwa :

Lembaga merupakan fenomena yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan saja karena fungsinya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat, melainkan juga berkaitan erat dengan pencapaian pelbagai kebutuhan manusia.

Sedangkan menurut Paul B. Horten dan Chester L. Hunt (dalam Rahardjo, 1999:159) bahwa Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.

Selain itu fungsi lembaga sebagai wahana atau sarana perantara untuk menampung segala aspirasi, keluh kesah, saran maupun kritik dari para anggota masyarakat sehingga dari keberfungsinya sebagai lembaga maka dapat diketahui permasalahan yang timbul dari kelangsungan jalannya program tersebut. Adanya permasalahan yang diketahui maka pemecahan masalah akan segera teratasi. Dengan cepatnya permasalahan yang teratasi dapat menunjang sekali pada proses penanggulangan kemiskinan. Untuk itu peran dari lembaga harus diupayakan secara maksimal yaitu melalui bentuk kinerja maupun model kelembagaannya harus berorientasi pada anggota. Apabila kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka kemiskinan dapat tertanggulangi.

Menurut Rahardjo (1999:211) bahwa :

Kelembagaan adalah tindakan bersama (*collective action*) yang memiliki pola aturan yang jelas dalam upaya untuk mencapai tujuan atau kebutuhan tertentu. Ini berarti bahwa kelembagaan yang ada dalam suatu masyarakat eksistensinya ditentukan oleh sifat dan ragam kebutuhan yang ada dalam suatu masyarakat.

Oleh sebab itu agar tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dapat tercapai sesuai yang diharapkan maka dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) memberdayakan secara maksimal atau mengaktifkan suatu lembaga yang keberadaannya sangat membantu dalam penyaluran dana dan mendapat dukungan dari anggota masyarakat untuk dibentuk dan didirikan secara syah yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan adanya lembaga ini agar dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) membawa hasil yang memuaskan dan tidak seperti program penanggulangan kemiskinan sebelumnya yang sepenuhnya belum berhasil dalam

mencapai tujuan yang dikehendaki atau selalu gagal dalam usaha membantu menanggulangi kemiskinan.

Seperti yang dikemukakan oleh Sopater, dkk (1998:32) bahwa :

Lembaga yang berdaya adalah lembaga yang memiliki tingkat kualitas kerja yang tinggi, yaitu berorientasi pada pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua program penanganan kerja, ketiga model kepemimpinan, keempat tingkat pengalaman kerja, kelima budaya organisasi.

Selain itu menurut Modul No.01/BKM (2000:2) bahwa :

“Upaya melakukan pemberdayaan kelembagaan komunitas sebagaimana yang dimaksud di atas, ternyata penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sebelumnya baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah atau *non government organization* (NGO) menghadapi 3 hambatan, karena kemiskinan merupakan lingkaran terbesar dalam lingkaran setan, antara lain :

1. Hambatan yang melekat pada individu (ketrampilan, pengetahuan dan motivasi yang rendah, dan lain-lain);
2. Hambatan yang terjadi pada sisi ekonomi atau usaha (kekurangan modal, kekurangan peralatan, kemampuan usaha rendah, tidak memiliki akses ke pasar, dan sebagainya);
3. Hambatan yang terkait dengan tidak memadainya kondisi lingkungan (sanitasi jelek, tempat tinggal rusak, sarana dan prasarana untuk berusaha tidak mendukung, dan lain-lain)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berbicara tentang perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu penelitian untuk memudahkan dalam pembahasan masalah dan menghindari terjadinya generalisasi yang dapat mengakibatkan kesimpulan yang akan diambil memiliki validitas yang rendah. Berdasarkan pertimbangan di atas maka didalam penulisan ini perlu adanya perumusan masalah agar pembahasan masalah yang diajukan menjadi lebih terarah dan spesifik.

Sebelum adanya Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), pemerintah sudah menggalakkan program penanggulangan kemiskinan seperti Kredit Canda Kulak (KCK), Kredit Bimas atau Imas, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit

Usaha Tani (KUT), Koperasi Perkreditan Rakyat (KPR), Kredit Pengadaan Pangan maupun Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tetapi program tersebut selama pelaksanaan dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan belum dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan yaitu pelaksanaan program belum dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Hal tersebut dapat terjadi, karena disebabkan didalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak terdapat lembaga komunitas lokal yang berperan sebagai pengelola dana untuk membantu mereka yang menghadapi masalah kemiskinan agar bantuan tersebut diterima oleh mereka yang benar-benar berhak memperoleh dana tersebut yaitu masyarakat miskin. Dengan kata lain bantuan dana tepat pada sasaran. Ada juga, meskipun didalam program penanggulangan kemiskinan sudah dibentuk lembaga komunitas lokal atas dasar kepentingan bersama (masyarakat bawah), keberadaan dari lembaga komunitas lokal tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan lembaga tersebut dianggap tidak begitu penting dalam upaya membantu mengatasi masyarakat yang mengalami kemiskinan.

Padahal program penanggulangan kemiskinan tujuannya dapat tercapai apabila lembaga komunitas lokal yang telah dibentuk berfungsi dengan baik sesuai perannya dan sebaliknya anggota masyarakat baik yang menjadi tokoh masyarakat maupun yang terhimpun dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) telah memfungsikan lembaga komunitas lokal yang ada. Artinya lembaga komunitas lokal yang ada diberdayakan sesuai dengan perannya dan tugasnya masing-masing dalam rangka untuk membantu kelancaran dalam penyaluran dana sehingga dana bantuan akan tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak menerimanya akhirnya masalah yang muncul relatif kecil.

Sehubungan dengan adanya fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yaitu tentang Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Dengan demikian penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut : *Apakah Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Mampu Memberdayakan Kelembagaan Komunitas Lokal ?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Didalam mengadakan suatu penelitian maka seorang peneliti harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai sehingga maksud dari kegiatan penelitiannya dapat diketahui secara jelas.

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam melakukan suatu penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).

1.3.2 Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini mungkin akan besar manfaatnya baik bagi obyek yang diteliti, penulis maupun pihak-pihak yang terkait sehingga ada hubungan timbal balik dari suatu kegiatan penelitian yang kita laksanakan.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu-ilmu pengetahuan terutama Ilmu Kesejahteraan Sosial.
2. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada pembaca khususnya maupun masyarakat pada umumnya tentang proses pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).
3. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan acuan dan bahan referensi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian pada obyek yang sama.
4. Hasil penelitian dapat memberikan informasi atau masukan kepada Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP), pemerintah setempat maupun

pihak-pihak yang terkait untuk meneruskan cita-citanya dalam memberantas kemiskinan di perkotaan.

1.4 Pokok Bahasan

Dalam setiap penelitian ilmiah harus ditetapkan adanya pokok bahasan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekacauan dalam pembahasan masalah nantinya. Sehingga dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan permasalahan penelitian-penelitian tentang Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).

Proyek ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat melalui penguatan kelembagaan masyarakat yang menjadi sebagai embrio atau fondasi bagi terbentuknya kelembagaan lokal yang dapat berfungsi sebagai lembaga perantara untuk dapat menjangkau lembaga formal. Dengan memberdayakan masyarakat merupakan syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya secara berkelanjutan (*sustainable development*), baik kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi sehingga pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang saat ini dialami, tetapi juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat dimasa mendatang.

Berbicara mengenai pemberdayaan tidak terlepas dari masalah pengembangan komunitas (*community development*). Sebab pemberdayaan komunitas lokal merupakan tujuan dari pendekatan pengembangan komunitas (*community development*). Menurut World Bank (2000) berpendapat bahwa, "Pemberdayaan adalah suatu kegiatan membangun masyarakatnya sendiri (*empowerment*) dan mampu membangun kondisi yang kondusif (*enable*)".

Sedangkan menurut Parwoto (dalam Modul No. 04/BKM, 2000:4), "Pengembangan komunitas (*community development*) dijabarkan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang telah mampu membentuk dirinya, memelihara dirinya dan mempertahankan dari ancaman terhadap eksistensi dirinya serta mampu menularkan kemampuannya itu kepada komunitas yang lain".

Didalam pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal membutuhkan kegiatan membangun institusi lokal. Sebagai titik fokus penelitian ini terletak pada institusi atau lembaganya bukan organisasinya. Organisasi disini berperan sebagai wadah dari institusi atau lembaga yang bertugas membicarakan dan memberikan petunjuk tentang keanggotaannya. Sedangkan institusi atau lembaga menerangkan tata cara atau sistem peralatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Seseorang bisa masuk untuk menjadi anggota suatu organisasi tetapi belum tentu bisa memasuki lembaga atau institusi (Ardaniah, 1997:32).

Menurut Bernes dalam Ardaniah (1997:31) bahwa :

Lembaga dimaksudkan sebagai institusi, maksudnya adalah suatu susunan tata kemasyarakatan dimana didalamnya manusia mengatur dan melaksanakan berbagai macam kegiatan dan usaha yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau persekutuan, pertama-tama merencanakan pembuatan peraturan-peraturan dan tata cara (prosedur untuk melakukan usaha-usaha dalam perjalanan mencapai tujuannya, misalnya membentuk Anggaran Dasarnya (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Dalam proses pemberdayaan membutuhkan bangunan institusi lokal maka didalam membangun institusi lokal berarti harus membangun ketiga hal agar tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dapat tercapai. Berdasarkan dari uraian di atas maka pokok bahasan pada penelitian ini ditekankan pada ketiga hal tersebut antara lain :

1. Adanya aturan main yang adil dan disepakati bersama.
2. Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka.

3. Adanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas untuk bersama-sama menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan aturan main serta mengadakan perubahan jika dianggap perlu.
4. Kelayakan peran lembaga komunitas lokal dan tingkat kinerja lembaga komunitas lokal yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk mendapatkan teori-teori yang dianggap relevan dengan masalah-masalah yang ditampilkan dalam suatu penelitian maka dilakukan kajian pustaka. Oleh sebab itu teori mengenai kemiskinan, pemberdayaan, pengembangan masyarakat, masyarakat miskin dan konsep yang mendukung tentang pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal maka akan diuraikan dalam tulisan ini. Dari teori-teori tersebut diharapkan nantinya akan dapat membantu untuk memperjelas arah pembahasan permasalahan yang ada.

Kehidupan manusia berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam masyarakat juga terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan dan golongan. Ada golongan kelas atas, golongan sedang dan golongan rendah. Golongan rendah inilah yang disebut masyarakat miskin. Kemiskinan menyebabkan hidup masyarakat menjadi sengsara. Kenyataan demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun diperlukan upaya-upaya tertentu agar kemiskinan dapat diatasi.

Membahas masalah kemiskinan, cukup banyak pengertian tentang kemiskinan. Namun demikian, para ilmuwan mempunyai dasar yang sama, pemikiran yang sama mengenai kemiskinan. Persamaan dasar kemiskinan tersebut adalah pemahaman kemiskinan yang dipandang dari segi kekuatan ekonomi, hubungan sosial hak atas kekayaan dan kekuasaan.

Warsito (dalam Prayitno, 1993:48-49) mengatakan :

Kemiskinan sendiri diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat (penduduknya) berada pada standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kuantitatif dalam bentuk pendapatan rendah, kesehatan buruk, perumahan kurang layak, angka kematian tinggi,

pendidikan tidak memenuhi dunia pendidikan dan lain-lain. Keadaan ini dapat disebabkan oleh 2 hal. Pertama, keterbatasan sumber daya alam (SDA) atau *resources endowment*, rendahnya sumber daya manusia (SDM), terbatasnya penguasaan teknologi. Kedua, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, penyebaran penduduk tidak merata dan sistem kelembagaan tidak mendukung adanya pemerataan pendapatan. Sedangkan kemiskinan secara umum dikategorikan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut bercirikan pada pendapatan penduduk rendah, kekurangan pangan dan gizi, kesehatan buruk, pendidikan rendah, kurang kesempatan kerja dan perumahan tidak layak huni. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan keadaan dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri pada arah yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya.

Secara rinci, John Friedman (dalam Ala 1979:4) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi :

1. Modal yang produktif atas asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan dan lain-lain.
2. Sumber keuangan seperti income dan kredit yang memadai.
3. Organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
4. *Network* atau jaminan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
5. Informasi-informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

Sebab-sebab Kemiskinan

Pembahasan masalah kemiskinan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pengentasan kemiskinan menjadi pembicaraan yang sangat hangat disemua lapisan masyarakat. Untuk dapat memberikan analisa dan solusi upaya mempercepat pengentasan kemiskinan tersebut, maka harus terlebih dahulu diketahui penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan dalam 3 pengertian yaitu :

Pertama, Kemiskinan natural atau alamiah yaitu kemiskinan yang di sebabkan oleh kualitas sumber daya alam yang kurang memadai sehingga peluang produksi relatif kecil ataupun jika ikut serta pada kegiatan produksi dan pembangunan umumnya dengan tingkat efisiensi yang relatif rendah.

Kedua, Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan. Maksudnya dalam pengertian yang paling luas yaitu tidak hanya mencakup tatanan organisasi tetapi juga mencakup aturan permainan yang ditetapkan (Sayogya, 1996:51).

Kemiskinan struktural ini terjadi karena kondisi struktural atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menciptakan tetapi juga melanggengkan kemiskinan didalam masyarakat. Dalam kondisi struktur yang demikian, kemiskinan menggejala disebabkan oleh tatanan sosial yang tidak adil yang pada akhirnya banyak warga masyarakat yang gagal memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya sehingga mereka yang miskin ini menjadi serba kekurangan, tidak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia (Suyanto, 1995:59).

Ketiga, Kemiskinan kultural yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah untuk melakukan perubahan, menolak untuk mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai umum. Dengan ukuran absolut mereka dapat dikatakan miskin tetapi kelompok masyarakat ini tidak merasa dan tidak mau disebut miskin. Dengan keadaan seperti ini, berbagai macam kebijakan pembangunan akan sulit untuk menjangkau mereka (Sumodiningrat, 1998:28).

Selain ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, faktor yang paling mendominasi penyebab masalah kemiskinan adalah migrasi. Jaenuri (1993:11) berpendapat :

Migrasi merupakan perpindahan penduduk pedesaan ke wilayah perkotaan yang disebabkan karena adanya faktor pendorong dari daerah asal yaitu kurang memiliki lahan pertanian, lapangan kerja terbatas dan rendahnya pendapatan di desa, serta adanya faktor penarik dari kota yaitu antara lain karena pembangunan dan pertumbuhan lebih tersentral di kota sehingga menawarkan berbagai kesempatan kerja dan kesempatan mengembangkan ketrampilan maupun keahliannya.

Masalah kemiskinan yang terjadi akibat faktor migrasi disebabkan penduduk yang pindah ke kota (para urbanis) tidak mempunyai keahlian (skill), tidak memiliki pendidikan cukup, lebih-lebih pendidikan di desa cenderung rendah kualitasnya. Jadi mereka adalah generasi pekerja kasar yang tidak mempunyai keahlian apa-apa kecuali tenaganya yang sudah terbiasa melayani sektor ekonomis organis dan tradisional. Generasi demikian rentan terhadap gejolak ekonomi karena mereka juga tidak mempunyai modal dan simpanan. Padahal di kota kemampuan kerja yang tinggi diutamakan bukan mengandalkan kekuatan. Dengan banyaknya penduduk yang berdatangan ke kota membawa dampak pada kondisi kota yaitu mereka yang tidak mempunyai keahlian jatuh miskin di kota-kota, karena mereka tidak mampu bersaing dalam bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran.

Karena kebiasaan menganggur dan bermalas-malasan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia menjadi rendah. Akibat kualitas sumber daya manusia rendah akhirnya tidak mempunyai pendapatan untuk modal usaha. Disamping itu sarana dan prasarana yang ada di masyarakat kurang mendukung.

Penduduk yang pindah ke kota bertujuan untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik. Untuk itulah sebelum mengadakan migrasi haruslah menyiapkan dirinya maupun pikirannya dalam menghadapi dunia kerja dan persaingan agar penduduk apabila memang benar-benar pindah ke kota tidak merasa terkejut dengan kondisi kota yang berbeda dengan daerah asal atau desa.

Berarti penduduk yang mengadakan migrasi ke kota pada intinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dikemukakan oleh Maslow (dalam Sumarnonugroho, 1991:6) yang mengelompokkan kebutuhan dasar manusia, antara lain :

1. Kebutuhan-kebutuhan fisik (udara, air, makan, dan sebagainya).
2. Kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan).
3. Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi.
4. Kebutuhan penghargaan (dari dirinya dan pihak lain).
5. Kebutuhan mengaktualisasikan dirinya dan bertumbuh”.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yaitu dengan cara mengadakan pengembangan masyarakat yang mendasarkan diri pada kelembagaan komunitas lokal. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1956 (dalam Ndraha, 1990:72) berpendapat :

Pembangunan Masyarakat atau *Community Development* adalah suatu proses. Baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu ke dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu di dalam proses tersebut.

Proses tersebut meliputi 2 elemen dasar yaitu pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka, sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Dan kedua, bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan di dalam program yang dirancang untuk melancarkan perbaikan terhadap berbagai proyek-proyek khusus.

Menurut Dahrendorf (dalam Nasikun, 1995:22-23), membangun institusi lokal berarti harus membangun :

1. Aturan main yang adil dan disepakati bersama.

Maksudnya : bahwa setiap kelompok yang terlibat harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri.

Konsep yang berkaitan dengan aturan main yang adil dan disepakati bersama menurut :

Sukamdiyo (dalam Dasuki, 1999:121) mengatakan bahwa dalam kegiatan operasi sehari-hari terutama dalam menjalankan usaha, pengambilan keputusan harus dilakukan bersama-sama (seluruh anggota masyarakat) dan konsisten dalam menjalankan tugas.

2. Institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka.

Maksudnya :

- Bahwa institusi atau lembaga tersebut harus merupakan lembaga-lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya.
- Kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis dalam arti hanya lembaga-lembaga itulah yang berfungsi.
- Peranan lembaga-lembaga haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para anggotanya.

- Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, dalam mana setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Konsep yang berkaitan dengan institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka dikemukakan oleh :

Harris (dalam Dasuki, 1999:120) bahwa :

Orientasi kepemimpinan yang partisipatif (*the participative leader*) adalah pemimpin mencari berbagai pendapat dan pemikiran dari para bawahan tentang keputusan yang diambil, disamping mengadakan konsultasi dengan orang lain. Pikiran bawahan sangat diperhatikan sehingga pemimpin lebih sportif dan terbuka.

Sukamdiyo (dalam Dasuki, 1999:117) mengatakan :

Model kepemimpinan yang bersifat demokratis biasanya senang membimbing secara efisien kepada anak buahnya dan menginginkan partisipasi aktif dari bawahan sehingga ia sangat menghargai potensi setiap individu pengikutnya. Ia selalu mendengarkan saran serta nasihat dari para pengikutnya sehingga koordinasi pekerja (bawahan) sangat menonjol dan kerjasama diantara mereka dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, kepada para bawahannya selalu diberikan kesempatan yang besar untuk ambil bagian dalam kepemimpinan.

Menurut Sukamdiyo (dalam Dasuki, 1999:120) bahwa :

Dalam pengambilan keputusan pada rapat anggota harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keputusan yang diambil tidak dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Davis dan Newstrom (1996:179) mengemukakan :

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Menurut Davis (dalam Dasuki, 1999:146) bahwa :

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Proses komunikasi akan efektif jika pesan telah diterima dan dimengerti oleh yang dimaksud serta menjadi lengkap apabila ada umpan balik atau tanda jawaban telah diterima (komunikasi dua arah).

Sedangkan menurut Anoraga (1995:170) bahwa :

Komunikasi Dialogis adalah komunikasi dua arah yang sifatnya timbal balik. Penyampaian pesan adalah juga menerima pesan. Disamping itu masing-masing pihak akan bergantian menyampaikan dan menerima pesan.

3. Kesadaran kolektif seluruh warga komunitas.

Maksudnya : setiap kelompok harus menyadari akan adanya aturan main di dalam lembaga tersebut sehingga perlu dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak.

Konsep yang berkaitan dengan kesadaran kolektif seluruh warga komunitas dalam menjaga, menegakkan, mengawasi aturan main dan mengadakan perubahan jika aturan main dianggap perlu diubah menurut :

Anoraga dan Suyati (1995:170) mengatakan :

Dalam manajemen konflik disini jika masalah muncul maka diselesaikan secara bersama-sama. Berarti konflik tersebut sifatnya integratif. Seperti yang dikemukakan oleh Anoraga bahwa penyelesaian konflik integratif ada 3 macam pemecahan yaitu melalui konsensus, konfrontasi dan tujuan bersama. *Konsensus* adalah dimana pihak-pihak yang sedang bertentangan bertemu secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan satu pihak. *Konfrontasi* adalah dimana pihak-pihak yang saling berhadapan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima penyelesaian dari konflik yang rasional sering dapat diketemukan. *Tujuan bersama* adalah penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa dalam lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) apabila ada konflik diselesaikan secara bersama-sama dan sejauh

mungkin menguntungkan kedua belah pihak, maka konsep yang mendukung terhadap terjadinya konflik maka penyelesaiannya melalui konsensus.

Davis dan Newstrom (1996:202) mengemukakan :

Apabila ada konflik yang timbul dilakukan melalui pendekatan menenangkan. Dalam situasi ini, dicari pemecahan kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang tujuannya adalah memadukan kebutuhan kedua belah pihak melalui pemecahan masalah, kolaborasi dan kompromi yang membangun.

Sedangkan Davis dan Newstrom juga berpendapat (1996:202) tentang pentingnya umpan balik untuk memberikan informasi guna memahami dan bersiap-siap untuk kelancaran pekerjaan berikutnya.

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah sebagai target penerima bantuan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yang sesungguhnya dan merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, kelompok swadaya masyarakat merupakan suatu alat yang dapat menggerakkan sumber daya lokal guna mempertinggi pencapaian kesejahteraan bersama dan sebagai wahana bagi terselenggaranya proses belajar mengajar dalam proses pengambilan keputusan.

Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam P2KP ditujukan dalam upaya pemampuan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat melalui peningkatan peran-perannya. BKM beranggotakan warga komunitas yang diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan KSM-KSM, perwakilan organisasi sosial dan kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), tokoh masyarakat atau tokoh agama. Unsur aparatur daerah, misalnya anggota LKMD dapat berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh anggotanya.

Shadily (1984:47) mengemukakan :

Masyarakat adalah individu atau manusia yang hidup bersama di suatu tempat yang didalamnya terdapat kelompok-kelompok kelas, mungkin juga ada sedikit kasta, dimana terdapat reaksi-reaksi antara individu yang

satu dengan individu yang lain. Selain itu terdapat pula interaksi antar individu yang berada didalamnya.

Sedangkan Iver dan Page (dalam Soekanto, 1990:26) mengemukakan :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat berubah.

Begitu juga Linton (dalam Soekanto, 1990:26) mengemukakan :

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Walaupun definisi tentang masyarakat yang telah disebutkan di atas saling berlainan tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Upaya untuk memahami potensi masyarakat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilaksanakan dengan melihat persepsi masyarakat mengenai pengertian kelompok dan manfaat adanya suatu kelompok. Sedangkan prioritas utama dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha mengembangkan kelembagaan kelompok miskin.

Masyarakat miskin adalah sebagai subyek dari upaya pembangunan bukan semata-mata menjadi obyek dari berbagai proyek pembangunan. Hal ini mengandung

arti bahwa masyarakat miskin ikut mengambil peranan aktif dalam pengambilan keputusan apabila yang menyangkut kepentingan mereka. Maka dari itu dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Moedjiono (dalam Soetrisno, 1998:171) bahwa, "Pemberdayaan sebagai kegiatan usaha yang mandiri, maksudnya upaya-upaya untuk peningkatan ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan".

Pemberdayaan menurut konsep Kamus Besar Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan (Depdikbud, 1982).

Dengan adanya pemberdayaan sebagai salah satu wujud pengembangan kelembagaan. Selain itu pengembangan kelembagaan bisa berupa :

1. Peningkatan kualitas keahlian dibidang tertentu dan pemahaman terhadap kinerja organisasi melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi maupun pelibatan secara langsung terhadap pemecahan masalah-masalah keorganisasian yang muncul.
2. Pengembangan secara struktural dengan menambah unit atau sub unit baru untuk menangani masalah yang muncul sebagai akibat dari adanya tekanan atau kegiatan adaptasi terhadap suatu kondisi atau mengurangi jumlah unit kerja sebagai bagian dari pendampingan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas organisasi (Hall dalam Poerwanto, 1996:38).

Maka dari itu didalam pemberdayaan dibutuhkan adanya pengembangan sumber daya bersifat totalitas dan holistik. Arah pengembangan tidak hanya dipusatkan pada dimensi ekonomi tetapi perlu memperhatikan dimensi sosial, politik, budaya dan keagamaan. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia serta mengangkat harkat dan martabat manusia. Di sini manusia diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai perencana, pelaku dan penikmat pembangunan.

UNDP atau *United Nations Development Programme* (dalam Effendi, 1993:6) merumuskan pengertian sumber daya manusia sebagai upaya untuk pengembangan manusia yang didefinisikan sebagai berikut :

Pengembangan manusia (sumber daya manusia) adalah proses meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan (*a process of enlarging people's choices*). Pengertian ini memusatkan perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia (melalui investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan kemampuan itu (melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja produktif).

Pengertian di atas mengandung makna bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan manusia supaya kemampuan yang terbentuk tidak sia-sia. Ini berarti pengembangan sumber daya manusia merupakan amanah untuk memberikan peluang partisipasi yang lebih riil pada warganegara melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, peluang kerja dan berusaha.

Sayogya membedakan desa dan kota. Mereka disebut miskin baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, jika penghasilannya kurang dari 320 kg beras yang bertempat tinggal di desa dan kurang dari 480 kg beras yang bertempat tinggal di kota, tiap tahun tiap jiwa. Beliau juga membedakan golongan berpenghasilan rendah itu menjadi 3 yaitu miskin, miskin sekali dan sangat miskin (Sayogya dalam Suparlan, 1984:13-14).

Kemiskinan merupakan tanggung jawab dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasinya, dan kebijaksanaan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan (dengan berbagai program atau proyek pembangunan) merupakan suatu kebijaksanaan yang sangat bermoral. Sehingga dalam hubungan itu pendekatan kelembagaan dibutuhkan.

Oleh Abustam (dalam Sarman 1997:35) dikemukakan bahwa :

Pendekatan kelembagaan itu seyogyanya lebih menekankan pada semangat "solidaritas sosial" dapat ditumbuhkembangkan pada golongan masyarakat menengah ke atas agar mereka mau membantu golongan

masyarakat bawah atau massa miskin. Atau dengan kata lain muncul suatu gerakan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan penduduk. Sedangkan sebagai tolok ukur, perubahan kelembagaan yang diharapkan adalah perubahan yang dapat meningkatkan pendapatan massa miskin.

Berarti dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan, masyarakat yang tergolong sebagai kelas menengah ke atas mempunyai suatu tugas untuk membantu kepada saudaranya yang berada pada kondisi miskin. Mengandung maksud bahwa mereka yang serba kecukupan harus memberi sesuatu secara ikhlas terhadap mereka yang miskin. Maka prinsip saling memberi dan menerima harus diterapkan. Bisa saja yang kecukupan mempunyai kelemahan dibidang apa, sedangkan yang miskin mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka yang kecukupan. Begitu juga sebaliknya, yang miskin mempunyai kekurangan dibidang ekonomi sedangkan yang kaya mempunyai kelebihan hartanya, maka sebagian dari harta yang dimiliki oleh si kaya harus diberikan kepada mereka yang kekurangan.

Jelas bahwa manusia dilahirkan di muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Ada yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu antara orang yang satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi untuk mencapai tujuan hidup serta kebutuhan hidup dapat terpenuhi sehingga kemiskinan menurun.

Carvalho dan White (dalam Sarman 1997:34) mengatakan, secara konseptual ada 2 strategi yang disarankan oleh Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan penduduk yaitu :

1. Menyangkut peningkatan wilayah pertumbuhan (ekonomi) yang memungkinkan dapat digunakannya secara efisien, asset tenaga kerja yang melimpah pada kelompok masyarakat paling miskin.
2. Menyangkut pengadaan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok miskin. Dalam hubungan itu kriteria untuk suatu intervensi seyogyanya mengacu pada pemahaman tentang :
 - a. adanya suatu mekanisme khusus untuk mengidentifikasi dan menemukan kelompok miskin,
 - b. membangkitkan partisipasi aktif kelompok miskin yang seharusnya terlibat dalam proyek penanggulangan kemiskinan”.

Pada masyarakat negara-negara berkembang untuk menuju suatu kondisi masyarakat atau keluarga madani, selalu dihadapkan pada kendala-kendala klasik seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak memadainya sarana dan prasarana penunjang usaha produksi (infrastruktur) dan kurangnya modal usaha. Ketiga faktor tersebut ternyata juga menjadi kendala masyarakat Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat atau keluarga yang madani. Konsekuensi dari kendala-kendala tersebut, suatu masyarakat akhirnya dihadapkan pada persoalan-persoalan lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan ketergantungan yang sulit diidentifikasi penyebabnya (Modul No.06/BKM, 2000:8).

Denis Goulet (dalam Todaro, 1983:124) menyatakan :

Keterbelakangan adalah sesuatu yang sangat tidak pantas, kekotoran penyakit, kematian yang tidak seharusnya dan keputusan dan semua yang serupa. Tidak ada orang yang mengerti bahwa keterbelakangan yang ada padanya merupakan refleksi statistik pendapatan yang rendah, perumahan yang tidak memenuhi syarat, kematian prematur atau pengangguran.

Poerwanto (1996:36) mengatakan :

Secara ideal, masalah-masalah kemiskinan akan bisa dikurangi atau mungkin bisa diselesaikan dengan melalui berbagai program terpadu dari berbagai institusi atau lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam jangka waktu yang panjang. Masalah kemiskinan adalah *complicated* yang tidak bisa ditinjau dari satu aspek saja, melainkan harus dikaji secara simultan. Untuk itu maka setiap lembaga pemerintah terkait perlu melakukan pengembangan kelembagaan baik dari aspek internal maupun interorganisasional.

Maksudnya pengembangan kelembagaan **internal** adalah pemberdayaan terhadap sumber daya yang dimiliki baik melalui struktural maupun yang non struktural seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menangani masalah-masalah organisasi dan bersifat pembaharuan. Sedangkan pengembangan kelembagaan **interorganisasional** adalah kerjasama antar lembaga-lembaga baik yang mempunyai kaitan secara langsung terhadap eksistensi lembaga tersebut maupun tidak.

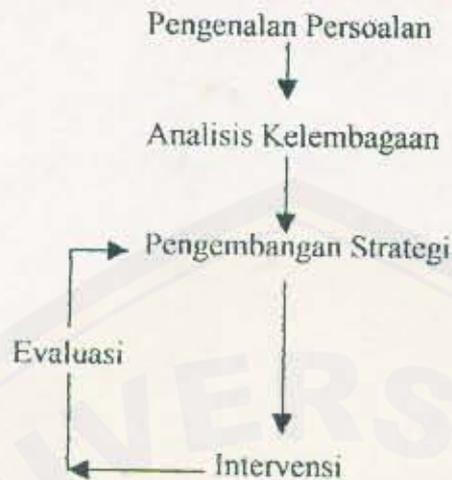
Kerjasama antar lembaga sebagai seluruh pengembangan merupakan proses kehidupan organisasi. Kerjasama ini bisa reguler maupun ireguler, tergantung dari masalah yang dihadapi dan mengharuskan adanya kerjasama antar lembaga. Logikanya, tidak ada sebuah lembaga bisa berdiri sendiri tanpa terlibat dalam suatu sistem sosial. Karena pada kenyataannya sebuah lembaga maupun organisasi adalah sebuah unit sosial yang hidup dalam suatu sistem sosial.

Masalah kemiskinan yang kompleks sifatnya, penyelesaiannya mengharuskan adanya kerjasama antar lembaga secara terpadu sekalipun di masing-masing lembaga sudah memiliki program yang mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda. Bentuk kerjasama dapat berupa sebuah koordinasi dari kegiatan yang sedang berlangsung atau membentuk badan baru yang terdiri dari berbagai lembaga terkait dengan desain organisasi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing.

Pada dasarnya proses pengembangan kelembagaan baik internal maupun interorganisasional harus diawali dengan pengenalan persoalan yang mencakup identifikasi permasalahan dan diagnosa mengarahkan organisasi untuk melakukan analisis keorganisasian, yaitu melakukan analisis terhadap kemampuan organisasi yang mencakup pemantauan terhadap sumber daya, fungsi serta misi yang dimiliki.

Setelah melakukan analisis terhadap kemampuan organisasi, tahap berikutnya adalah pengembangan strategi yaitu pilihan-pilihan yang mencakup model kelembagaan atau organisasi dan teknik-teknik pemecahan masalah yang akan digunakan. Setelah dipilih model untuk dijadikan acuan yang sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan, tindakan selanjutnya adalah intervensi terhadap hal-hal yang telah dipilih untuk dilakukan dalam pengembangan yang dikehendaki. Intervensi tersebut mencakup pengarahan dan pengawasan yang dijadikan dasar untuk evaluasi dan sebagai umpan balik pada tahap berikutnya.

Skema : PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN



Sumber : Poerwanto (1996 : 38 - 40)

1.6 Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (1986:23), Definisi Operasional tidak lain daripada mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk-konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi variabel atau definisi operasional dalam pengertian sangat diperlukan sebagai petunjuk tentang pengukuran suatu variabel.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan konsep yang dapat diukur dan tidak terlepas dari pokok bahasan. Konsep yang akan dioperasionalkan berasal dari variabel yang bersifat abstrak. Dari variabel tersebut dapat dibagi ke dalam indikator-indikator. Maka dalam hal ini yang menjadi kriteria untuk ukuran pada penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan adalah:

1.6.1 Adanya aturan main yang adil dan disepakati bersama, maksudnya bahwa setiap kelompok harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu yang menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri.

Itemnya meliputi :

a. Pengambilan Keputusan

Aspek Penilaian :

1) Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : BKM secara konsisten menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat.

Adapun kriteria pengukuran tentang tujuan dan proses pengambilan keputusan didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika tujuan dan proses pengambilan keputusan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika tujuan dan proses pengambilan keputusan hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika tujuan dan proses pengambilan keputusan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika tujuan dan proses pengambilan keputusan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika tujuan dan proses pengambilan keputusan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Mekanisme Pengambilan Keputusan

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Anggota terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun kriteria pengukuran tentang mekanisme pengambilan keputusan didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika mekanisme pengambilan keputusan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika mekanisme pengambilan keputusan hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika mekanisme pengambilan keputusan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika mekanisme pengambilan keputusan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika mekanisme pengambilan keputusan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

b. Pembagian Tugas

Aspek Penilaian :

1) Distribusi Kekuasaan

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Aktivitas dan kewenangan tersebar secara proporsional pada pihak-pihak yang terlibat sebagai anggota BKM.

Adapun kriteria pengukuran tentang distribusi kekuasaan didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika distribusi kekuasaan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika distribusi kekuasaan hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika distribusi kekuasaan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika distribusi kekuasaan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika distribusi kekuasaan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Corak Kepemimpinan

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Anggota BKM mampu berperan sebagai fasilitator yaitu pihak yang memfasilitasi warga, khususnya anggota KSM agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik.

Adapun kriteria pengukuran tentang corak kepemimpinan didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika corak kepemimpinan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika corak kepemimpinan hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika corak kepemimpinan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika corak kepemimpinan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika corak kepemimpinan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

3) Peran Anggota BKM

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Anggota BKM sebagai pengambil inisiatif perencanaan dan pelaksanaan.

Adapun kriteria pengukuran tentang peran anggota BKM didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika peran anggota BKM sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika peran anggota BKM hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika peran anggota BKM telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 : jika peran anggota BKM masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika peran anggota BKM bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

1.6.2 Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka, maksudnya bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk membangun kembali kehidupan masyarakat madani yang mampu mengatasi secara mandiri tentang masalah kemiskinan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Itemnya adalah :

a. Proses Pembentukan BKM

Aspek Penilaian :

1) Proses Pembentukan BKM

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Dibentuk dari “bawah” dan atas kepentingan warga, jika tidak dikehendaki, pembentukan BKM harus dibatalkan dan program tidak dilaksanakan di kelurahan ini, proses pembentukan menggunakan pendekatan dan teknik partisipatif.

Adapun kriteria pengukuran tentang proses pembentukan BKM didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika proses pembentukan BKM sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika proses pembentukan BKM hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika proses pembentukan BKM telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk atau skor 2 : jika proses pembentukan BKM masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika proses pembentukan BKM bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Pengaruh dari Luar

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Relatif rendah, BKM terbentuk murni atas kehendak warga, oleh karena itu bersifat relatif otonom.

Adapun kriteria pengukuran tentang pengaruh dari luar didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika pengaruh dari luar sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika pengaruh dari luar hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika pengaruh dari luar telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika pengaruh dari luar masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika pengaruh dari luar bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

b. Kelembagaan BKM

Aspek Penilaian :

1) Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Anggota BKM berorientasi ke bawah serta mengabdikan penuh pada kepentingan masyarakat.

Adapun kriteria pengukuran tentang orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika orientasi kepemimpinan dan loyalitas anggota bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Kepemimpinan kolektif, tidak ada individu menonjol, keputusan diambil atas dasar musyawarah atau dengan suara terbanyak.

Adapun kriteria pengukuran tentang model kepemimpinan dan pengambilan keputusan didasarkan pada jawaban responden kemudian diberi skor, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan. jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan hampir sama
- Cukup atau skor 3 : jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.

- Buruk sekali atau skor 1 : jika model kepemimpinan dan pengambilan keputusan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

c. Tujuan BKM

Aspek Penilaian :

1) Tipe dan Tingkat Partisipasi

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Diharapkan partisipasi penuh, konsisten, pengelompokan terjadi atas dasar kesadaran akan kepentingan bersama, berpihak pada masalah orang miskin.

Adapun kriteria pengukuran tentang tipe dan tingkat partisipasi didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika tipe dan tingkat partisipasi sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika tipe dan tingkat partisipasi hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika tipe dan tingkat partisipasi telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika tipe dan tingkat partisipasi masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika tipe dan tingkat partisipasi bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Kondisi Komunikasi

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Terjadi dua arah, semua anggota memiliki hak sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Adapun kriteria pengukuran tentang kondisi komunikasi didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika kondisi komunikasi sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

- Baik atau skor 4 : jika kondisi komunikasi hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika kondisi komunikasi telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika kondisi komunikasi masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika kondisi komunikasi bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

1.6.3 Adanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas, maksudnya bahwa setiap kelompok harus menyadari akan adanya aturan main di dalam lembaga tersebut sehingga perlu dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak.

Itemnya meliputi :

a. Menjaga Aturan Main

Aspek Penilaian :

1) Perbedaan Pendapat dan Manejemen Konflik

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Bila ada perbedaan pendapat dan konflik diselesaikan bersama, sejauh mungkin diupayakan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Adapun kriteria pengukuran tentang perbedaan pendapat dan manajemen konflik didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 : jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika perbedaan pendapat dan manajemen konflik bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Hubungan Kerja Anggota

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Informal dan tidak kaku, akrab dan saling mendukung.

Adapun kriteria pengukuran tentang hubungan kerja anggota BKM didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika hubungan kerja anggota BKM sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika hubungan kerja anggota BKM hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika hubungan kerja anggota BKM telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika hubungan kerja anggota BKM masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika hubungan kerja anggota BKM bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

b. Menegakkan Aturan Main

Aspek Penilaian :

1) Posisi Masyarakat

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Masyarakat menjadi subyek atau penentu kebijakan.

Adapun kriteria pengukuran tentang posisi masyarakat didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika posisi masyarakat sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika posisi masyarakat hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika posisi masyarakat telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika posisi masyarakat masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika posisi masyarakat bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

2) Model Penanganan Pekerjaan

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Seluruh pekerjaan adalah tanggung jawab dan dikerjakan bersama oleh seluruh anggota BKM.

Adapun kriteria pengukuran tentang model penanganan pekerjaan didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika model penanganan pekerjaan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika model penanganan pekerjaan hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika model penanganan pekerjaan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika model penanganan pekerjaan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika model penanganan pekerjaan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

c. Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main

Aspek Penilaian :

1) Motif Keterlibatan Anggota

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Sukarela dan tanpa pamrih.

Adapun kriteria pengukuran tentang motif keterlibatan didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika motif keterlibatan sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika motif keterlibatan hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.
- Cukup atau skor 3 : jika motif keterlibatan telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika motif keterlibatan masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika motif keterlibatan bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

d. Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main Dianggap Perlu Diubah

Aspek Penilaian :

1) Adanya Umpan Balik

- *Kondisi kinerja yang diharapkan* : Sangat dibutuhkan sebagai titik masuk (*entry point*) bagi kelancaran pekerjaan berikutnya.

Adapun kriteria pengukuran tentang adanya umpan balik didasarkan pada jawaban responden dan diberi skor sesuai jawaban yang ada, bila jawaban :

- Baik sekali atau skor 5 : jika umpan balik sama dengan kondisi kinerja yang diharapkan.
- Baik atau skor 4 : jika umpan balik hampir sama atau mendekati kondisi kinerja yang diharapkan.

- Cukup atau skor 3 : jika umpan balik telah mengarah pada kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk atau skor 2 : jika umpan balik masih jauh dari kondisi kinerja yang diharapkan.
- Buruk sekali atau skor 1 : jika umpan balik bertolak belakang dengan kondisi kinerja yang diharapkan.

Dari ketiga indikator yang telah disebutkan di atas, untuk mengukur tingkat pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat dihitung melalui kelayakan peran BKM dan tingkat kinerja BKM.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian pada umumnya adalah menemukan suatu generalisasi dengan menerangkan fenomena yang meliputi permasalahan dalam penelitian. Untuk menjelaskan fenomena yang ada diperlukan suatu metode, karena metode sangat memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara atau bentuk teknik yang dipergunakan oleh peneliti, baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data untuk memperoleh data yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan metode penelitian yang tepat maka dapat mempermudah dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang diteliti.

Adapun metode-metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

1.7.1 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Di kota Pasuruan terdapat 2 kecamatan yang mendapat bantuan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yaitu :

1. Kecamatan Purworejo yang terdiri dari 2 kelurahan meliputi Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pohjentrek.

2. Kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 3 kelurahan meliputi Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar.

Karena banyaknya kelurahan yang harus dijangkau dan mengingat faktor waktu, tenaga dan biaya yang terbatas maka dalam hal ini penulis hanya membatasi lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan yang terdiri dari Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar.

Adapun alasan penulis menetapkan ketiga lokasi penelitian tersebut karena di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan letaknya di tengah kota, strategis dan penulis akan memperoleh data yang relevan berkaitan dengan obyek yang diteliti. Untuk itu penulis mengambil alternatif yaitu menjadikan ketiga kelurahan yang ada di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan meliputi Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar sebagai daerah sasaran untuk penelitian.

1.7.2 Metode Penentuan Populasi

Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, penulis harus menentukan populasi. Seperti yang dikemukakan oleh Mantra dan Kasto (dalam Singarimbun, 1995:152) bahwa, "Populasi/Universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga".

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi populasi sampling dalam penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat yang ada di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan yang dijadikan populasi sasaran adalah seluruh populasi sampling yang dikenai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bertempat tinggal di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan
2. Kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yaitu mereka yang mewakili KSM penerima bantuan atau pinjaman, tiap kelurahan masing-masing sebanyak 7 orang;
3. Tokoh atau kelompok masyarakat umum, tiap kelurahan masing-masing sebanyak 7 orang;

4. Fasilitator Kelurahan berjumlah 1 orang pada tiap-tiap kelurahan.

1.7.3 Metode Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Menurut Hadi (1995:73), berkaitan dengan penentuan populasi bahwa, "Sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari populasi".

Karena yang akan menjadi responden dikenai syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas maka penulis menentukan banyaknya sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Marzuki (2000:50), Purposive Sampling yaitu sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili populasi. Serta pemilihan sekelompok subyeknya didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berkaitan dengan pendapat di atas, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 orang yaitu berasal dari 3 kelurahan yang menjadi daerah sasaran dalam penelitian ini, masing-masing 15 orang dari Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng. Dari 45 orang nanti akan menjadi peserta dalam rapat pembentukan BKM dan kehadirannya sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan.

1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Agar suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

a. Metode Observasi

Melalui observasi, penulis langsung menggali data dan informasi mengenai proses pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yaitu dengan cara mengadakan pengamatan, pencatatan secara langsung ke lokasi penelitian. Dari hasil observasi tersebut, penulis memperoleh informasi-informasi dan data dari kecamatan maupun lembaga yang bersangkutan yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengakaji kegiatan penelitian lebih lanjut.

b. Metode Kuesioner

Untuk memperoleh data primer dari responden yang mantap dan dijadikan sumber data untuk dianalisa dalam penulisan ini, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam metode kuesioner, penulis memberikan pertanyaan yang berupa tulisan untuk dijawab oleh responden, sehingga dari hasil jawaban kuesioner penulis klasifikasikan kedalam tabel frekuensi dan diberi penjelasan yang didasarkan pada perhitungan dari data tabel. Di dalam kuesioner, penulis menggunakan jenis pertanyaan terbuka (*open ended questions*) dan pertanyaan tertutup (*fixed alternative* atau *closed questioner*).

c. Metode Interview

Dalam metode interview ini, penulis mengadakan wawancara dengan bertatap muka atau berhadapan langsung dengan responden untuk menggali data dan mendapatkan informasi secara lisan dari responden. Wawancara sangat berperan sebagai penguat dari data hasil kuesioner atau sebagai tambahan masukan informasi yang belum didapatkan dari hasil kuesioner ataupun belum disebutkan atau dijawab oleh responden dalam daftar pertanyaan.

Dalam hal ini pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis kepada responden dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Artinya pedoman wawancara hanya memuat atau menanyakan tentang garis besarnya atau pokok-pokok pemikiran yang dianggap penting dan sesuai dengan pokok permasalahan

sehingga dari hasil wawancara tersebut membantu penulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

d. Informan

Informan disini keberadaannya sangat memegang peranan penting dalam membantu penulis untuk memperoleh data-data yang tidak diketahui dan belum diperoleh oleh penulis dari responden. Disamping itu informan juga sebagai fasilitator yang menghubungkan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu kelurahan maupun Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) itu sendiri. Dan disini informan akan memberikan penjelasan atau gambaran tentang lembaga tersebut berdasarkan pengetahuan dari informan.

e. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap atas data yang diambil langsung selain dari responden, dengan cara mengumpulkan data-data yang didapatkan dari buku-buku, literatur, majalah, brosur, data kelurahan, maupun data dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

1.7.5 Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian terutama bila diinginkan generalisasi untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis menggambarkan keseluruhan tentang proses pemberdayaan kelembagaan komunitas lokal melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan pada definisi operasional yang akan dijabarkan pada pembahasan yaitu pada Bab V, yang diperoleh dari hasil data baik data primer maupun data sekunder. Disamping itu penulis dibantu dengan data kuantitatif yaitu berupa tabel-tabel untuk menghitung persentase. Kemudian dari keterangan angka-

angka yang diperoleh dari tabel tersebut, penulis jelaskan dengan kata-kata supaya mudah dipahami bagi orang yang membacanya.

Untuk mengetahui Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada ketiga BKM di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng maka penulis menentukan Skor Kelayakan Peran BKM dan Skor Tingkat Kinerja BKM. Apabila Skor Kelayakan Peran BKM diatas 51 berarti BKM di tiap-tiap kelurahan tersebut dianggap memenuhi ciri-ciri sebagai lembaga komunitas lokal yang bertumpu pada masyarakat (*community-based organization*) dan layak untuk menjalankan perannya. Apabila kurang dari 51 maka BKM dikatakan kurang atau belum layak sebagai lembaga komunitas lokal yang bertumpu pada masyarakat dan belum dapat menjalankan perannya. Dengan demikian untuk menghitung tentang skor kelayakan peran BKM pada tiap-tiap kelurahan di Kecamatan Gadingrejo menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$\text{Skor Kelayakan Peran BKM} = \frac{\text{Jumlah Skor Total Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Cara menghitung :

Jumlah skor total responden

- a. hasil penilaian dari derajat pencapaian kinerja setiap responden terhadap 17 aspek kinerja dijumlahkan, kemudian
- b. hasil penjumlahan pada point (a) di atas selanjutnya ditotalkan kembali untuk seluruh kuesioner yang dikembalikan oleh responden (Pramono, 2001:9).

Kemudian setelah diketahui Skor Kelayakan Peran BKM, maka dilanjutkan dengan perhitungan Skor Tingkat Kinerja BKM. Pada perhitungan ini, tingkat kinerja

dilihat dari skor rata-rata per aspek yaitu membagi skor agregat kelayakan peran di atas dengan jumlah aspek kinerja yaitu sebanyak 17.

Rumus :

$$\text{Skor Tingkat Kinerja BKM} = \frac{\text{Skor Kelayakan Peran BKM}}{17 \text{ (aspek)}}$$

Dengan besaran skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 5, maka norma kelayakan sesuai dengan derajat pencapaian kinerja 1-5 tersebut disusun dengan *range* sebagai berikut :

- (a) tingkat kinerja buruk sekali : skor pencapaian kinerja antara 1,00 hingga 1,80
- (b) tingkat kinerja buruk : skor pencapaian kinerja antara 1,81 hingga 2,60
- (c) tingkat kinerja cukup : skor pencapaian kinerja antara 2,61 hingga 3,40
- (d) tingkat kinerja baik : skor pencapaian kinerja antara 3,41 hingga 4,20
- (e) tingkat kinerja baik sekali : skor pencapaian kinerja antara 4,21 hingga 5,00

Untuk itu setelah skor tingkat kinerja BKM diketahui maka dapat dilihat bahwa BKM kelurahan mana yang sudah menunjukkan tingkat kelayakan. Apabila tingkat kelayakan sudah menyatakan baik maka BKM tersebut sudah berhasil dalam mewujudkan pemberdayaan di lembaganya (Pramono, 2001:10).

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab II ini akan memberikan kejelasan dan uraian tentang gambaran daerah penelitian yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan. Data-data diperoleh dari hasil observasi dan catatan lain dari kantor Kecamatan Gadingrejo baik yang berupa monografi, profil desa atau kelurahan maupun buku BPS (Biro Pusat Statistik) Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

2.1 Keadaan Geografis dan Letak Wilayah

Kecamatan Gadingrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan dengan luas 10,46 km² terletak antara 112^o.45' - 112^o.55' Bujur Timur dan 7^o.35' - 7^o.45' Lintang Selatan. Kecamatan Gadingrejo terbagi dalam 11 desa atau kelurahan, antara lain Gadingrejo, Tamba'an, Trajeng, Karanganyar, Karangketug, Gentong, Sebani, Petahunan, Bukir, Randusari dan Krapyakrejo. Desa Karangketug merupakan daerah yang paling luas wilayahnya yaitu 1,88 km² atau 17,99% dari luas Kecamatan Gadingrejo dan Desa Randusari dengan luas 0,34 km² atau 3,21% merupakan daerah yang terkecil.

Tinggi dari permukaan air laut rata-rata pada masing-masing desa atau kelurahan 4 m, sedang daerah yang paling rendah dengan ketinggian 2 m di atas permukaan air laut adalah Kelurahan Tamba'an, yang mana kelurahan ini berbatasan langsung dengan laut. Begitu juga dengan Kelurahan Gadingrejo dengan ketinggian 3 m di atas permukaan air laut juga merupakan daerah pantai yang berbatasan dengan selat Madura di wilayah bagian utara. Disebelah barat wilayah Kecamatan Gadingrejo membentang Sungai Welang yang merupakan batas dari wilayah Kecamatan Gadingrejo dengan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan Sungai Welang ini juga merupakan batas wilayah antara Kotamadya Pasuruan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan.

Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Gadingrejo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur : Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Kecamatan Gadingrejo letaknya sangat strategis. Karena wilayah tersebut sebagai jalur bus dari arah barat-timur maupun dari arah timur-barat, yaitu sebagai jalan besar ke Surabaya maupun dari Surabaya ke daerah Timur seperti ke Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember maupun ke daerah timur lainnya.

Kecamatan Gadingrejo yang memiliki luas wilayah sekitar 1.046,498 ha. Dimana sebagian besar wilayah yang ada digunakan untuk lahan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. Penggunaan Tanah Pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo

No.	Desa / Kelurahan	Penggunaan Tanah				Frekuensi (ha)	Prosentase (%)
		Lahan Sawah	Ladang/ Tegalan	Perumahan/ Pemukiman	Lain-lain		
1	Gadingrejo	67,173	21,020	32,422	12,399	133,014	12,71
2	Tamba'an	-	2,469	20,851	12,465	35,785	3,42
3	Trajeng	-	4,663	96,466	12,358	113,487	10,84
4	Karanganyar	18,790	-	32,512	4,931	56,233	5,37
5	Karangketug	79,790	-	77,670	30,743	188,203	17,99
6	Gentong	24,400	-	42,325	2,991	69,716	6,66
7	Sebani	49,647	-	21,244	8,213	79,104	7,56
8	Petahunan	62,190	2,301	20,107	12,621	97,219	9,29
9	Bukir	35,239	-	29,297	1,278	65,814	6,29
10	Randusari	10,782	0,084	18,596	4,151	33,613	3,21
11	Krapyakrejo	128,936	4,115	36,697	4,562	174,310	16,66
	Jumlah	476,947	34,652	428,187	106,712	1046,498	100,00

Sumber data : BPS Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan tanah di wilayah Kecamatan Gadingrejo sebagian besar berupa lahan sawah yaitu seluas 476,947 hektar. Untuk areal perumahan atau pemukiman juga sangat banyak dan menyebar yakni seluas 428,187 hektar baik yang dimanfaatkan atau ditempati oleh penduduk asli maupun pendatang baru yang ingin menetap di wilayah tersebut. Sedangkan ladang atau tegalan seluas 34,652 hektar dari luas tanah yang ada. Dan untuk lain-lain seperti sekolah, pasar, tempat ibadah, kuburan atau makam dan sebagainya mempunyai luas 106,712 hektar.

Selain itu terlihat bahwa tanah yang terluas di Kecamatan Gadingrejo adalah Kelurahan Karangketug yaitu seluas 188,203 hektar atau 17,99%, dimana untuk lahan sawah seluas 79,79 hektar, perumahan atau pemukiman seluas 77,670 hektar. Sedangkan untuk lain-lain sebanyak 30,743 hektar. Untuk kelurahan Krapyakrejo

menduduki urutan kedua yaitu seluas 174,31 hektar (16,66%), dimana untuk lahan sawah sebesar 128,936 hektar, perumahan atau pemukiman seluas 36,697 hektar, untuk ladang atau tegalan seluas 4,115 hektar, dan untuk lain-lain 4,562 hektar. Sedangkan tanah yang paling sedikit luasnya adalah Kelurahan Randusari yaitu hanya 33,613 hektar (3,21%) yang meliputi lahan perumahan atau pemukiman seluas 18,596 hektar, lahan sawah sebesar 10,782 hektar, ladang atau tegalan sebanyak 0,084 hektar dan untuk lain-lain 4,151 hektar.

Karena di Kecamatan Gadingrejo penggunaan tanah yang paling banyak digunakan adalah untuk lahan sawah. Berarti bahwa yang kerja di pertanian juga banyak, sehingga masyarakat akan terserap menjadi tenaga kerja (petani). Dengan adanya lapangan pekerjaan di bidang pertanian dapat mengurangi pengangguran. Kecamatan Gadingrejo tergolong daerah agraris, dengan kesuburan dan kekayaan alam dari hasil pertanian dapat menambah sumber pendapatan bagi daerah atau wilayah tersebut sehingga kesejahteraan hidup akan tercapai.

2.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data monografi Kecamatan Gadingrejo pada tahun 2000 jumlah penduduk Kecamatan Gadingrejo sebanyak 54155 jiwa dari seluruh desa/kelurahan di kecamatan tersebut, dengan jumlah kepala keluarga 12077 KK. Sedangkan pembagian jumlah penduduk pada setiap desa/kelurahan terperinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Jumlah Penduduk di Seluruh Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1.	Gadingrejo	8394	15,50
2.	Tamba'an	3275	6,05
3.	Trajeng	7528	13,90
4.	Karanganyar	9528	17,60
5.	Karangketug	5380	9,94
6.	Gentong	3928	7,25
7.	Sebani	2926	5,40
8.	Petahunan	3466	6,40
9.	Bukir	3580	6,61
10.	Randusari	2315	4,27
11.	Krapyakrejo	3835	7,08
Jumlah		54155	100,00

Sumber data : Monografi Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbesar ialah pada Kelurahan Karanganyar sebanyak 9528 jiwa atau 17,60%. Urutan kedua dari jumlah penduduk yang berjumlah banyak pada Kelurahan Gadingrejo yaitu berjumlah 8394 jiwa (15,50%). Sedangkan urutan ketiga pada Kelurahan Trajeng sebanyak 7528 jiwa atau 13,90%. Dari ketiga kelurahan berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan dengan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gadingrejo dibanding kelurahan lainnya, maka P2KP memilih ketiga kelurahan tersebut sebagai sasaran penerima dana P2KP.

Disamping itu dengan jumlah penduduk yang terlalu banyak, peluang jumlah angka kemiskinan atau kondisi rumah tangga yang miskin juga semakin besar. Karena dengan semakin banyak jumlah penduduk tetapi jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan maka masyarakat akan semakin sedikit yang memperoleh

pekerjaan akhirnya mereka jatuh miskin. Sedangkan desa atau kelurahan lainnya dianggap sudah berada pada tingkat sejahtera. Artinya jumlah penduduknya meskipun sedikit tetapi mayoritas kondisi sosial ekonominya sudah mapan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya.

Sedangkan dari seluruh jumlah penduduk pada Kecamatan Gadingrejo yang berjumlah 54155 jiwa terbagi dalam 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Gadingrejo	4085	4309	8394	15,50
2	Tamba'an	1615	1660	3275	6,05
3	Trajeng	3406	4122	7528	13,90
4	Karanganyar	4551	4977	9528	17,60
5	Karangketung	2669	2711	5380	9,94
6	Gentong	1929	1999	3928	7,25
7	Sebani	1515	1411	2926	5,40
8	Petahunan	1767	1699	3466	6,40
9	Bukir	1824	1756	3580	6,61
10	Randusari	1137	1178	2315	4,27
11	Krapyakrejo	1924	1911	3835	7,08
Jumlah		26422	27733	54155	100,00

Sumber data : Profil Desa/ Kelurahan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 27733 jiwa. Sedangkan laki-laki berjumlah 26422 jiwa. Hal ini berarti angka kelahiran dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan relatif tinggi. Sedangkan jumlah penduduk terbesar diduduki oleh kelurahan Karanganyar yaitu berjumlah 9528 jiwa atau 17,60%. Untuk kelurahan

Gadingrejo menempati urutan kedua sebesar 8394 jiwa atau 15,50%. Dan untuk Kelurahan Trajeng berjumlah 7528 jiwa atau 13,90%. Maka dari itu alasan P2KP memilih ketiga lokasi untuk menerima bantuan sebagai wilayah sasaran, karena ketiga kelurahan tersebut penduduknya paling banyak dibanding kelurahan lainnya. Yang mana ketiga kelurahan tersebut penduduknya didominasi oleh kaum perempuan. Selain itu kelurahan yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu kelurahan Randusari sebanyak 2315 jiwa atau 4,27%.

Sedangkan komposisi penduduk di Kecamatan Gadingrejo menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (lihat pada tabel 6) :



Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Tiap-Tiap Desa / Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

No	Desa / Kelurahan	Golongan Umur														Frekuensi (jawa)	Prosentase (%)
		<12th	13th-14th	5th-6th	7th-12th	13th-15th	16th-18th	19th-23th	26th-35th	36th-45th	46th-50th	51th-60th	61th-75th	>75th			
1	Gadingrejo	129	544	492	572	661	720	976	937	921	923	875	524	120	8394	15,50	
2	Tambakan	101	184	219	225	237	255	455	308	320	325	327	213	106	3275	6,05	
3	Tiqung	169	713	623	421	408	433	2082	1672	286	134	292	177	118	7528	13,90	
4	Karanganyar	174	672	301	1581	562	503	917	973	971	1193	873	573	235	9528	17,60	
5	Karangketeg	78	363	233	736	352	304	629	635	618	600	601	143	88	5380	9,94	
6	Gentong	82	261	165	507	239	263	390	460	381	510	512	100	58	3928	7,25	
7	Sebari	56	226	275	374	278	301	311	302	251	188	167	106	91	2926	5,40	
8	Petahunan	73	255	185	511	215	166	749	335	384	313	117	90	73	3466	6,40	
9	Butir	71	279	166	440	231	214	917	482	267	221	131	87	74	3580	6,61	
10	Randean	33	169	100	337	162	80	293	291	286	279	148	105	32	2315	4,27	
11	Krapyakrejo	58	296	144	484	213	232	463	458	447	438	433	116	53	3635	7,08	
	Jumlah	1024	3962	2903	6188	3558	3471	8182	6853	5132	5124	4476	2234	1048	54155	100,00	

Sumber data : Monografi Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk yang paling banyak jumlahnya yang ada di Kecamatan Gadingrejo adalah berumur antara 19tahun - 25tahun sebanyak 8182 orang. Berarti mayoritas penduduknya dalam usia awal produktif. Sedangkan yang berumur 26tahun - 35tahun sejumlah 6853 orang. Pada usia tersebut, penduduk sudah banyak yang berkeluarga dan sekaligus mereka dituntut supaya dapat mandiri, bekerja agar kehidupannya maupun seluruh anggota keluarganya layak dimana semua kebutuhan hidup terpenuhi.

Untuk jumlah penduduk yang sedikit jumlahnya yaitu penduduk yang berumur 0 - 12 bulan yaitu sebanyak 1024 orang. Hal ini menandakan bahwa KB saat ini cukup berhasil. Artinya jumlah kelahiran relatif berkurang. Karena dengan banyak anak maka kebutuhan pun akan juga bertambah banyak. Padahal lapangan pekerjaan semakin sempit sehingga sulit untuk memperoleh penghasilan yang banyak. Disamping itu penduduk yang berumur 75 tahun ke atas juga sedikit. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang hidup dan tinggal di wilayah Kecamatan Gadingrejo merupakan usia kerja. Yang mana tenaga, tubuh mereka masih kuat dan mampu untuk melakukan suatu pekerjaan yang berat.

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk yang berada di Kecamatan Gadingrejo serta dapat diketahui jenis pekerjaan yang paling dominan jumlahnya. Secara rinci penulis sajikan semua jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk dalam tabel di bawah ini (lihat pada tabel 7) .

Tabel 7
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian di Tiap-tiap Desa / Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

No.	Desa/ Kelurahan	Jenis Pekerjaan								Frekuensi (jiwa)	Prosentase (%)
		Pegawai Swasta	Wiraswasta	Buruh	PNS / ABRI	Tukang	Pelam	Lain-lain	Pensiunan		
1	Gadingrejo	1437	761	1370	957	108	109	5	128	4875	15,73
2	Tambutan	13	1561	247	49	13	-	134	8	2025	6,54
3	Trajang	2139	324	307	221	88	-	9	24	3112	10,04
4	Karanganyar	3018	590	270	713	110	48	7	125	4881	15,75
5	Karangketug	1156	495	283	766	172	72	3	52	2999	9,68
6	Gentong	1642	117	265	959	40	95	12	25	3155	10,18
7	Sebani	24	193	1098	230	32	95	300	23	1995	6,44
8	Petahunan	84	1940	318	152	27	225	2	13	2761	8,91
9	Bukir	40	1429	1429	143	18	112	-	27	3198	10,32
10	Randusari	42	197	278	109	127	17	2	18	790	2,55
11	Krayakrejo	38	24	70	112	700	230	4	17	1195	3,86
	Jumlah	9633	7631	5935	4411	1435	1003	478	460	30986	100,00

Sumber data : Monografi Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Gadingrejo bekerja sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 9633 orang dari 30986 jumlah penduduk yang bekerja. Ini berarti bahwa pekerjaan yang berstatus negeri semakin sempit bahkan persaingan bertambah ketat. Alasan mereka banyak yang memilih bekerja di swasta, karena tidak terpancang oleh waktu dan tidak memerlukan lulusan sekolah yang tinggi seperti Perguruan Tinggi atau yang sederajatnya. Disamping itu bekerja di swasta siapa boleh masuk, asalkan memenuhi syarat dan jam kerja tidak seketat seperti kerja di negeri, pagi-pagi harus sudah datang dan pulang sesuai dengan jadwal pulang. Sedangkan di swasta, jam kerja tetap harus diperhatikan tetapi sifatnya agak bebas. Yang terpenting pekerjaan selesai dan tetap patuh pada setiap peraturan yang ada. Selain itu di swasta penerimaan gaji tinggi bahkan kalau ada lemburan maka penghasilan akan meningkat. Dengan penghasilan yang tinggi maka tingkat kesejahteraan hidup akan tercapai.

Disamping itu juga banyak penduduk yang bekerja wiraswasta yaitu berjumlah 7631 orang. Maka dari itu P2KP memilih Kecamatan Gadingrejo sebagai lokasi sasaran untuk menerima bantuan dana yang sifatnya kredit. Karena sudah jelas berwiraswasta, pasti membuka usaha. Melihat jumlah penduduk yang bermata pencaharian tersebut, maka juga akan banyak individu atau kelompok usaha yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan prioritas yang diutamakan P2KP yang sifatnya kredit adalah diberikan kepada mereka untuk usaha bukan untuk keperluan atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan dari 30986 orang yang bekerja, jumlah yang paling sedikit adalah mereka yang sudah pensiunan. Biasanya seseorang dikatakan pensiun, pasti dulunya bekerja sebagai PNS/ABRI maupun pegawai swasta yaitu berjumlah 460 orang. Seseorang yang tergolong pensiun belum tentu dirinya atau kondisinya tidak bisa sepenuhnya bekerja lagi. Tetapi ada sebagian mereka yang masih kuat bekerja, karena umurnya sudah mencapai batas ketentuan harus pensiun. Ada juga yang umurnya belum waktunya pensiun, tetapi kondisi tubuhnya sudah tidak kuat lagi maka ia harus mengajukan pensiun. Pensiun di tingkat PNS/ABRI, seumur hidup masih mendapat gaji tetapi dipotong berapa persen dari gaji semula.

Sedangkan kalau bekerja sebagai pegawai swasta biasanya diberikan pada akhir mereka akan keluar atau berhenti bekerja.

Sedangkan jumlah penduduk yang banyak bekerja adalah pada Kelurahan Karanganyar yaitu sebanyak 4881 orang (15,75%). Berarti kelurahan ini konsekuen. Karena jumlah penduduk yang terbanyak juga berada di kelurahan ini. Dan jenis pekerjaan penduduknya terbesar bekerja sebagai pegawai swasta yaitu berjumlah 3018 orang. Untuk Kelurahan Gadingrejo yang bekerja sebanyak 4875 orang atau 15,73%. Sama juga jumlah penduduk kebanyakan bekerja sebagai pegawai swasta yang berjumlah 1437 orang. Sedangkan Kelurahan Trajeng yang bekerja sebanyak 3112 orang (10,04%) dan yang terbanyak bekerja di pegawai swasta yaitu 2139 orang. Meskipun Kelurahan Bukir yang bekerja juga banyak yang berjumlah 3198 orang (10,32%). Namun dari data tersebut bahwa kelurahan Trajeng menduduki urutan kedua penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta. Maka dari itu P2KP memilih kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng sebagai daerah sasaran. Karena jumlah penduduk mereka banyak, disamping itu mayoritas penduduknya bekerja non negeri atau swasta, sehingga modal banyak dibutuhkan oleh mereka untuk usaha demi menghidupi dirinya maupun keluarganya.

Oleh sebab itu untuk mengetahui kondisi dan keberadaan sebenarnya dari penduduk yang ada di Kecamatan Gadingrejo, maka disini penulis menyajikan tentang tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan tiap-tiap kepala keluarga yang ada di wilayah tersebut. Suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera atau tidak, tergantung pada masing-masing individu dalam mengerahkan segala kemauan dan kemampuan yang dimiliki dalam mencapai tujuan hidup yaitu terpenuhinya semua kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini (lihat pada tabel 8) :

Tabel 8

Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Tiap-tiap Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

Desa / Kelurahan	Tingkat Kesejahteraan								Frekuensi (jumlah KK)	Prosentase (%)
	Keluarga Pra-sejahtera alasan ekonomi	Keluarga Pra-sejahtera alasan non-ekonomi	Keluarga sejahtera I alasan ekonomi	Keluarga sejahtera I alasan non-ekonomi	Keluarga sejahtera II alasan ekonomi	Keluarga sejahtera II alasan non-ekonomi	Keluarga sejahtera III	Keluarga plus		
Gadingrejo	52	183	48	277	205	242	869	77	1953	16,17
Tambajim	98	76	154	138	160	-	103	15	744	6,16
Trujeng	37	126	43	488	148	295	643	8	1788	14,80
Karanganyar	118	24	187	225	280	315	169	27	1345	11,14
Karangkecung	51	37	33	207	150	164	640	55	1337	11,07
Gentong	4	3	13	122	211	-	541	49	943	7,81
Seban	4	7	4	127	-	202	277	55	676	5,60
Pedulutan	45	42	33	106	164	-	494	33	917	7,60
Bukir	23	21	16	218	15	20	507	40	860	7,12
Randusan	27	-	50	197	128	-	140	26	568	4,70
Krapyakrejo	7	45	-	140	-	12	732	10	946	7,83
Jumlah	466	564	581	2243	1461	1250	5115	395	12077	100,00

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Gadingrejo sudah berada pada kondisi yang cukup. Sebab penduduknya sudah termasuk dalam golongan keluarga sejahtera III yaitu berjumlah 5115 kepala keluarga. Berarti tiap-tiap kepala keluarga pada saat ini mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Suatu rumah tangga apabila berada pada golongan tersebut sudah dianggap sebagai keluarga yang mapan baik lahir maupun batin. Tetapi ada sebagian penduduk yang ada di wilayah tersebut juga masih berada pada golongan keluarga sejahtera I alasan non-ekonomi sebanyak 2245 orang. Karena kondisi suatu keluarga tersebut bukan dipengaruhi atau disebabkan oleh masalah ekonomi. Namun ada faktor lain, misalkan keadaan di sekitar atau lingkungannya kurang mendukung baik sarana dan prasarana tidak memadai sehingga menghambat tujuan dari kegiatan mereka maupun sifat malas yang dimiliki untuk bekerja, sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan untuk modal membuka usaha. Akibat kemalasan dalam berusaha akhirnya kualitas sumber daya manusianya menjadi rendah.

Untuk Kelurahan Gadingrejo dengan jumlah kepala keluarga yang berjumlah 1953 KK (16,17%). Kondisi anggota masyarakatnya banyak yang tergolong keluarga sejahtera III yaitu sejumlah 869 kepala keluarga. Sedangkan 48 KK termasuk keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Berdasarkan data tersebut bahwa Kelurahan Gadingrejo termasuk daerah yang tingkat kesejahteraannya tinggi. Sedangkan untuk Kelurahan Trajeng dengan kepala keluarga sebanyak 1788 KK (14,80%) yang termasuk dalam keluarga sejahtera III berjumlah 643 KK, dan 488 KK tergolong keluarga sejahtera I alasan non ekonomi. Dan untuk Kelurahan Karanganyar dengan kepala keluarga sejumlah 1345 KK (11,14%), 315 KK termasuk keluarga sejahtera II alasan non-ekonomi. Dan 280 KK tergolong keluarga sejahtera II alasan ekonomi.

Dengan kenyataan tersebut maka P2KP memilih Kecamatan Gadingrejo terutama pada Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng dengan jumlah penduduk yang banyak sebagai wilayah sasaran untuk menyalurkan dana bantuan agar penduduk berubah keadaan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri meskipun wilayah tersebut dinilai sudah tergolong maju, tetapi dalam hidup bermasyarakat itu tidak

lepas pada suatu keanekaragaman dari pola kehidupan anggota masyarakatnya yaitu ada yang kaya dan ada yang miskin. Tetapi kedua kondisi tersebut saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan hidup.

2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Pekerjaan yang dimiliki oleh setiap penduduk tergantung juga pada tingkat pendidikan yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan didukung dengan mempunyai ketrampilan, kemauan tinggi serta kepandaian maka pekerjaan akan mudah atau datang dengan sendirinya. Disamping itu usaha mereka baik material maupun spiritual juga benar-benar ditujukan pada pekerjaan. Dalam tabel di bawah ini akan diketahui keadaan dan kondisi tingkat pendidikan penduduk yang ada di Kecamatan Gadingrejo atau seberapa besar jumlah mereka yang tamat atau sudah menyelesaikan pendidikan dijenjang sekolahnya adalah sebagai berikut (lihat pada tabel 9) :

Tabel 9

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo

No	Desa / Kelurahan	Tingkat Pendidikan										Frekuensi (jwa)	Prosentase (%)
		Tamat SD/ Sederajat	Tamat SL/TP/ Sederajat	Tamat SL/TA/ Sederajat	Tamat Akademik/ Sederajat	Tamat Universitas/ Sederajat	SD/Sederajat Tidak Tamat	Tidak Berpendidikan	Belum Sekolah				
1	Gadingrejo	1087	1064	2046	89	43	287	3105	673	8394	15,50		
2	Tambahan	525	864	186	5	24	-	1386	285	3275	6,05		
3	Trajeng	1766	1883	1574	94	88	173	1068	882	7528	13,90		
4	Karanganyar	3990	1902	2.184	99	100	50	147	846	9528	17,60		
5	Karangketug	1706	1737	1109	51	93	53	190	441	5380	9,94		
6	Gentong	434	1827	996	12	72	58	186	343	3928	7,25		
7	Seban	347	632	660	-	29	272	754	232	2926	5,40		
8	Petahunan	800	903	692	-	45	672	26	328	3466	6,40		
9	Bukar	1146	890	1120	9	59	2	4	350	3580	6,61		
10	Randusari	1126	495	406	26	15	21	22	202	2315	4,27		
11	Krapyakrejo	852	1120	1325	24	94	54	12	354	3835	7,08		
	Jumlah	13689	13317	12598	409	662	1644	6900	4936	54155	100,00		

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Pada Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang ada di Kecamatan Gadingrejo sebagian besar tamatan SD/ sederajat yaitu sejumlah 13689 orang. Mereka menganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting, tetapi yang paling diutamakan adalah kemauan untuk kerja masih ada. Maka dari itu mereka banyak yang terjun di dunia kerja yang berstatus swasta. Karena tidak memerlukan ijazah sarjana atau pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga banyak penduduk yang menamatkan ditingkat SLTP/ sederajat yaitu sebanyak 13317 orang. Sedangkan yang lulusan akademi/ sederajat hanya sedikit jumlahnya sekitar 409 orang. Hal ini sangat memprihatinkan. Padahal saat ini apabila seseorang tidak melanjutkan sekolah, misalkan karena faktor biaya, maka sebaiknya mereka dapat memilih sekolah akademi. Sebab sifatnya ikatan dinas, mendapat beasiswa dan pasti lulusannya dijamin dapat bekerja semua. Memang pendidikan di akademi berat, tetapi seimbang dengan imbalannya yaitu adanya jaminan kerja untuk bekal masa depan.

Kelurahan Karanganyar dengan jumlah penduduk 9528 orang (17,60%), yang tamatan SD/ sederajat paling banyak yaitu 3900 orang, sedangkan yang tamatan SLTA/ sederajat sebanyak 2484 orang. Dan untuk Kelurahan Gadingrejo dengan jumlah penduduk 8394 orang (15,50%), penduduk banyak yang tidak berpendidikan yaitu sebanyak 3105 orang. Sedangkan yang tamatan SLTA/ sederajat berjumlah 2046 orang. Begitu juga untuk Kelurahan Trajeng, penduduk banyak yang tamatan SLTP/ sederajat yaitu berjumlah 1883 orang, untuk yang tamat SD/ sederajat sejumlah 1766 orang dari 7528 orang (13,90%) atau seluruh penduduk yang ada di Kecamatan Trajeng. Maka dapat disimpulkan bahwa kelurahan yang menjadi sasaran P2KP mayoritas penduduknya berpendidikan cukup tinggi.

2.5 Sarana dan Prasarana

2.5.1 Prasarana Pendidikan Formal (Sekolah)

Untuk lebih memudahkan dalam suatu kegiatan harus ada suatu sarana dan prasarana yaitu tempat untuk melakukan aktivitas dalam rangka mencapai suatu

tujuan bersama. Maka dalam hal ini sarana sekolah merupakan sesuatu yang paling penting. Karena untuk keberhasilan dan kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Apabila dalam memberikan suatu materi atau pelajaran jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maka seorang siswa akan cepat dan mudah menerima pada materi atau pelajarannya. Oleh sebab itu untuk menunjang kegiatan belajar bagi anak didik maka di Kecamatan Gadingrejo menyediakan sarana atau tempat sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SLTA. Secara terperinci dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 10. Jumlah Prasarana Pendidikan Formal (Sekolah) Di Tiap-tiap Desa/Kelurahan Pada Kecamatan Gadingrejo

No.	Desa/Kelurahan	Prasarana Pendidikan Formal				Frekuensi (buah)	Prosentase (%)
		TK	SD	SLTP	SLTA		
1	Gadingrejo	2	7	1	-	10	14,71
2	Tamba'an	-	1	-	-	1	1,47
3	Trajeng	3	5	-	-	8	11,77
4	Karanganyar	4	6	2	3	15	22,06
5	Karangketug	3	4	-	-	7	10,3
6	Gentong	2	2	-	-	4	5,88
7	Sebani	1	2	1	1	5	7,35
8	Petahunan	1	3	-	-	4	5,88
9	Bukir	1	4	-	-	5	7,35
10	Randusari	1	2	1	-	4	5,88
11	Krapyakrejo	1	3	1	-	5	7,35
Jumlah		19	39	6	4	68	100,00

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah paling banyak yang mempunyai sarana dan prasarana maupun pemberian fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar adalah SD yaitu sebanyak 39 buah. Berarti mengandung maksud bahwa jumlah SD yang banyak itu maka saingan untuk masuk ke sekolah tersebut tidak

begitu ketat. Karena apabila seorang siswa tidak masuk atau tidak diterima di SD yang satu bisa mencari SD yang lainnya. Berbeda dengan jumlah SLTA yang begitu sedikit yaitu hanya berjumlah 4 buah. Hal ini menandakan, untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi seperti SLTA akan semakin sulit. Jadi apabila seseorang tidak benar-benar pandai, maka ia tidak akan masuk SLTA negeri. Sebab jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu siapa saja yang akan masuk ke SLTA tersebut harus disaring, baik yang memiliki kepandaian maupun prestasi yang pernah diraihinya.

Kelurahan Karanganyar mempunyai prasarana pendidikan formal (sekolah) yang paling banyak yaitu berjumlah 15 buah (22,06%) yang terdiri dari 6 buah SD, 4 buah TK, 3 buah SLTA dan 2 buah SLTP. Di kelurahan ini paling banyak dan lengkap jumlah sekolahnya dibanding kelurahan lainnya. Untuk kelurahan Gadingrejo, jumlah prasarana pendidikan formal sebanyak 10 buah (14,71%) yaitu 7 buah SD, 2 buah TK dan 1 buah SLTP, sedangkan prasarana ditingkat SLTA tidak ada. Maka penduduk yang lulus dari SLTP bisa melanjutkan ke SLTA yang ada pada Kelurahan Karanganyar maupun Kelurahan Seban. Dan untuk Kelurahan Trajeng jumlah prasarana pendidikan formal ada 8 buah atau 11,77% antara lain 5 buah SD dan 3 buah TK.

2.5.2 Prasarana Ibadah

Selain sarana sekolah maka di suatu wilayah juga terdapat sarana untuk tempat ibadah. Dimana tempat ibadah tersebut sangat penting dan merupakan hal yang sangat vital serta dibutuhkan bagi mereka yang beragama. Meskipun kita bermacam-macam agama, namun kita harus tetap menjaga agama masing-masing dan menghormati agama lain. Sarana ibadah memang perlu untuk kelangsungan kegiatan beribadah atau berdo'a dari seorang hamba kepada sang pencipta. Maka dari itu dengan beranekaragam agama maka disediakan sendiri-sendiri tempat ibadah menurut agama yang dianut. Untuk lebih jelasnya, penulis rinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11. Jumlah Prasarana atau Tempat Ibadah Menurut Agama Yang Dianut Oleh Masing-masing Penduduk Pada Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Gadingrejo

No.	Desa/Kelurahan	Tempat Ibadah				Frekuensi (buah)	Prosentase (%)
		Masjid	Langgar/Surau	Gereja	Wihara		
1	Gadingrejo	2	28	-	-	30	13,51
2	Tamba'an	1	9	-	-	10	4,50
3	Trajeng	2	16	1	1	20	7,01
4	Karanganyar	2	25	1	-	28	12,61
5	Karangketug	3	23	-	-	26	11,72
6	Gentong	2	13	-	-	15	6,76
7	Sebani	2	14	-	-	16	7,21
8	Petahunan	1	16	-	-	17	7,66
9	Bukir	4	16	-	-	20	9,01
10	Randusari	1	9	-	-	10	4,50
11	Krapyakrejo	2	28	-	-	30	13,51
	Jumlah	22	197	2	1	222	100,00

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana ibadah yang paling banyak adalah langgar atau surau yaitu berjumlah 197 buah dan masjid sebanyak 22 buah dibanding jumlah tempat ibadah lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan dengan banyaknya jumlah ibadah baik langgar atau surau maupun masjid, menandakan bahwa mayoritas penduduk yang hidup dan tinggal di Kecamatan Gadingrejo adalah agama Islam. Meskipun jumlahnya banyak, tetapi kita semua tetap bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Dan diharapkan dengan banyaknya tempat ibadah untuk agama Islam maka pemeluk agama tersebut harus konsekuen yaitu lebih meningkatkan ibadahnya.

Kelurahan Gadingrejo dan Krapyakrejo yang mempunyai jumlah prasarana atau tempat ibadah terbanyak yaitu berjumlah 30 buah (13,51%), masing-masing 28 buah langgar atau surau dan 2 buah masjid. Dengan banyaknya tempat ibadah

khususnya untuk umat Islam, diharapkan terutama untuk masyarakat yang ada disekitarnya mempunyai kesadaran dan tergugah hatinya untuk menjalankan ibadahnya secara baik. Sedangkan untuk Kelurahan Karanganyar ada 28 buah (12,61%) prasarana atau tempat ibadah yang terdiri 25 buah langgar atau surau, 2 buah masjid dan 1 buah gereja. Berarti untuk agama Kristen yang tinggal di Kelurahan lain dapat menjalankan ibadahnya di Kelurahan Karanganyar maupun Kelurahan Trajeng. Sedangkan yang paling sedikit jumlah prasarana atau tempat ibadah adalah pada Kelurahan Tamba'an dan Kelurahan Randusari yaitu hanya 10 buah (4,50%), masing-masing 9 buah untuk langgar atau surau dan 1 buah masjid.

2.5.3 Prasarana Kesehatan

Prasarana kesehatan juga merupakan hal yang paling penting. Untuk mengetahui tingkat kesehatan penduduk dan sebagai tempat untuk memeriksakan diri apabila ada tanda-tanda pada tubuh seseorang yang kurang sehat supaya tidak terlambat sampai menjadi penyakit. Oleh sebab itu dengan adanya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Gadingrejo maka penduduk akan dekat apabila sewaktu-waktu dirinya jatuh sakit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini (lihat pada tabel 12) :

Tabel 12

Jumlah Prasarana Kesehatan Pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gadingrejo

No	Desa/ Kelurahan	Prasarana Kesehatan						Frekuensi (buah)	Prosentase (%)	
		Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Posyandu	Apotik			Dokter Praktek
1	Gadingrejo	1	-	2	1	10	-	1	15	15,31
2	Tambalan	-	-	1	-	-	-	-	1	1,02
3	Trajeng	-	1	-	1	12	-	1	15	15,31
4	Karanganyar	-	1	1	-	8	1	5	16	16,34
5	Karangketug	-	1	-	-	8	-	1	10	10,20
6	Gentong	-	1	-	-	4	-	2	7	7,14
7	Sebani	-	-	-	-	6	-	-	6	6,12
8	Petahunan	-	-	1	-	5	-	-	6	6,12
9	Bukit	-	-	1	-	8	-	1	10	10,20
10	Randusari	-	-	1	-	4	-	-	5	5,10
11	Krapyakrejo	-	-	-	-	7	-	-	7	7,14
	Jumlah	1	4	7	2	72	1	11	98	100,00

Sumber data : Monografi Kecamatan Gadingrejo tahun 2000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Posyandu yang paling banyak yaitu berjumlah 72 buah. Artinya jika dikaitkan dengan jumlah kelahiran bayi pada Kecamatan Gadingrejo saat ini berkurang atau menjadi sedikit, maka menandakan bahwa kegiatan yang dilakukan yaitu berupa penyuluhan oleh bidan setempat maupun PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari BKKBN) tentang KB telah berhasil. Di Posyandu para balita maupun ibu hamil diberikan makanan yang bergizi supaya pertumbuhan dan perkembangan bayi terus meningkat. Begitu juga pada ibu hamil agar tubuh si ibu kuat dan bayi yang ada dalam kandungannya akan lahir dengan sehat. Disamping itu di wilayah tersebut selain ada Posyandu, juga ada dokter praktek sebanyak 11 orang sehingga masyarakat yang sakit dapat datang ke dokter tersebut sesuai dengan jam prakteknya.

Misalkan pada malam hari, Puskesmas yang hanya berjumlah 4 buah tutup maka orang yang sakit tersebut bisa langsung konsultasi tentang penyakitnya ke dokter. Maka dari itu rasa sakit tersebut bisa segera diobati. Jadi tidak menunggu besok paginya sampai puskesmas buka. Boleh jadi dokter praktek tersebut merupakan dokter yang biasanya kerja di puskesmas. Apabila di puskesmas tutup atau hari libur maka dokter tersebut membuka praktek untuk membantu masyarakat yang tiba-tiba jatuh sakit dan berusaha segera diberi resep berupa obat agar cepat sembuh.

Di Kelurahan Karanganyar mempunyai prasarana kesehatan terbanyak yaitu berjumlah 16 buah (16,34%) yang meliputi 8 buah posyandu, dokter praktek sebanyak 5 orang, sedangkan untuk puskesmas, puskesmas pembantu dan apotik masing-masing 1 buah. Untuk Kelurahan Gadingrejo, jumlah prasarana kesehatan sebanyak 15 buah (15,31%) yang terdiri dari 10 buah posyandu, 2 buah puskesmas pembantu, rumah sakit bersalin dan poliklinik masing-masing 1 buah, untuk dokter praktek hanya 1 orang. Disamping itu untuk Kelurahan Trajeng sama yaitu memiliki 15 buah (15,31%) dari prasarana kesehatan yang ada meliputi 12 buah posyandu, puskesmas dan poliklinik masing-masing 1 buah untuk dokter praktek hanya 1 orang. Sedangkan yang paling sedikit jumlah prasarana kesehatan terletak di Kelurahan Tamba'an yaitu hanya 1 buah (1,02%) yang berupa puskesmas pembantu.

2.6 Lembaga-lembaga Informal

2.6.1 Lembaga Keagamaan

Sebagai umat yang beragama untuk menyalurkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan menurut agama masing-masing selain dapat dilakukan pada tempat-tempat ibadah maka dibutuhkan adanya lembaga keagamaan yang berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan dan mencruskan perjuangan dari semua agama. Disamping itu melalui lembaga keagamaan dapat meningkatkan solidaritas dan menambah rasa kekeluargaan antara sesama agama maupun antar agama. Pada lembaga keagamaan tidak memandang jenis kelamin untuk menjadi anggotanya baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua maupun muda semua mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan dari prasarana atau lembaga keagamaan yang ada. Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan pada tabel di bawah ini (lihat pada tabel 13) :

Tabel 13

Jumlah Lembaga Keagamaan Pada Tiap-tiap Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gadingrejo

No.	Desa/Kelurahan	Lembaga Keagamaan									Frekuensi (buah)	Prosentase (%)
		Yasinan	Manakiban	Dibatan	Remas	Rukun Kematan	Majelis Tahim	Tahli	Al-hidayah	Aisyah		
1	Gadingrejo	-	-	19	2	23	21	-	-	-	65	39,63
2	Tambalan	3	2	4	1	-	-	-	-	-	10	6,10
3	Trajeng	-	-	-	2	8	13	-	-	-	23	14,02
4	Karanganyar	6	-	12	-	-	-	-	-	-	18	10,98
5	Karangketug	-	0	1	1	-	-	-	-	-	2	1,22
6	Gremtong	-	-	1	-	1	-	1	-	3	6	3,66
7	Sebani	3	-	4	2	-	-	-	1	-	10	6,10
8	Perahaman	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	2,44
9	Bukir	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,60
10	Randusari	8	6	-	1	-	1	-	-	-	16	9,76
11	Krapyakrejo	-	-	7	2	-	-	-	-	-	9	5,49
	Jumlah	20	8	48	13	32	38	1	1	3	164	100,00

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Gadingrejo lembaga keagamaan yang paling menonjol adalah diba'an yaitu sebanyak 48 buah. Sedangkan majelis ta'lim berjumlah 38 buah. Dan yang paling sedikit jumlahnya adalah tahlil dan Al-hidayah yaitu hanya 1 buah saja. Lembaga keagamaan yang paling banyak jumlahnya berada pada Kelurahan Gadingrejo yang berjumlah 65 buah (39,63%) yang terdiri dari rukun kematian sebanyak 23 buah, majelis ta'lim 21 buah dan diba'an 19 buah. Untuk Kelurahan Trajeng sebanyak 23 buah (14,02%) meliputi majelis ta'lim sebanyak 13 buah, rukun kematian 8 buah dan lembaga remas 2 buah. Dan untuk Kelurahan Karanganyar berjumlah 18 buah (10,98%) yang meliputi diba'an 12 buah dan yasinan 6 buah. Sedangkan jumlah lembaga keagamaan yang paling sedikit jumlahnya adalah Kelurahan Bukir yaitu lembaga remas yang hanya berjumlah 1 buah (0,60 %).

2.6.2 Lembaga Kegotongroyongan

Disamping lembaga yang berfungsi untuk peningkatan agama, ada juga lembaga yang sifatnya gotong royong dalam rangka membuat fasilitas maupun sarana umum yang belum ada menjadi ada, dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk diberdayakan dan memperbaiki yang rusak menjadi lebih baik. Suatu pekerjaan apabila dilakukan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan gotong royong tidak ada unsur pamrih, semuanya bekerja semua. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini (lihat pada tabel 14) :

Tabel 14. Kondisi Lembaga Kegotong-royongan pada Masing-masing Desa/Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo

No	Desa / Kelurahan	Gotong-royong dalam		mengolah tanah		membangun fasilitas umum		Gotong-royong dalam	
		Ada/tidak	Aktif/tidak	Ada/tidak	Aktif/tidak	Ada/tidak	Aktif/tidak	Aktif/tidak	Aktif/tidak
1	Gadingrejo	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif
2	Tambahan	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif
3	Trajong	tidak	tidak	tidak	tidak	ada	tidak	ada	tidak
4	Karanganyar	ada	aktif	ada	aktif	ada	aktif	ada	aktif
5	Karangketug	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif
6	Gentong	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif
7	Sebani	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif
8	Petahunan	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif
9	Bukir	ada	tidak	tidak	tidak	tidak	aktif	ada	aktif
10	Randusari	ada	aktif	tidak	tidak	ada	tidak	ada	aktif
11	Krapyakrejo	ada	aktif	tidak	tidak	ada	aktif	ada	aktif

Sumber data : Profil Desa/Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo Tahun 2000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas lembaga kegotongroyongan yang ada pada Kecamatan Gadingrejo relatif ada dan cukup aktif. Kenyataannya pada gotong royong dalam membuat rumah, membangun maupun memperbaiki fasilitas umum. Sedangkan gotong royong dalam mengolah tanah banyak yang tidak ada. Meskipun lahan pertanian di Kecamatan Gadingrejo paling luas. Kemungkinan para pemilik sawah maupun petani dalam mengolah tanah diupahkan atau dipekerjakan pada orang lain ataupun buruh. Kelurahan yang aktif kegiatan gotong royongnya adalah Kelurahan Karanganyar baik gotong royong dalam membuat rumah, mengolah tanah, membangun maupun perbaikan fasilitas umum dibanding kelurahan lainnya.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

3.1 Latar Belakang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan

Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) memadukan beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program-program penanggulangan kemiskinan terdahulu, khususnya yang diselenggarakan di kawasan perkotaan, seperti KIP (*Kampung Improvement Programme*), VIP (*Village Improvement Project*), KIP MHT (Muhammad Husni Thamrin) III DKI dengan konsep Tribina, Peremajaan Kampung Kumuh dengan pendekatan CBD (*Community-Based Development*), dan P2BPK (Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok). Termasuk pula disini adalah pengalaman-pengalaman dalam penyelenggaraan program IDT (Inpres Desa Tertinggal), PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) dan P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal).

3.1.1 Tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Adapun tujuan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

3.1.2 Strategi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Sebagai dasar Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) adalah penguatan pemberdayaan kelembagaan komunitas sebagai basis pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dengan strategi dasar ini, sesudah program berakhir masyarakat diharapkan mampu melakukan :

1. Mendefinisikan secara tepat kebutuhan dasar mereka.
2. Merumuskan secara tepat masalah pokok yang mereka hadapi.
3. Menemukan cara yang tepat, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mereka.
4. Menemukan cara yang tepat, efektif dan efisien untuk memecahkan masalah pokok yang mereka hadapi.

Pada tahap awal, instrumen utama P2KP dalam menjalankan strategi dasarnya adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat miskin melalui kelembagaan komunitas yang memang benar-benar dapat dipercaya, pembentukan sepenuhnya melibatkan masyarakat, diawasi dan dikontrol langsung oleh masyarakat. Bantuan dana ini diberikan dalam bentuk pinjaman bergulir (untuk pengembangan modal kerja usaha produktif) dan hibah (untuk pembangunan prasarana dan sarana serta pelatihan).

Secara lebih terinci, P2KP dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut :

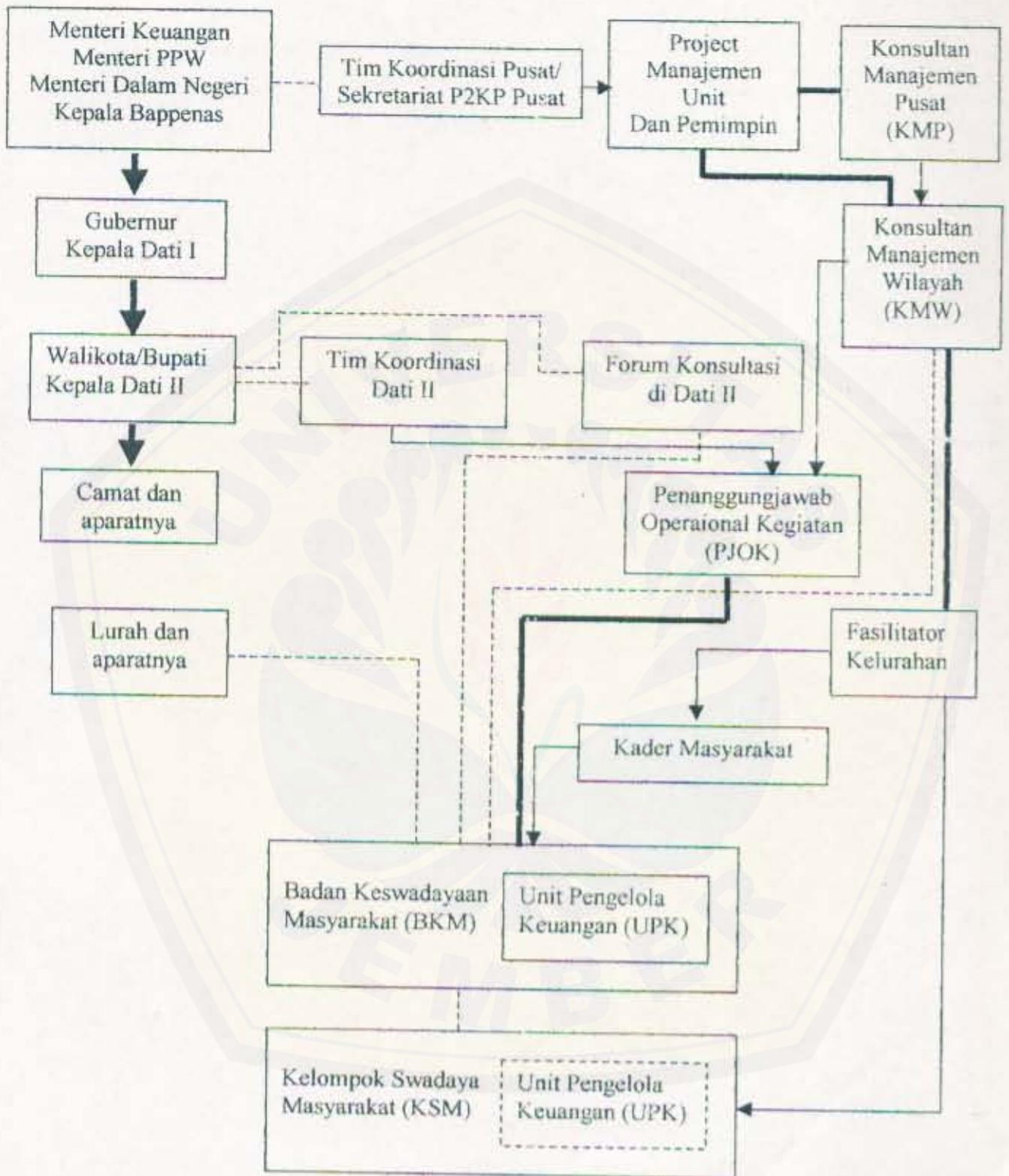
1. Penyelenggaraan konsep Tribina, yaitu : Bina Sosial, Bina Ekonomi dan Bina Lingkungan.
2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.

4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada KSM.

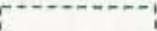
3.1.3 Struktur Organisasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Untuk membantu proses penyaluran dana P2KP agar langsung diterima oleh mereka yang berhak menerima yaitu KSM, maka dana yang berasal dari pusat supaya menetes ke bawah (bottom-up) dilewatkan melalui personal-personal maupun badan-badan yang bersangkutan. Dimana yang pada intinya merupakan satu kesatuan dari sistem dalam P2KP itu sendiri. Dengan adanya personil maupun badan yang terkoordinasi maka diharapkan bantuan yang berasal dari P2KP benar-benar dapat mengentaskan kemiskinan terutama di wilayah perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN P2KP



Keterangan

-  : Garis Hubungan Komando/Struktural
 : Garis Hubungan Koordinasi, Pelaksanaan, Pembinaan, Pendampingan.
 : Garis Hubungan Kontraktual
 : Garis Hubungan Kerja Administrasi
 : Unsur yang dianjurkan untuk ada atau dibentuk
 UPK *adalah* Bagian dari BKM, sedangkan TPK *adalah* Bagian dari KSM

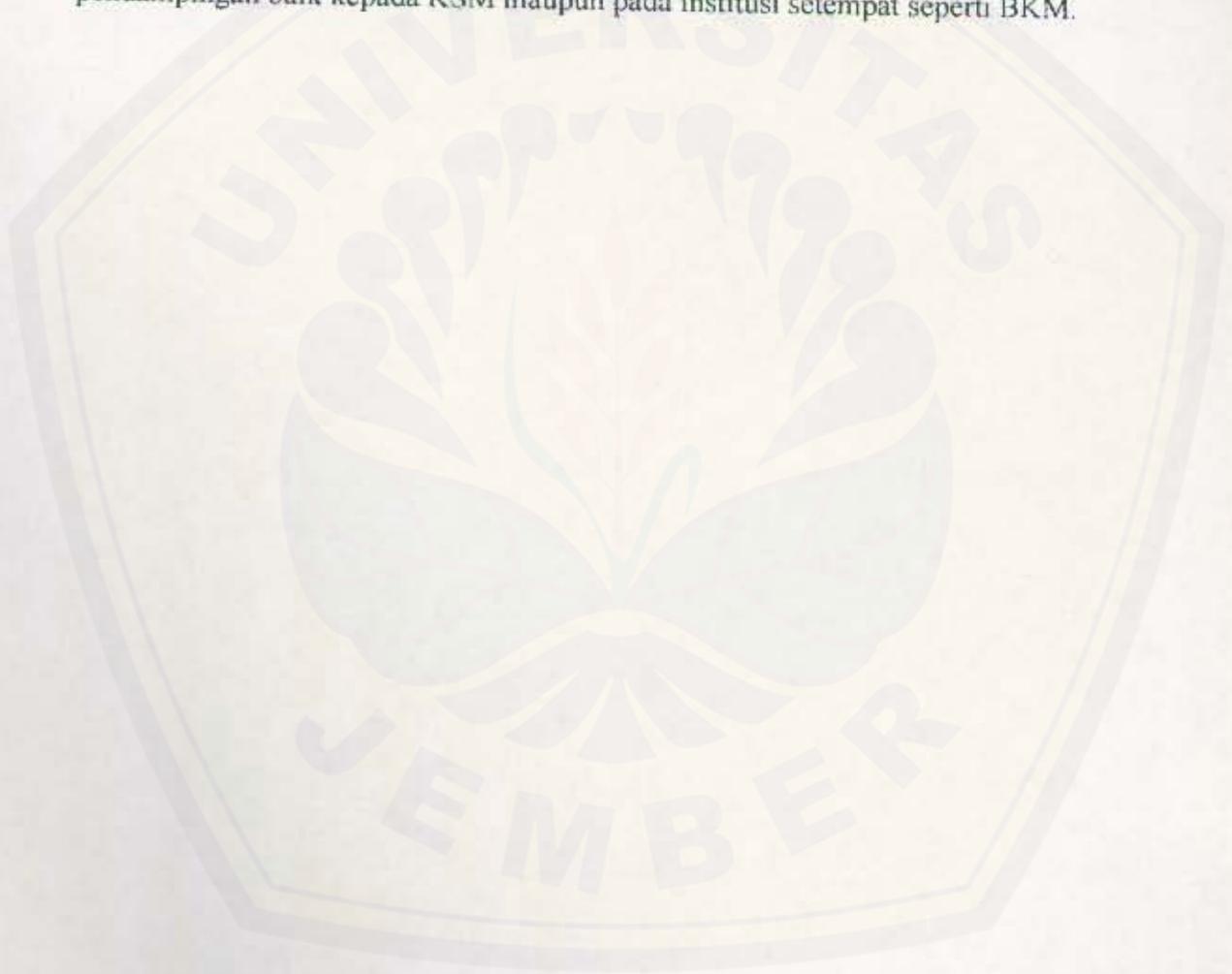
Penjelasan dari bagan di atas :

Dalam pelaksanaan P2KP, maka dibentuk tim koordinasi yang dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut :

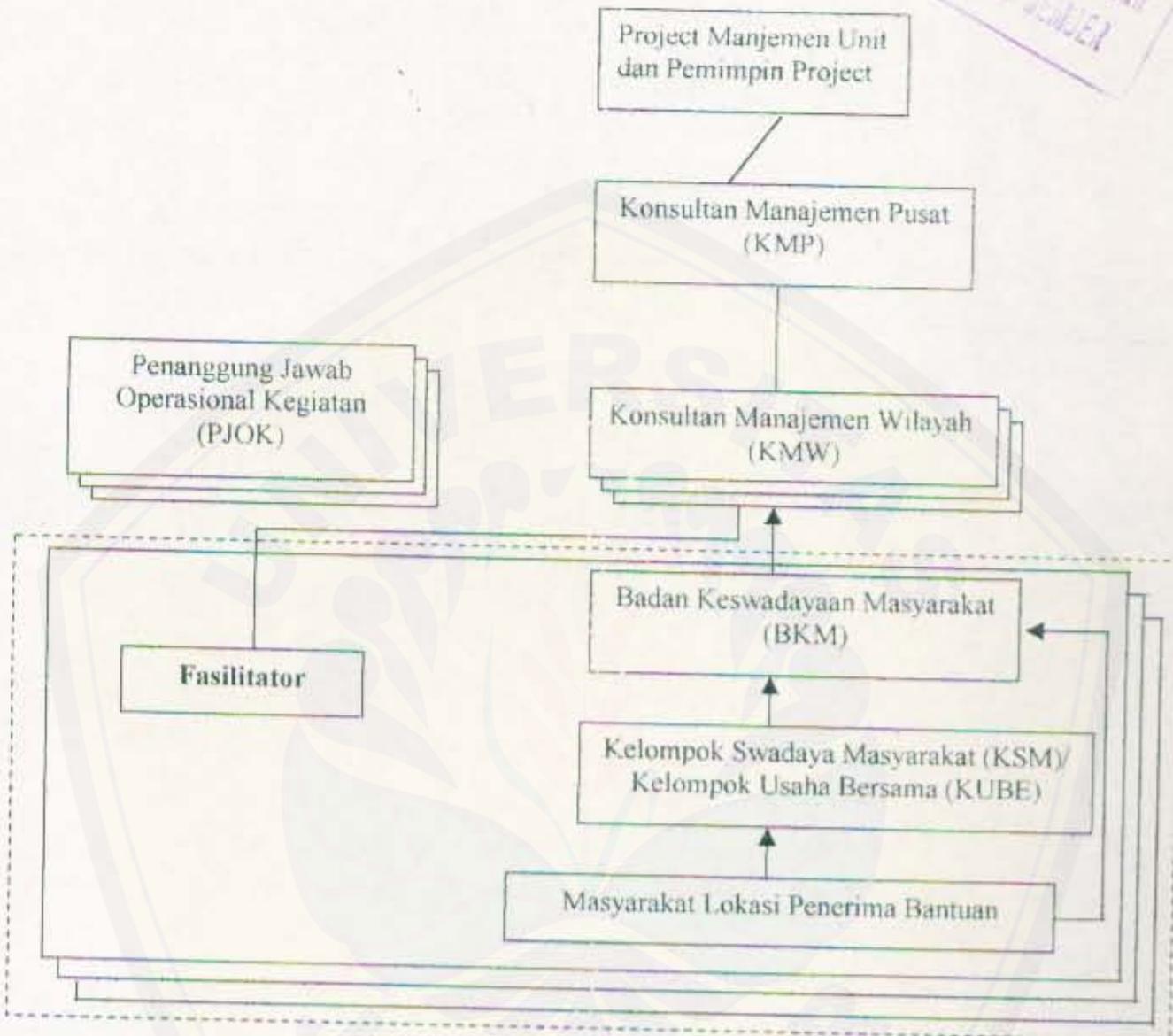
1. Di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi P2KP Pusat yang terdiri atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan departemen lainnya yang terkait.
2. Untuk keperluan operasional dan administrasi, Tim Koordinasi P2KP Pusat membawahkan Sekretariat P2KP Pusat yang terdiri atas unsur-unsur departemen terkait.
3. Pengelolaan proyek dilakukan oleh Project Management Unit (PMU), yang dibentuk di Instansi Pelaksana, yaitu Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Untuk administrasi proyek, PMU dibantu oleh Pemimpin Proyek. Untuk membantu koordinasi dan pengelolaan P2KP pada tingkat Pusat, dipilih lembaga konsultan melalui suatu lelang terbuka, yang disebut sebagai Konsultan Manajemen Pusat (KMP).
4. Pada tingkat Wilayah, ditempatkan KMW yang masing-masing menangani satu SWK (Satuan Wilayah Kerja). KMW pun direkrut melalui proses lelang terbuka. KMP dan KMW terkait secara kontraktual dengan Pemimpin Proyek.
5. Pada tingkat kelurahan, dikembangkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan kelembagaan masyarakat yang beranggotakan tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, perwakilan KSM dan warga kelurahan. BKM selanjutnya membentuk UPK (Unit Pengelola Keuangan) yang diketuai oleh Bendahara

BKM. Sangat dianjurkan, Ketua UPK adalah seorang perempuan yang dipilih dari Organisasi Kerja Efektif (OKE) setempat, seperti kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

6. Penerima bantuan adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang terdiri atas perorangan atau keluarga miskin.
7. Untuk membantu, mendorong dan mengarahkan kegiatan KSM di kelurahan sasaran, disiapkan sejumlah pendamping yang disebut sebagai fasilitator kelurahan. Fasilitator kelurahan adalah perangkat KMW yang melakukan pendampingan baik kepada KSM maupun pada institusi setempat seperti BKM.



Bagan Alur Usulan Dalam P2KP



Keterangan :

- : Alur Koordinasi, Pengawasan, Pembinaan
- : Alur Usulan
- ▭ : Sub Satuan Wilayah Kerja (Sub-SWK)
- ▭ (dashed) : Satuan Wilayah Kerja (SWK)

Lembaga Pelaksana Proyek

Keseluruhan tanggung jawab koordinasi dan manajemen proyek berada di Project Management Unit (PMU) di Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Sekretariat P2KP Pusat berisi staf dari instansi-instansi terkait. PMU akan mendapat bantuan manajemen dari KMP untuk melaksanakan P2KP pada tingkat Pusat dan dari KMW yang melaksanakan P2KP pada tingkat SWK.

Konsultan-konsultan tersebut diminta untuk mengembangkan dan menjalankan suatu sistem informasi berbasis komputer. PMU, melalui *Project Implementation Unit* Pembinaan Aparat Daerah di Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, juga akan menyebarluaskan informasi kepada Pemda dan memberikan pelatihan pada aparat terkait. Pemda tingkat II akan memilih Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), yang akan menangani administrasi keuangan proyek di setiap wilayah kecamatan.

3.1.4 Komponen Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Komponen proyek dan subproyek yang didanai oleh P2KP dikelompokkan menjadi 3 antara lain :

1. Komponen Fisik

Komponen ini meliputi pemeliharaan, perbaikan maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan setempat, meliputi :

- a. prasarana dan sarana yang biasanya ditangani dalam proyek KIP, seperti jalan dan lingkungan
- b. ruang terbuka hijau atau taman
- c. prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
- d. komponen-komponen lain yang disepakati bersama kecuali pembangunan dan pembangunan rumah ibadah

2. Komponen Kegiatan Ekonomi Skala Kecil

Ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan atau keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM.
- b. Urutan prioritas usulan kegiatan KSM ekonomi produktif adalah :
 - Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh perseorangan atau keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM secara bersama-sama, dikelola dengan manajemen tunggal dan risikonya ditanggung seluruh anggota secara bersama-sama.
 - Usaha Sejenis, dengan ciri-ciri adanya satu jenis usaha yang dikelola dan dimiliki oleh masing-masing anggota KSM, dan risikonya ditanggung oleh masing-masing anggota KSM.
 - Aneka Usaha, dengan ciri-ciri adanya lebih dari satu jenis usaha yang dikelola dan dimiliki oleh masing-masing anggota KSM, manajemennya dilakukan oleh masing-masing anggota KSM, dan risikonya ditanggung oleh masing-masing anggota KSM.
- c. Tidak ada batasan terhadap jenis usaha yang dapat memperoleh kredit modal usaha, kecuali pembebasan lahan, deposito di lembaga keuangan, produksi atau penjualan obat terlarang, senjata, barang-barang berbahaya serta pendanaan administrasi pemerintah.
- d. KSM yang mengajukan kredit harus berdomisili di kelurahan sasaran dan memenuhi kriteria sebagai KSM miskin.
- e. Penerima bantuan kredit wajib mengembalikan pinjaman modal usaha ini beserta "bunga"-nya (saat ini ditetapkan minimal 1,5 % per bulan).
- f. Pengembalian pinjaman harus dilakukan dalam masa waktu maksimal 18 bulan setelah dana mulai diterima.
- g. Dana yang dikembalikan merupakan dana bergulir yang menjadi hak KSM miskin lainnya di kelurahan yang sama.

3. *Komponen Pelatihan*

Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga di kelurahan sasaran. Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya penciptaan peluang usaha baru dan peluang pengembangan usaha yang telah ada, yang berarti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Termasuk disini adalah magang (kredit mikro dapat diminta untuk membayar sebagian upah) dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan mengelola lembaga (misal : usulan penyelenggaraan pelatihan tata buku).

3.1.5 Dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Biaya proyek secara keseluruhan diperkirakan sejumlah US\$ 100.000.000,00. Dana ini diperoleh sebagai pinjaman dari lembaga-lembaga donor, terutama *The World Bank* kepada Pemerintah Indonesia. Dana di atas dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek selama tiga tahun anggaran, dimulai dari tahun anggaran 1999/2000.

Pemerintah Indonesia menyalurkan dana ini kepada KSM-KSM di kelurahan sasaran, dengan syarat dana yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan usaha harus bersifat dana bergulir dan dikelola oleh kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan itu sendiri.

3.1.6 Tolok Ukur Kinerja Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Dalam pelaksanaan P2KP, dikembangkan beberapa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai bahan untuk mengenali permasalahan pelaksanaan proyek secara dini. Tolok ukur kinerja P2KP didasarkan pada aspek-aspek masukan (*input*), proses, keluaran (*output*) dan dampak.

1. Tolok ukur aspek masukan meliputi antara lain :

- jumlah kelurahan yang mendapatkan bantuan
 - jumlah fasilitator menurut ukuran layanan terhadap jumlah penduduk penerima bantuan
2. Tolok ukur aspek keluaran meliputi antara lain :
- jumlah usulan yang diajukan
 - persentase usulan yang disepakati untuk dibiayai
 - pengembalian pinjaman per tahapan
 - modal awal (persentase dari kewajiban)
 - bunga (persentase dari kewajiban)
 - persentase penyelesaian pekerjaan, dan
 - audit, jumlah kelurahan terpilih
3. Tolok ukur aspek dampak, meliputi antara lain :
- tingkat kepuasan penerima bantuan
 - persentase jumlah orang yang diteliti, yang mengetahui keberadaan proyek
 - persentase jumlah orang yang diteliti, yang merasa puas dengan keberadaan proyek, dan
 - adanya pertumbuhan peningkatan jumlah modal yang berputar di kelurahan sasaran

3.2 Institusi Pemerintah

Tujuan pelibatan pemerintah dalam pelaksanaan P2KP antara lain, adalah sebagai berikut :

1. Menyukkseskan pelaksanaan P2KP, yang merupakan program pemerintah melalui pendekatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan komunitas.
2. Memberikan legitimasi kepada para pelaku antara lain : konsultan, fasilitator kelurahan, KSM, kelompok sosial lainnya dan warga masyarakat penerima bantuan.

3. Menjadi wasit bila timbul persoalan-persoalan yang memerlukan fungsi "penengah".
4. Mendorong dan memampukan para pelaku agar peran dan tugas-tugasnya dapat dilaksanakan secara efektif.
5. Turut memberikan masukan dan mengendalikan, khususnya fisik agar terintegrasi dengan rencana-rencana dan program pembangunan lainnya yang ada di daerah.

Institusi Pemerintah dibagi menjadi 5 bagian, meliputi :

3.2.1 Pemerintah Pusat

Secara terperinci, partisipasi pemerintah dalam pelaksanaan P2KP menurut tingkatan-tingkatannya, adalah sebagai berikut :

1. *Unsur pemerintah pusat, yaitu Tim Koordinasi atau Sekretariat P2KP Pusat yang terdiri atas :*
 - a. Tim Koordinasi Pusat
 - b. Sekretariat Pusat dengan unsur-unsur : Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Departemen Keuangan serta departemen terkait lain, dan
 - c. Project Management Unit (PMU) dan Pimpro (Pemimpin Proyek)

Peran Pokok Unsur Pemerintah Pusat adalah menjadi penanggungjawab pelaksanaan P2KP, dengan tugas utama sebagai berikut :

- a. Memberikan legitimasi kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP.
 - b. Melakukan pemasyarakatan program kepada pemerintah daerah menurut tingkatan-tingkatannya, agar pelaksanaan kegiatan konsultan dan fasilitator di daerah sudah dapat diketahui maksud dan tujuannya secara lebih awal.
 - c. Memberikan penjelasan tentang P2KP kepada aparat Pemda tingkat I dan II.
2. *Unsur konsultan pada tingkat pusat yang terdiri atas :*
 - a. Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
 - b. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

3.2.2 Daerah Tingkat I

Unsur yang terdapat pada Daerah Tingkat I dalam pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Pemda Tingkat I, yaitu Kepala Daerah dan Bappeda Tingkat I.*

Peran Pokok Unsur Pemda Tingkat I adalah memperhatikan dan menjaga kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Tugas utama mereka adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan legitimasi kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
 - b. Melakukan pemasyarakatan program kepada Pemda Tingkat II di wilayahnya.
 - c. Membantu bila pelaksanaan P2KP pada beberapa Dati II memerlukan koordinasi.
 - d. Membantu merealisasikan terbentuknya Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Dati I jika kelak dibutuhkan.
 - e. Melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan program dengan penerima laporan tahunan dari Pemda Tingkat II.
 - f. Menyusun daftar kecamatan miskin, menetapkan kriteria penduduk dan kecamatan miskin, menetapkan dan menyeleksi kecamatan atau kelurahan miskin, dan menyampaikannya kepada Sekretariat P2KP Pusat sebagai masukan untuk penetapan daerah penerima bantuan P2KP.
 - g. Mengkaji ulang daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang disusun oleh Sekretariat P2KP Pusat.
 - h. Menyeleksi kecamatan dan kelurahan miskin yang tidak sedang menerima bantuan PPK, PDM-DKE, atau program sejenisnya.
2. *Unsur pelaksana di Daerah Tingkat I, yang terdiri atas :*
- a. *Training providers* (penyelenggara pelatihan), yang melaksanakan pelatihan bagi sebagian calon fasilitator kelurahan, dan
 - b. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), yang mengelola pelaksanaan P2KP di beberapa daerah tingkat II, yang mungkin menempatkan satuan tugas atau beberapa sub satuan tugas di daerah tingkat II.

3.2.3 Daerah Tingkat II

Unsur yang terdapat pada Dati II dalam pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Pemda Tingkat II : Tim Koordinasi Dati II (c.q. Kepala Daerah, Bappeda Tingkat II dan dinas-dinas terkait).*

Peran Pokok Daerah Tingkat II adalah memperhatikan dan menjaga kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya. Tugas utama tim ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
 - b. Mengoreksi daftar kecamatan dan kelurahan miskin yang berdasarkan pertimbangan daerah mempunyai arti strategis untuk dicalonkan sebagai penerima bantuan P2KP, kemudian mengirimkan koreksi tersebut ke Sekretariat P2KP Pusat, dengan tembusan ke Bappeda Tingkat I.
 - c. Melakukan pemasyarakatan program kepada aparat di kecamatan.
 - d. Membantu pelaksanaan P2KP pada wilayah kecamatan, bila diperlukan.
 - e. Membantu merealisasikan Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.
 - f. Melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan program dengan menerima laporan tahunan dari kecamatan.
2. *Unsur konsultasi pada daerah tingkat II, yaitu tim dari KMW.* Mengingat cakupan wilayah kerja KMW cukup luas (mencakup beberapa Dati II), mereka dianjurkan untuk menempatkan satuan tugas atau beberapa sub satuan tugas pada masing-masing sub-SWK

3.2.4 Kecamatan

Unsur yang terdapat pada tingkat kecamatan dalam pelaksanaan P2KP, adalah sebagai berikut :

1. *Unsur pemerintah tingkat kecamatan, yang terdiri atas :*
 - a. camat dan aparatnya, dan

b. PJOK

Peran Pokok Aparat Kecamatan adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, sedangkan tugas utamanya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.
 - b. Melakukan kemasyarakatan program kepada kelurahan-kelurahan di wilayah kerjanya.
 - c. Membantu bila pelaksanaan P2KP pada wilayah kelurahan memerlukan koordinasi.
 - d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan dan atau fasilitator kelurahan.
 - e. Membantu memberikan masukan kepada KMW dan fasilitator kelurahan mengenai penduduk dan kelurahan miskin, baik berdasarkan kriteria yang disusun sendiri maupun berdasarkan arahan dari Pemda tingkat II atau instansi terkait lainnya.
 - f. Menyusun daftar lokasi kelurahan dalam kecamatan berdasarkan besarnya jumlah penduduk miskin dalam kelurahan dan menyampaikannya kepada Pemda tingkat II (c.q Ketua Bappeda Tingkat II).
2. *Unsur konsultan di daerah kecamatan, yaitu bagian KMW*

3.2.5 Kelurahan

Pada tingkat kelurahan, setidaknya terdapat dua unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Pemerintah Tingkat Kelurahan (lurah dan aparatnya)*

Peran Pokok mereka adalah memperhatikan kelancaran pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya dengan tugas utama sebagai berikut :

- a. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada para pelaku, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam P2KP di wilayah kerjanya.

- b. Melakukan kemasyarakatan program kepada warga masyarakat di kelurahan, khususnya kepada kelompok-kelompok atau organisasi sosial dan kemasyarakatan yang ada.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama-sama dengan konsultan dan atau fasilitator kelurahan serta membantu pelaksanaan peninjauan lapangan.
- d. Membantu menyusun kriteria kemiskinan untuk penetapan calon penerima bantuan P2KP. Kriteria ini dapat dibuat berdasarkan ketentuan dari Pemda Tingkat I dan Tingkat II, berdasarkan pembahasan bersama KMW atau fasilitator kelurahan atau pembahasan bersama warga masyarakat di kelurahan.
- e. Mengusulkan kepada KMW atau fasilitator kelurahan daftar keluarga-keluarga miskin dalam satu kelurahan untuk mendapat bantuan P2KP.
- f. Membantu pembentukan BKM serta kegiatan-kegiatannya.
- g. Membantu terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW atau fasilitator kelurahan dalam rangka penyebarluasan dan informasi P2KP.
- h. Mendukung dan menghadiri pertemuan-pertemuan KSM, BKM, KMW dan fasilitator kelurahan dalam tahap perencanaan, seleksi dan penetapan usulan program-program kegiatan.
- i. Mendukung usulan-usulan kegiatan KSM yang telah disetujui dan ditetapkan oleh BKM, setelah mendapat penilaian kelayakan teknis, lingkungan dan keuangan dari KMW.

3.3 Unsur-unsur Pelaksana KMW

3.3.1 Tim Koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tim Pengarah :

1. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai rencana dan kebijaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.
2. Menerima dan mengkaji ulang laporan Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan P2KP dan memberikan arah penyempurnaan lebih lanjut.

Tim Pelaksana :

Tim Pelaksana terdiri atas Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Anggaran, Kelompok Kerja bidang Pembinaan Teknis dan Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat. Tiap kelompok kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Anggaran

1. Melakukan koordinasi dan pemanduan dengan program pembangunan daerah sektoral.
2. Melakukan koordinasi dalam penetapan alokasi dana dan cara penyaluran anggaran.
3. Memberikan dukungan administratif bagi kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan yang dilakukan Pemda tingkat II.
4. Menyusun petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri serta mengadministrasikan laporan keuangan, kemudian mengirimkannya kepada lembaga donor.
5. Menerima laporan keuangan dan melakukan evaluasi laporan. Jika membantu dan meneruskan laporan akhir pelaksanaan program kepada instansi terkait.

Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Teknis

1. Melakukan evaluasi terhadap daftar usulan kebutuhan kegiatan dari segi teknis berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan teknis atas perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan pembangun bagi semua pihak yang terkait.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program.

Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat

1. Meningkatkan pembinaan aparat dan organisasi masyarakat sebagai upaya pemulihan kemampuan lembaga dan pengembangan peran sertanya di dalam penanganan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
2. Melakukan koordinasi aparat dan organisasi di tingkat pusat dan daerah serta ikut mendukung pengembangan kemampuan dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping masyarakat dan tenaga konsultan.
3. Melakukan pembinaan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat serta pemulihan dan peningkatan kemampuan lembaga-lembaga di tingkat masyarakat.
4. Mengkaji ulang laporan evaluasi kinerja pelaksanaan P2KP dan pemantauan kegiatan dukungan aparat Pemda tingkat II, aparat kecamatan dan aparat kelurahan di lapangan.

3.3.2 Sekretariat P2KP Pusat

Sekretariat P2KP Pusat dan PMU (*Project Management Unit*) sehari-hari bertugas membantu kegiatan Tim Koordinasi Pusat, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi mulai dari masa persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan P2KP.
2. Memberikan dukungan pada kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan dan pengelolaan P2KP, khususnya yang menggunakan bantuan luar negeri (BLN).
3. Memberikan dukungan administratif dalam kegiatan koordinasi antar departemen atau antar instansi dan Pemda terkait dalam rangka membantu kelancaran program.
4. Membantu Tim Pelaksana menyusun alokasi kebutuhan dana setiap kelurahan yang dikelompokkan untuk setiap Dati I dan Dati II berdasarkan data kebutuhan yang dikirimkan oleh PJOK dan KMW.

5. Membantu Tim Pelaksana melaporkan alokasi kebutuhan dana yang disusun dalam format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Direktorat Jendral Tata Usaha Anggaran (Dit-TUA) dan kemudian diteruskan ke Bank Indonesia dalam format Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Membantu Tim Pelaksana menyusun petunjuk Penatausahaan Pinjaman dan Penyaluran Bantuan Luar Negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada lembaga donor dari instansi terkait.
7. Membantu Tim Pelaksana dalam memantau penetapan lokasi kelurahan terpilih untuk tahap selanjutnya, sesuai usulan lokasi dari Pemda Tingkat I dan II.
8. Membantu Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan program pembangunan daerah dan sektoral dalam upaya menunjang P2KP.
9. Memasyarakatkan informasi mengenai P2KP kepada aparat Pemda Tingkat I dan II.

3.3.3 Project Management Unit dan Pemimpin Proyek Pusat

Kepala Project Management Unit (PMU) adalah penanggungjawab operasional P2KP. Sedangkan Pimpinan Proyek (Pimpro) Pusat, selaku salah satu unit di dalam organisasi PMU, bertanggung jawab dalam administrasi proyek, khususnya kontrak kerja dengan KMP, KMW, KME dan penganggaran P2KP.

Tugas-tugas Kepala Project Management Unit (PMU) dan Pimpinan Proyek (Pimpro) adalah sebagai berikut :

1. Bersama Sekretariat P2KP Pusat, memfasilitasi pembentukan Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan antara aparat pemerintah dengan tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, individu atau kelompok lain.
2. Bersama Pimpro Pusat, melakukan supervisi kegiatan pelayan yang dilakukan oleh KMP, KMW dan KME.
3. Bersama Pimpro Pusat, melakukan kaji ulang terhadap urusan mobilisasi KMP, KMW dan KME.

4. Bersama Sekretariat P2KP Pusat, menyusun alokasi kebutuhan dana setiap kelurahan yang dikelompokkan menurut Dati II dan Dati I berdasarkan data kebutuhan yang dikirimkan oleh PJOK dan KMW.
5. Bersama Sekretariat P2KP Pusat, melaporkan alokasi kebutuhan dana dalam format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Dit-TUA yang kemudian akan diteruskan ke Bank Indonesia dalam format Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Melakukan kaji ulang dan persetujuan terhadap penagihan oleh KMP, KMW, KME dan meneruskan permohonan pembayaran ke KPKN dan Dit TUA.
7. Memonitor pelaksanaan pembayaran oleh KPKN kepada para konsultan.
8. Bersama Sekretariat Pusat, membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan P2KP serta berkala kepada Tim Koordinasi Pusat dan lembaga donor.
9. Bersama Sekretariat P2KP Pusat, membuat laporan konsolidasi keuangan dan mengirimkannya ke lembaga donor dan instansi terkait.
10. Membantu Sekretariat P2KP Pusat dalam memantau penetapan lokasi kelurahan terpilih untuk tahap selanjutnya, sesuai usulan lokasi dari Pemda Tingkat II.

3.3.4 Tim Koordinasi Daerah Tingkat II

Tim koordinasi daerah tingkat II adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah tingkat II. Tugas tim ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja P2KP dan program-program sejenis pada wilayah kerjanya.
2. Memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan koordinasi dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan P2KP.
3. Memberikan dukungan kepada KMP, KMW, KME, fasilitator kelurahan, BKM, KSM dan pelaksana-pelaksana lainnya dalam implementasi P2KP.
4. Membantu penyusunan kriteria kemiskinan untuk penetapan calon kelurahan sasaran dan mengusulkan kelurahan yang sebaiknya diprioritaskan. Termasuk disini adalah bersama-sama KMW, menilai kesesuaian antara kelurahan yang

dijadikan sasaran P2KP dengan kriteria yang berlaku dan memutuskan penggantian kelurahan sasaran jika perlu.

5. Melakukan monitoring pelaksanaan P2KP, meminta laporan tahunan dari kecamatan dan meneruskan hasilnya pada instansi-instansi yang berkepentingan.

3.3.5 Penanggung Jawab Operasional (PJOK)

Penanggung Jawab Operasional (PJOK) adalah penanggungjawab administratif proyek yang diangkat dari aparat Pemda Tingkat II dan ditempatkan di kecamatan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mendukung proses pertemuan di forum kelurahan yang melibatkan BKM, KSM, aparat kecamatan atau kelurahan dan RT/RW.
2. Memantau proses penentuan lokasi kelurahan prioritas, sesuai dengan petunjuk penentuan lokasi target P2KP yang dilakukan oleh aparat kelurahan, kecamatan dan aparat Pemda Tingkat II.
3. Memantau KMW dan fasilitator kelurahan dalam proses pengembangan lembaga-lembaga masyarakat di tingkat paling bawah.
4. Membantu BKM dalam proses pembukaan rekening di bank yang dipilih oleh BKM, untuk penyaluran dana keperluan P2KP.
5. Mengelola dana administrasi proyek PJOK.
6. Bersama BKM menandatangani SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) untuk pencairan dana.
7. Membuat laporan berkala kepada bupati atau walikota dan camat.

3.4 Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Konsultan Manajemen Pusat (KMP) adalah suatu tim yang terdiri atas ahli-ahli yang mempunyai kemampuan untuk membantu fungsi PMU dalam mengelola proyek di tingkat pusat. KMP berkedudukan di Sekretariat P2KP Pusat di Jakarta. Untuk menjadikan KMP, sebuah lembaga konsultan harus melalui langkah-langkah berikut :

1. Mengajukan pernyataan minat menjadi KMP kepada Sekretariat P2KP Pusat.
2. Mengikuti prakualifikasi.
3. Termasuk dalam daftar pendek.
4. Mendapat undangan mengikuti pelelangan.
5. Mengajukan usulan.
6. Lolos dalam evaluasi penentuan pemenang.
7. Disetujui oleh Panitia Pelelangan.
8. Mendapatkan NOL (*no objection letter* – surat tidak berkeberatan) dari lembaga donor.

3.4.1 Tugas, Fungsi, Peran dan Lingkup Kerja Konsultan Manajemen Pusat (KMP), meliputi :

1. Membantu PMU dan Sekretariat P2KP dalam aspek teknis dan managerial agar implementasi proyek berjalan lancar dan mencapai tujuan serta sasaran.
2. Memfasilitasi KMW, mengkoordinasikan kegiatan berbagai KMW, dan melatih KMW tentang prinsip-prinsip, teknik-teknik dan aspek-aspek pengelolaan teknis proyek.
3. Menyiapkan manajemen serta informasi yang berbasis komputer dan bersifat responsif untuk mendeteksi permasalahan yang muncul di lapangan serta sekaligus mengupayakan solusinya.
4. Memfasilitasi pelayanan konsultasi di tingkat pusat serta menjamin agar setiap masukan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan proyek.

Secara umum, bantuan yang diharapkan dari KMP meliputi bantuan perencanaan monitoring dan pelaporan. *Secara khusus*, tugas KMP adalah membantu PMU dan Sekretariat P2KP Pusat dalam hal :

1. Perencanaan
 - a. Mengembangkan sistem monitoring pelaksanaan proyek, bekerjasama dengan program-program penanggulangan kemiskinan lain yang sedang berjalan (PPK, PDM-DKE dan lain-lain).

- b. Membantu Sekretariat P2KP Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan P2KP.
2. Monitoring
 - a. Mendukung kegiatan monitoring yang dipercayakan kepada KMW di wilayah kerjanya masing-masing.
 - b. Memfasilitasi dan memantau kegiatan KMW.
 - c. Mendorong KMW untuk mengembangkan forum konsultasi di masing-masing Dati II sasaran.
 3. Pelaporan
 - a. Mengelola informasi dan melaporkannya ke PMU dan Sekretariat P2KP Pusat.
 - b. Mengevaluasi pencapaian sasaran-sasaran utama proyek, baik dari segi kelembagaan, keuangan maupun fisik melalui observasi lapangan yang dilakukan secara berkala selama pelaksanaan proyek.
 - c. Mengembangkan sistem penghargaan maupun sanksi dalam pelaksanaan kerja dan pengawasan kinerja KMW di wilayah kerjanya masing-masing.
 - d. Turut serta mengembangkan sistem dan prosedur penyelesaian konflik yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek.
 - e. Jika diperlukan, KMP dapat meminta masukan dari konsultan atau sumber-sumber lain guna mendukung kegiatan KMP, misalnya dalam penyiapan bahan-bahan pelatihan dan studi-studi lain yang diperlukan. Selain itu KMP juga dapat meminta masukan dan melakukan koordinasi dengan program sektor lainnya.

3.4.2 Mekanisme Kerja Konsultan Manajemen Pusat (KMP) antara lain :

1. Setelah ada pelaksanaan proyek di tiap SWK oleh KMW-KMW, KMP dapat segera melaksanakan fungsinya.

2. Melalui sistem informasi yang telah dikembangkan, secara periodik KMP melakukan pengumpulan data dan menerima laporan perkembangan proyek dari KMW di tiap SWK sesuai dengan format laporan yang ditentukan.
3. Laporan yang berisi permasalahan akan menjadi bahan yang diutamakan untuk segera ditangani melalui layanan tenaga ahli yang tersedia di KMP.
4. Laporan rutin akan dikonsolidasikan menjadi dokumen laporan ke Sekretariat P2KP Pusat, baik laporan keuangan (penyerapan dana bantuan ke masyarakat).
5. Menerima masukan dari KME sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja proyek.
6. Atas dasar informasi di atas, KMP menyusun rencana penanganan masalah dan memantau perkembangan penanganan masalah tersebut dengan cara :
 - a. menangani masalah secara langsung di lapangan
 - b. menyusun program penanganan masalah sebagai jawaban atas kebutuhan layanan KMP.

3.5 Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

3.5.1 Tugas, Peran dan Lingkup Kerja Wilayah

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) adalah konsultan di Dati II yang melayani rata-rata 150 kelurahan, dengan jangka waktu kontrak selama dua tahun. Pada SWK yang luas, KMW dapat membentuk beberapa subtim KMW untuk mencapai daya kerja yang baik. Alamat kantor subtim disebarluaskan dari rumah ke rumah pada kelurahan sasaran yang dibinanya. Untuk dapat menjadi KMW, konsultan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan pernyataan minat menjadi KMW kepada Sekretariat P2KP Pusat.
2. Mengikuti prakualifikasi.
3. Termasuk dalam daftar pendek (*short list*).
4. Mendapat undangan mengikuti pelelangan.
5. Mengajukan usulan.
6. Lolos dalam evaluasi penentuan pemenang.

7. Disetujui oleh Panitia Pelelangan.
8. Mendapatkan NOL (*nol objection letter* – surat tidak berkeberatan) dari lembaga donor.

Tim KMW terdiri atas berbagai ahli dari bidang-bidang yang relevan, yaitu manajer proyek, ahli pengembangan usaha kecil, ahli pengorganisasian masyarakat, ahli manajemen informasi, manajer pelatihan dan ahli-ahli lainnya yang dianggap perlu. Penggabungan berbagai ahli ini dilakukan agar KMW mampu menangani berbagai aspek yang terkait dengan masalah pendampingan KSM.

KMW menugaskan para fasilitator untuk langsung terjun ke setiap kelurahan binaannya. Meskipun dalam hal ini fasilitator kelurahan merupakan perwujudan KMW pada tingkat kelurahan, namun KMW bertanggung jawab untuk secara acak, memeriksa pelaksanaan pekerjaan KSM di bawah binaannya.

KMW juga menangani sistem informasi manajemen proyek dan menyusun pelaporan di wilayah kerjanya KMW dapat diaudit. Karena itu KMW harus mendokumentasikan catatan tentang kegiatan-kegiatannya. Catatan-catatan semacam ini harus disimpan setidaknya selama tiga tahun

3.5.2 Mekanisme Kerja Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) antara lain :

1. Menyusun program kerja sesuai dengan kerangka acuan yang ditentukan oleh Sekretariat P2KP Pusat.
2. Menyusun strategi pelaksanaan P2KP di Satuan Wilayah Kerjanya.
3. Melaksanakan pengadaan kader masyarakat, termasuk pelatihannya.
4. Menyebarluaskan informasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai P2KP.
5. Bekerjasama dengan aparat, baik di Dati I, Dati II, kecamatan maupun kelurahan dalam pengelolaan P2KP.
6. Bersama pengurus RT/RW dan fasilitator kelurahan menyiapkan dan mendorong masyarakat dalam mengembangkan KSM dan BKM.

7. Bersama Pemda Tingkat II, mengupayakan pembentukan Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di tiap Dati II.
8. Menilai kelayakan usulan KSM dari segi teknis, keuangan dan lingkungan sebelum dibahas di forum BKM serta memberikan saran teknis dan non teknis apabila sudah layak.
9. Memonitor dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fasilitator kelurahan di lapangan.
10. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan P2KP di Satuan Wilayah Kerjanya.
11. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan termasuk laporan pertengahan dan laporan akhir proyek.
12. Menyusun laporan pencairan dana di masyarakat sesuai penggunaannya dan disampaikan kepada Bappeda tingkat II dan Sekretariat P2KP Pusat dengan tembusan ke Pemda tingkat I dari instansi terkait.
13. Mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan proyek baik di masyarakat maupun BKM.
14. Bersama-sama Pemda, meningkatkan kepercayaan dan semangat masyarakat untuk berlomba menyukseskan pelaksanaan proyek dengan jalan menyediakan bermacam penghargaan yang sesuai dengan keberhasilan yang dicapai.
15. Mencari peluang-peluang pemasaran bagi hasil produksi masyarakat setempat.
16. Mencari dan mengidentifikasi lembaga-lembaga penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

3.6 Bantuan Teknis, meliputi :

3.6.1 Fasilitator Kelurahan

Fasilitator Kelurahan adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2KP di lapangan. Pendampingan diberikan kepada KSM dan BKM dalam proses pembentukan kelompok dan penyiapan usulan-usulan, yang didahului dengan pengenalan potensi yang ada di masyarakat dan kendala yang dihadapi. Salah satu

7. Bersama Pemda Tingkat II, mengupayakan pembentukan Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di tiap Dati II.
8. Menilai kelayakan usulan KSM dari segi teknis, keuangan dan lingkungan sebelum dibahas di forum BKM serta memberikan saran teknis dan non teknis apabila sudah layak.
9. Memonitor dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fasilitator kelurahan di lapangan.
10. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan P2KP di Satuan Wilayah Kerjanya.
11. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan termasuk laporan pertengahan dan laporan akhir proyek.
12. Menyusun laporan pencairan dana di masyarakat sesuai penggunaannya dan disampaikan kepada Bappeda tingkat II dan Sekretariat P2KP Pusat dengan tembusan ke Pemda tingkat I dari instansi terkait.
13. Mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan proyek baik di masyarakat maupun BKM.
14. Bersama-sama Pemda, meningkatkan kepercayaan dan semangat masyarakat untuk berlomba menyukseskan pelaksanaan proyek dengan jalan menyediakan bermacam penghargaan yang sesuai dengan keberhasilan yang dicapai.
15. Mencari peluang-peluang pemasaran bagi hasil produksi masyarakat setempat.
16. Mencari dan mengidentifikasi lembaga-lembaga penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.

3.6 Bantuan Teknis, meliputi :

3.6.1 Fasilitator Kelurahan

Fasilitator Kelurahan adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan P2KP di lapangan. Pendampingan diberikan kepada KSM dan BKM dalam proses pembentukan kelompok dan penyiapan usulan-usulan, yang didahului dengan pengenalan potensi yang ada di masyarakat dan kendala yang dihadapi. Salah satu

misi fasilitator adalah memperkenalkan dan membantu masyarakat melaksanakan suatu pendekatan baru dalam pembangunan, dengan mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kemiskinan melalui usaha mereka sendiri.

Fasilitator mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta aktif anggota masyarakat, secara kelompok maupun perorangan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sistem kelembagaan setempat.
3. Mengenali peluang kegiatan usaha, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta membantu pembuatan usulan yang layak.
4. Mengenalkan cara dan menerapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, termasuk tata buku dan pencatatan serta pembayaran kembali pinjaman yang diterima.

Fasilitator kelurahan dipekerjakan oleh KMW selama 24 bulan. Fasilitator kelurahan diutamakan yang berasal dari kabupaten atau kecamatan sekitar dan tinggal di kabupaten atau kecamatan yang dibantu. Dengan demikian biaya transportasi fasilitator kelurahan tetap kecil dan waktunya di tempat kerja tetap maksimal, tanpa perlu mendapatkan tunjangan perumahan. Fasilitator ini harus mempunyai latar belakang kerja sosial dan latihan melakukan fasilitas. Mereka dapat berasal dari kalangan LSM, universitas atau yayasan lokal.

Pada awal proyek, disediakan satu fasilitator per kelurahan atau lebih bagi kelurahan yang lebih besar. Seorang fasilitator kelurahan dianjurkan untuk menangani tidak boleh lebih dari 12 KSM, atau disesuaikan dengan batas kemampuan rentang kendali fasilitator. Seluruh fasilitator kelurahan dan diberi pelatihan pelaksanaan P2KP sebelum diterjunkan ke lapangan.

1. Dalam proses persiapan, fasilitator kelurahan mempunyai peran khusus sebagai berikut :
 - a. Menyebarkan informasi mengenai P2KP kepada masyarakat dimana mereka ditugaskan.

- b. Memfasilitasi diskusi dengan masyarakat tentang kebutuhan, potensi dan kendala yang ada dalam masyarakat serta membantu masyarakat menyeleksi masalah-masalah utama serta mencari cara pemecahannya.
 - c. Mendorong perorangan dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka memanfaatkan bantuan P2KP.
 - d. Memfasilitasi pembentukan BKM dengan gugus tugas UPK dan gugus tugas lainnya yang dibutuhkan, serta membantu memberikan pelatihan cara mengelola administrasi, pencatatan, pelaporan dan lain-lain.
 - e. Membantu mengembangkan sistem informasi yang sederhana untuk mendorong adanya keterbukaan dalam penggunaan dana, dan dapat menampung saran-saran serta keluhan masyarakat.
2. Dalam proses pemberian bantuan teknis, fasilitator kelurahan mempunyai peran khusus sebagai berikut :
- a. Membantu KSM-KSM dalam menyiapkan usulan berbagai kegiatan yang dipilih baik itu berupa kegiatan usaha kecil, pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan maupun permintaan pelatihan ketrampilan.
 - b. Membantu BKM dalam menghimpun dan menyeleksi usulan-usulan KSM.
 - c. Membantu KSM untuk mendapatkan TPK (bila diperlukan) dan membantu penyusunan Pelaksana Harian BKM, setelah mengkonsultasikannya dengan pihak-pihak terkait.
 - d. Membantu menyiapkan perencanaan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar lingkungan dengan sumber daya dari masyarakat.
 - e. Membantu KSM menyiapkan usulan dengan format buku, untuk persetujuan KMW, BKM dan PJOK.
3. Dalam proses pendayagunaan kelembagaan, fasilitator kelurahan mempunyai peran khusus sebagai berikut :
- a. Membantu memfungsikan UPK sebagai tugas gugus BKM, dengan sistem pembukuan yang mengikuti prinsip-prinsip pembukuan yang sederhana.

- b. Membantu mengembangkan cara pengelolaan keuangan yang transparan dengan pelaporan bulanan yang dapat diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan yang ditunjuk.
- c. Memantau dana bergulir yang dikelola oleh BKM.
- d. Membantu KSM dan UPK-BKM, bila diperlukan dalam memahami dan melaksanakan sistem pembukuan.
- e. Mengadakan pemantauan dan pelaporan kemajuan sebagaimana diminta oleh KMW.
- f. Membantu mengembangkan partisipasi masyarakat di dalam monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mewujudkan keterbukaan yang lebih luas.
- g. Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa keuangan.

3.6.2 Kader Masyarakat

Kader masyarakat adalah tenaga lokal yang dipilih dan dilatih untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas fasilitator kelurahan, seperti mendorong pengembangan BKM dan KSM. Kader masyarakat ini bekerja selama enam bulan dan digaji oleh KMW setiap bulannya. Sesudah masa tugasnya berakhir, kader masyarakat diharapkan dapat menggantikan fungsi fasilitator kelurahan dalam mendorong P2KP agar tetap berjalan.

3.6.3 Tenaga Pembantu Kelompok (TPK)

Tenaga Pembantu Kelompok (TPK) diadakan hanya jika KSM merasa membutuhkannya. TPK bertugas membantu KSM dalam menggali inisiatif dan membuka peluang usaha, menyusun, mengusulkan, melaksanakan kegiatan serta merawat dan mengembangkan kegiatan KSM.

Jika KSM membutuhkan TPK, maka fasilitator yang mendampingi KSM tersebut akan mampu mengidentifikasi keahlian apa saja yang diperlukan KSM dari TPK dan membantu penyeleksian TPK, agar KSM tersebut akan mendapatkan TPK.

yang sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun demikian, hak memilih TPK sepenuhnya berada di tangan KSM. TPK akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Bersama-sama fasilitator kelurahan, membantu KSM menyusun usulan dalam bentuk : teknis, keuangan, pemikiran, terlibat dalam usaha secara penuh.
2. Terlibat langsung dalam kegiatan usaha KSM dengan prinsip pertanggung-jawaban bersama karena TPK merupakan bagian dari KSM.

3.7 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Peran pokok BKM adalah menilai dan memberikan persetujuan serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM baik yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama (Kube) maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan.

Dalam penanganan tugas P2KP sehari-hari, BKM didampingi dan di bantu oleh KMW dan fasilitator kelurahan yang bertugas di lapangan. Secara terperinci, BKM bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan dan organisasi kerja KSM dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan pengembangan usaha.
2. Menyusun dan menetapkan kegiatan-kegiatan KSM yang diprioritaskan pendanaannya, dan mengajukan pada PJOK sebagai lampiran SPPB yang ditandatangani oleh BKM dan PJOK.
3. Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan (pembangunan prasarana dan sarana dasar atau pengembangan usaha), sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaannya di lapangan (atas rekomendasi KMW)
4. Mengelola dana P2KP melalui UPK sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan BKM.

5. Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan
6. Menyadarkan dan menyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta.
7. Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan daftar usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM dan laporan keuangan BKM.
8. Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menyangkut pelaksanaan P2KP, kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut.
9. Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan kriteria yang di sepakati bersama KSM-KSM sebelum kegiatan dilaksanakan.

3.8 Forum Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Keberadaan Forum Konsultasi hanya bersifat anjuran, bukan keharusan. Seandainya forum ini dibentuk, anggota forum diharapkan terdiri atas wakil badan-badan pemerintah, non pemerintah, organisasi masyarakat, badan keagamaan, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi serta perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan mau melakukan kegiatan dengan resiko biaya dan waktu. Kedudukan peran konsultasi ini berada di Dati II dan pada suatu saat, di wilayah Dati I.

Peran forum disini adalah :

1. Menjembatani hubungan antara pelaksana program dengan pihak-pihak yang menjadi peserta forum, dan
2. Melindungi prakarsa P2KP dari intervensi inisiatif-inisiatif lain, baik dari kalangan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, yang berperan pada bidang yang sama namun tidak sejalan sifat dan tujuannya dengan proyek ini. Untuk peran yang kedua ini, forum konsultasi diharapkan dapat menjadi semacam

pintu gerbang yang menyaring dan menyarankan agar program sektoral lainnya yang akan dilaksanakan dapat diselaraskan dengan prakarsa yang sedang berjalan.

3.8.1 Proses Pembentukan

Forum konsultasi yang dimaksud disini adalah forum konsultasi antar pihak terkait (*stakeholders*) yang mempunyai sifat mendukung terhadap para pelaksana proyek. Pembentukannya diprakarsai oleh Kepala Dati II dan KMW, beserta unit-unit terkait.

3.8.2 Lingkup Tugas dan Mekanisme Kerja Forum Konsultasi

Forum Konsultasi dibentuk dan bekerja untuk memperjuangkan kepentingan bersama dalam menangani proyek sejenis ini. Dalam jangka pendek, yang dimaksud dengan kepentingan bersama diwakili oleh inisiatif program ini. *Itu artinya :*

1. Forum konsultasi berkepentingan mendukung pelaksanaan P2KP.
2. Forum konsultasi bekerja dalam koridor peran-peran yang diwakili oleh peserta forum.

Pembentukan mekanisme kerja forum konsultasi disusun bersama dan disepakati oleh seluruh peserta forum :

- Kesepakatan sejauh mungkin diambil berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka kesepakatan dapat diambil secara parsial dan mengikat secara moral, hanya kepada peserta yang memberikan kesepakatannya. Peserta yang tidak memberikan kesepakatan berada dalam posisi mengetahui kesepakatan dimaksud.
- Pertemuan-pertemuan forum konsultasi diadakan secara berkala dan insidental. Jadwal pertemuan berkala diatur dan disepakati oleh seluruh peserta, namun disarankan tidak kurang dari satu kali sebulan. Ini dimaksudkan agar irama kerja forum tetap terjaga dan dapat terus mendukung intensitas kegiatan proyek yang relatif tinggi. Jadwal pertemuan insidental diatur berdasarkan tingkat

permasalahan yang perlu dibahas. Selanjutnya hal ini diatur dan disepakati tersendiri oleh seluruh peserta.

3.9 Penetapan Lokasi Penerima Bantuan

Penerima bantuan P2KP adalah perorangan dan keluarga miskin yang berada disatuan wilayah administrasi kelurahan atau desa perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Dalam P2KP, kedua status wilayah administrasi pemerintah kota tersebut selanjutnya akan diistilahkan sebagai kelurahan.

3.9.1 Penentuan Status Perkotaan

1. Kelurahan dan Desa Perkotaan
 - Status perkotaan sebuah wilayah kelurahan dan desa perkotaan diperoleh dari data BPS (Biro Pusat Statistik) yang telah diolah. Data status perkotaan tersebut merupakan olahan dari berbagai data yaitu data Desa Tertinggal, Profil Desa, Propinsi dalam angka, Potensi Desa dan data Susenas 1995.
2. Kecamatan Perkotaan
 - Kriteria kecamatan perkotaan ditentukan oleh jumlah kelurahan atau desa perkotaan yang berada di dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan kecamatan. Bila terdapat separuh atau lebih kelurahan atau desa perkotaan di dalam sebuah kecamatan, maka kecamatan itu dikategorikan sebagai kecamatan perkotaan.
3. Daerah Tingkat II Perkotaan
 - Bila terdapat separuh atau lebih kecamatan perkotaan di dalam sebuah wilayah administrasi pemerintahan daerah tingkat II, maka daerah itu dikategorikan sebagai Dati II perkotaan. Dati II yang selama ini memang sudah berstatus kota, secara otomatis berstatus Dati II perkotaan.

3.9.2 Penetapan di Tingkat Pusat

Penetapan lokasi penerima bantuan ditingkat pusat merupakan upaya untuk memperoleh angka perkiraan jumlah kelurahan yang diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP. Hal ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Data BPS diolah dan diseleksi berdasarkan status perkotaannya. Termasuk didalamnya adalah melakukan penetapan status perkotaan.
2. Dari proses tersebut diperoleh nama-nama Dati II beserta nama dan jumlah kecamatan serta kelurahan didalamnya.
3. Tiga atau lebih Dati II yang berdekatan kemudian dikelompokkan menjadi satu Satuan Wilayah Kerja (SWK). Setiap SWK dikelola oleh satu Konsultan Manajemen Wilayah (KMW).
4. Data hasil olahan dalam bentuk daftar kelurahan per wilayah administrasi yang dicalonkan menerima bantuan P2KP, disampaikan kepada masing-masing Pemda tingkat I maupun tingkat II untuk mendapatkan umpan balik.

3.9.3 Penetapan di Tingkat Daerah

Setiap daerah mempunyai rencana pembangunan yang bersifat lokal. Dengan mempertimbangkan pemahaman ini, sudah seharusnya data pusat dikonfirmasi dan disesuaikan dengan usulan daerah. Meskipun demikian, prosedur penyusunan lokasi P2KP di tingkat daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Kawasan Andalan
 - Pemilihan lokasi sasaran P2KP harus dipadukan dengan program pengembangan Kawasan Andalan pada masing-masing daerah.
2. Keterpaduan Pembangunan Wilayah Perdesaan dengan Perkotaan (*rural-urban linkages*)
 - Lokasi yang sedang menerima bantuan PPK maupun PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) tidak

boleh diusulkan menjadi lokasi sasaran P2KP. Namun demikian, dalam upaya mendukung pengembangan wilayah, lokasi yang diusulkan menjadi sasaran P2KP sebaiknya berdekatan dengan wilayah kecamatan yang sedang menerima bantuan PPK. Dengan demikian, keterpaduan pembangunan wilayah perdesaan dengan perkotaan dapat dimaksimalkan.

Dalam prosedur penetapan di daerah, peran pihak Pemda sangat penting, masing-masing Pemda Tingkat I dan II diharapkan menjalankan peran sebagai berikut :

1. Pemda Tingkat I

- Pemda tingkat I perlu memiliki daftar peringkat kemiskinan Dati II. Daftar ini merupakan masukan dalam penentuan prioritas lokasi sasaran P2KP pada Dati II. Daftar ini disusun berdasarkan data jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di masing-masing Dati II.

2. Pemda Tingkat II

- Pemda tingkat II perlu memiliki daftar peringkat kemiskinan kecamatan. Daftar ini, juga berisi informasi mengenai jumlah penduduk dan rumah tangga miskin dan merupakan masukan dalam penentuan prioritas lokasi sasaran P2KP pada tingkat kecamatan. Bilamana data kemiskinan di suatu daerah tidak dimiliki, maka Pemda yang bersangkutan dapat menggunakan Data Keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi yang diperoleh dari Kantor Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat.

3.9.4 Pengusulan Nama-nama Kelurahan

Pengusulan nama-nama kelurahan yang akan diikutsertakan dalam P2KP merupakan bagian dari proses seleksi lokasi sasaran. Disamping mempertimbangkan kriteria Kawasan Andalan, Pengusulan itu perlu dipadukan dengan pertimbangan dan alasan-alasan lain yang bersifat kontekstual.

Pengusulan nama-nama kelurahan dilakukan secara *bottom-up* (dari tingkat bawah ke tingkat atas) melalui koordinasi oleh, setidaknya tiga instansi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II, Dinas Pembinaan Musyawarah Desa (PMD) Dati I dan Kecamatan. Proses seleksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau kantong-kantong kemiskinan yang secara umum tidak termasuk dalam wilayah kelurahan miskin. Daftar kelurahan yang ada selanjutnya dikirimkan ke Sekretariat P2KP Pusat untuk mendapat persetujuan.

3.9.5 Lokasi

Lokasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan permukiman kelurahan. Satuan permukiman mempunyai makna yang penting, karena disinilah akan muncul kebersamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama. Disamping itu adanya kegiatan sosial, ekonomi dan fisik dengan kepranataan sosialnya sehingga satuan permukiman sebagai areal yang memungkinkan adanya integrasi berbagai kegiatan, termasuk integrasi kegiatan pembangunan sektoral.

Satuan hunian dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Keberadaan satuan permukiman tidak terlepas dari fungsi-fungsi sekitarnya serta struktur fisik prasarana dan sarana yang merupakan bagian dari sistem struktur yang lebih besar.
2. Seluruh kota (besar, sedang, kecil) dapat dijadikan lokasi sasaran P2KP. Penetapan lokasi sasaran P2KP didasarkan pada hasil pengolahan data dan pemetaan kelurahan-kelurahan miskin yang berlokasi di kota.

3.9.6 Penetapan Wilayah P2KP Tahap I

Penentuan Kawasan Pantai Utara (Pantura)

- P2KP Tahap I akan dilaksanakan di beberapa daerah perkotaan yang meliputi kota dan kabupaten yang tersebar di kawasan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, Kota dan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Malang (Jawa Timur).

Daerah-daerah tersebut ditetapkan karena dinilai merupakan daerah perkotaan yang padat penduduknya dan dihuni oleh masyarakat tergolong miskin. Di wilayah-wilayah tersebut 1.305 kelurahan yang penduduknya diatas 7.500 jiwa akan dibantu terlebih dahulu. Secara ekologis, daerah-daerah ini dikenal juga memiliki persoalan lingkungan yang sangat sensitif. Karena merupakan kawasan yang padat industri, rawan bencana, kekeringan dan rawan banjir.

3.9.7 Penentuan Satuan Wilayah Kerja

Pengelompokan Satuan Wilayah Kerja (SWK) dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain :

1. Keterpaduan dengan kawasan pengembangan daerah
2. Jangkauan geografis agar memudahkan koordinasi
 - *Pada Tahap I Pelaksanaan P2KP, ditetapkan 9 SWK sebagai berikut :*
 1. SWK I (DKI Jakarta) meliputi : Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat.
 2. SWK II (DKI Jakarta dan Jawa Barat) meliputi : Jakarta Timur, Jakarta Utara, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
 3. SWK III (Jawa Barat) meliputi : Kabupaten Pandenglang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Depok.
 4. SWK IV (Jawa Barat) meliputi : Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.
 5. SWK V (Jawa Tengah) meliputi : Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.
 6. SWK VI (Jawa Tengah) meliputi : Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga.

7. SWK VII (Daerah Istimewa Yogyakarta) meliputi : Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.
8. SWK VIII (Jawa Timur) meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.
9. SWK IX (Jawa Timur) meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang.

3.10 Pendanaan

3.10.1 Alokasi dan Penggunaan Dana

Setiap kelurahan sasaran hanya akan mendapat alokasi dana satu kali selama proyek berjalan. Alokasi dana merupakan hibah untuk kelurahan dengan jumlah penduduk di kelurahannya. Untuk menjamin keterbukaan, kepada masyarakat di lokasi sasaran akan diinformasikan jumlah maksimum alokasi bantuan untuk kelurahan mereka. Namun dengan catatan, alokasi sesungguhnya akan disesuaikan dengan usulan KSM yang disetujui dan alokasi per RW tidak melebihi Rp. 100 juta. Masyarakat juga perlu diberitahu bahwa dana yang dialokasikan untuk kelurahan mereka dapat saja dipindahkan ke kelurahan lain, jika :

1. Kelurahan tersebut menunjukkan kemajuan kegiatan yang rendah selama satu tahun setelah menerima dana, atau
2. BKM tidak terbentuk setelah enam bulan proyek dimulai pada kelurahan itu.

3.10.2 Status Persyaratan Penggunaan Dana

Dana proyek dapat digunakan sebagai pinjaman bergulir bagi kegiatan usaha kecil, sebagai hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta

sebagai hibah untuk pelatihan bagi pengelola institusi-institusi masyarakat. Berbagai subproyek tersebut harus diusulkan paling lambat dalam waktu enam bulan sejak proyek diluncurkan di kelurahan. Yang dimaksud dengan subproyek adalah setiap kegiatan KSM dalam rangka P2KP baik itu berupa pengembangan usaha kecil maupun pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. Sementara kata proyek dimaksudkan sebagai kegiatan P2KP secara keseluruhan.

Dana pinjaman bergulir yang diperoleh KSM harus dikembalikan dalam jangka waktu 18 bulan setelah pembayaran pertama diterima oleh masing-masing KSM.

3.10.3 Ketentuan Mengenai Pinjaman

Ketentuan Mengenai Pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman harus dikembalikan dalam waktu 18 bulan.
2. Tingkat bunga pinjaman adalah minimal 1,5 % per bulan.
3. Jadwal pembayaran kembali di tentukan atas dasar kesepakatan antara KSM peminjam dan BKM.
4. Dana pembayaran kembali harus dimasukkan ke dalam rekening BKM di Bank pemerintah yang ditunjuknya, kemudian digulirkan kembali dengan menggunakan prinsip yang sama. Rekening atas BKM disertai syarat-syarat berikut :
 - a. Tidak boleh dilengkapi Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
 - b. Setengah dari bunga yang dibebankan kepada KSM peminjam dapat digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi BKM dan sisanya dimasukkan dalam kas BKM untuk biaya pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam hal KSM memanfaatkan dana bantuan P2KP untuk membangun baru atau memperbaiki prasarana dan sarana lingkungan, pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan itu akan dibayar sesuai hasilnya, dengan nilai yang

sebanding dengan upah minimum setempat. Selain dikerjakan secara swadaya, beberapa pekerjaan lainnya dapat dikontrakkan kepada pihak ketiga.

3.10.4 Tanggung Jawab Pengelolaan Dana

1. Pengelolaan Dana Di Tingkat Pusat
 - Semua dana bantuan dan pinjaman Bank Dunia untuk keperluan P2KP ditransfer ke Rekening Bantuan P2KP di Bank Indonesia.
2. Pengelolaan Dana Di Tingkat Kelurahan
 - Pengelolaan dana di tingkat kelurahan dilakukan di bawah koordinasi UPK (Unit Pengelola Keuangan) sebagai gugus tugas BKM.
3. Pengelolaan Dana Di Tingkat KSM
 - Pengelolaan dana di tingkat KSM dilakukan oleh bagian keuangan KSM. Untuk organisasi KSM yang sederhana pengelolaan dana dapat dilakukan sendiri oleh ketua KSM.

BAB IV

IDENTITAS RESPONDEN

Pentingnya menyajikan identitas responden ini untuk mempermudah penulis mengetahui keseluruhan kondisi dari responden. Penulis memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) secara langsung kepada sejumlah responden yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis.

Sesuai dengan permasalahan dan judul penelitian, maka untuk dapat mengetahui identitas responden untuk memperoleh data yang diperlukan itu penulis melihat dari latar belakang responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, agama, pendidikan, status perkawinan serta jabatan di dalam masyarakat pada Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar maupun Trajeng. Sampai penelitian berakhir, semua daftar pertanyaan yang berbentuk kuesioner telah kembali semuanya. Sedangkan jumlah responden sebagai sampelnya sebanyak 45 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijabarkan data-data identitas dari responden dengan judul penelitian adalah Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada Badan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sebagai berikut :

4.1 Jenis Kelamin Responden

Tabel 15. Jenis Kelamin dari Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	31	68,89
2.	Perempuan	14	31,11
	Jumlah	45	100,00

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tokoh masyarakat, KSM, dan fasilitator kelurahan (faskel) yang terpilih menjadi responden pada penelitian ini, mayoritas adalah laki-laki yaitu berjumlah 31 orang (68,89%). Sedangkan untuk perempuan hanya 14 orang (31,11%). Meskipun jumlah perempuannya sedikit tetapi tidak berarti bahwa organisasi yang ada di dalam masyarakat harus didominasi oleh laki-laki. Dalam hal ini kaum perempuan masih diberi kesempatan untuk berkecimpung ke dalam organisasi kemasyarakatan, sehingga kaum perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga.

Meskipun kaum perempuan diberi wewenang dan hak untuk mengembangkan kariernya atau menerapkan disiplin ilmunya melalui organisasi kemasyarakatan maka mereka harus tetap tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Artinya urusan rumah tangga tidak dikesampingkan, ketika mereka terjun ke dalam organisasi. Maka dari itu sebagai perempuan yang mempunyai kelebihan, dalam artian mempunyai kemampuan dalam berorganisasi maka harus juga pandai dalam membagi waktunya yaitu jam berapa harus mengurus rumah tangganya dan waktu mana yang baik atau waktu luang untuk digunakan yang bermanfaat.

Dalam organisasi kemasyarakatan tidak ada unsur membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan baik dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing maupun tentang masalah pembagian tugas atau pekerjaan. Yang pada intinya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Pengklasifikasian jumlah responden menurut jenis kelamin sangat penting untuk mengetahui jumlah sesungguhnya dari responden baik laki-laki maupun perempuan yang berjumlah 45 orang. Artinya baik dari laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan atau tugasnya di organisasi tersebut, dimana semua pekerjaan bisa dilakukan oleh mereka tanpa harus memandang jenis kelaminnya.

4.2 Umur Responden

Pengelompokan umur responden dengan tujuan untuk mengetahui umur sebenarnya, responden tergolong muda atau sudah tua. Umur tidak menjadi jaminan seseorang dalam berorganisasi. Tua maupun muda mereka dapat menjadi anggota organisasi, dengan persyaratan yang harus dipenuhi, maka tidak akan menjadi masalah. Dimana mereka yang tergolong muda harus berusaha untuk mencari tahu dan bertanya kepada mereka yang sudah tua untuk berbagi pengalaman sehingga apabila yang muda menjadi anggota dalam suatu organisasi akan mudah dan lancar dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan bagi yang tua harus mau dan bersedia membantu mereka yang masih muda untuk memberi pengarahan sehingga dalam setiap pengambilan keputusan selalu sejalan dan sepakat. Artinya apabila aturan yang ada dan berlaku di dalam organisasi kemasyarakatan sudah diketahui oleh yang muda maka yang muda akan menyesuaikan dengan aturan main yang ada dalam organisasi tersebut sehingga kebulatan dan kesepakatan dalam berpendapat dapat tercapai.

Memang organisasi yang ada dalam masyarakat bagi orang yang tergolong muda sebagai ajang untuk belajar mengembangkan ide-ide yang baru. Sebab orang muda biasanya mempunyai banyak ide baru sehingga dari ide-ide baru tersebut dibahas dalam suatu rapat. Apa ide tersebut disetujui atau tidak demi kemajuan suatu organisasi yang akan datang. Dalam organisasi yang ada dalam masyarakat tidak ada unsur perbedaan dalam mengeluarkan pendapat baik dari yang tua maupun yang muda.

Boleh jadi mereka yang tergolong muda mempunyai banyak pengalaman dan besar manfaatnya dari gagasan-gagasan yang diajukan tersebut dibanding mereka yang lebih tua dan sudah lama ikut organisasi. Untuk itu antara yang tua dan muda yang terhimpun dalam suatu organisasi harus saling bekerjasama, saling memberi dan menerima masukan serta saling membantu demi terwujudnya suatu tujuan organisasi kemasyarakatan berdasarkan cita-cita yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 16. Kelompok Umur dari Responden

No.	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	27 - 33	7	15,56
2.	34 - 40	14	31,11
3.	41 - 47	9	20,00
4.	48 - 54	12	26,66
5.	55 - 61	3	6,67
Jumlah		45	100,00

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok umur responden yang terbanyak berusia antara 34 tahun - 40 tahun yaitu sejumlah 14 orang (31,11%). Sedangkan urutan kedua yang terbanyak berusia antara 48 tahun - 54 tahun yaitu sebanyak 12 orang (26,66%). Dan untuk yang berusia antara 41 tahun - 47 tahun berjumlah 9 orang (20%). Untuk yang berumur antara 27 tahun - 33 tahun sebanyak 7 orang (15,56%), sedangkan yang berusia antara 55 tahun - 61 tahun sejumlah 3 orang (6,67%).

Menjadi tokoh masyarakat maupun KSM tidak memandang umur, berapa saja umurnya bisa berperan seperti itu. Artinya inereka sudah dewasa. Disamping itu ketiga fasilitator kelurahan (faskel) memang masih muda. Karena mereka baru lulus dari Perguruan Tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat, KSM maupun fasilitator kelurahan (faskel) yang menjadi responden dari Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng tergolong masih muda.

4.3 Agama yang Dipeluk Responden

Untuk agama, secara keseluruhan responden memeluk agama Islam. Hal ini menandakan bahwa Kota Pasuruan termasuk kota agamis. Disamping itu terdapat juga di kota ini pondok-pondok pesantren (Ponpes). Oleh sebab itu masyarakat yang

berada di lingkungan sekitar pondok bisa terbawa arus sehingga baik segi akhlakanya maupun tingkat ibadahnya tinggi. Di kota Pasuruan, pondok pesantren yang terkenal dan terbesar adalah Pondok Pesantren K.H Abdul Hamid yang beraliran Salafiyah. Dan melihat tempat tinggal responden kebanyakan bermukim di sekitar pondok tersebut. Terbukti juga bahwa di Kecamatan Gadingrejo khususnya, jumlah prasarana atau tempat ibadah seperti langgar atau surau maupun masjid banyak sekali dibanding sarana ibadah agama lain. Selain itu Kota Pasuruan juga banyak terdapat orang keturunan arab dan sudah lama menetap di wilayah tersebut.

Memang menganut suatu agama itu penting sekali bagi setiap manusia. Lebih-lebih memeluk agama Islam, maka orang tersebut sudah mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah SWT. Maka berbahagialah bagi orang yang memeluk agama Islam. Karena agama Islam merupakan agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah SWT dan bagi pemeluknya akan mendapat jaminan hidup yang lebih baik di akhirat kelak. Tetapi juga harus konsekuen dengan identitasnya memeluk agama Islam yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Begitu juga berlaku pada agama lain. Berbeda dengan seseorang apabila tidak mempunyai agama maka hidupnya akan mengambang. Artinya dalam berbuat dan bertingkah laku tidak ada yang dianut.

4.4 Pendidikan Responden

Menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kata lain menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua orang. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan mempermudah dan banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi juga harus dilandasi dengan semangat, usaha dan berdo'a yang sungguh-sungguh. Pendidikan yang ditempuh semakin tinggi akan menambah dan memperbanyak pengetahuan, wawasan seseorang. Karena mereka di bangku pendidikan yang lebih tinggi banyak teman-temannya, dimana pengetahuan mereka sudah tinggi baik yang berasal dari pengalaman maupun informasi yang diperoleh sebelum duduk di bangku SLTA ataupun yang lebih tinggi. Seseorang yang menjalani

pendidikan yang lebih tinggi, pikiran mereka menjadi berkembang dan mulai menata ke masa depan untuk kehidupan yang akan datang yaitu mencapai kesuksesan dan keberhasilan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Untuk mengetahui pendidikan terakhir yang sudah diselesaikan oleh responden sebanyak 45 orang, dapat diketahui pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Pendidikan Terakhir dari Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
1.	Tamatan SD	4	8,89
2.	Tamatan SLTP	9	20,00
3.	Tamatan SLTA	21	46,67
4.	Perguruan Tinggi	11	24,44
Jumlah		45	100,00

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden banyak yang tamatan SLTA yaitu sejumlah 21 orang (46,67%). Hal ini menandakan bahwa pendidikan mereka termasuk tinggi. Sebab tingkat SLTA dianggap sudah dewasa baik pikiran maupun tenaganya. Artinya mereka yang telah tamat dari SLTA mampu mengembangkan dirinya melalui suatu pekerjaan baik pekerjaan yang sifatnya kasar maupun halus. Berhubungan dengan tugas sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan maka apabila seseorang mempunyai pendidikan yang tinggi maka mereka akan mudah melakukan semua tugas yang harus dikerjakan menurut jabatan yang disandangnya. Dengan pendidikan yang tinggi maka dalam mengerjakan tugas di organisasi tersebut, sedikit-tidaknya sudah pernah diperoleh atau didapatkan sewaktu belajar di SLTA. Dengan kata lain sudah menjadi kebiasaan melakukan pekerjaan tersebut atau pernah berpengalaman.

Ada juga yang tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 11 orang atau 24,44%. Demikian juga untuk yang tamat SLTP sebanyak 9 orang (20%). Hal ini tergolong

cukup baik. Karena pendidikan di Indonesia minimal, seseorang harus menempuh wajib belajar selama 9 tahun yaitu setingkat SLTP. Untuk yang tamatan SD sejumlah 4 orang (8,89%) yaitu KSM-KSM yang bekerja wiraswasta. Alasan para KSM hanya tamatan SD dikarenakan sejak kecil mereka dalam kehidupan yang selalu kekurangan. Untuk makan saja mereka kesulitan, lebih-lebih untuk biaya sekolah akhirnya mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu mereka berjualan (mracang). Karena modal hanya sedikit maka jualannya hanya kecil-kecilan saja. Oleh sebab itu para KSM tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dana dari P2KP untuk membuka usahanya agar lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang ada di ketiga kelurahan meliputi Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng termasuk orang yang berpendidikan tinggi.

4.5 Status Perkawinan Responden

Pengelompokan responden menurut status dianggap sangat penting untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dari seluruh responden, sudah menikah atau belum. Di dalam organisasi kemasyarakatan, seseorang yang sudah menikah atau belum dalam pembagian tugas tidak ada unsur perbedaan. Boleh jadi yang belum menikah, pengalaman dan kepandaianya melebihi mereka yang sudah menikah. Untuk mengetahui lebih jelasnya penulis rinci pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Status Perkawinan dari Responden

No.	Status Perkawinan	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
1.	Kawin	36	80,00
2.	Belum Kawin	7	15,56
3.	Duda	1	2,22
4.	Janda	1	2,22
Jumlah		45	100,00

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang berstatus kawin berjumlah 36 orang (80%). Hal ini berarti mereka pada umumnya sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Dalam pengertian bahwa mereka tergolong dapat mandiri. Dengan status sudah kawin maka mereka setidaknya-tidaknya mempunyai pengalaman selama hidupnya. Sedangkan responden yang belum kawin sebanyak 7 orang (15,56%). Untuk duda dan janda masing-masing hanya 1 orang (2,22%).

Sedangkan bagi responden yang bersatus belum kawin dan mereka telah berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan dirinya bahwa ia juga mampu berorganisasi sehingga banyak orang mengetahui keberadaannya. Dengan berorganisasi banyak manfaat yang didapatkannya. Lebih-lebih ia menjabat di dalam organisasi kemasyarakatan paling menonjol maka ia akan cepat dan mudah dikenal oleh banyak orang.

Disamping itu jika didukung dengan adanya sifat aktif, rajin dan jujur maka orang lain akan mengenangnya. Meskipun suatu saat nanti sudah mengalami pergantian pengurus. Seseorang yang telah berjasa atau mempunyai kelebihan dan idenya bermanfaat bagi semua masyarakat, walaupun sudah diganti pengurusnya tetapi masih sering dijadikan sebagai bahan pembicaraan oleh banyak orang. Tentunya mengarah kepada pembicaraan yang sifatnya baik.

4.6 Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannya di Dalam Masyarakat

Organisasi yang ada didalam masyarakat menjadikan berjalan tidaknya suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada semua anggota organisasi tersebut baik dari pengurus inti maupun anggota yang terhimpun didalamnya, dimana tugasnya sudah dibagi menurut jabatan masing-masing. Meskipun ada jabatan dari masing-masing pengurus, tetapi didalam menjalankan tugas tidak membeda-bedakan pendapat antara ketua, sekretaris, bendahara maupun dari anggota.

Semua pendapat diterima. Karena belum tentu pendapat dari seorang ketua selamanya benar. Bolah jadi yang menjadi anggota, pendapatnya lebih mengarah

pada sasaran atau tujuan. Maka dari itu semua pengurus organisasi dan anggotanya mendapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan setiap keputusan berdasarkan hasil dari rapat tersebut. Pengurus organisasi yang ada dalam masyarakat seperti ditingkat RT/RW mempunyai tugas dan wewenang masing-masing berdasarkan jabatannya. Misalkan seorang ketua mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar serta menjadi panutan atau contoh anggota lainnya dalam memimpin suatu organisasi tersebut. Begitu juga pengurus lain mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dengan baik Untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatannya di Dalam Masyarakat

No.	Jabatan di Dalam Masyarakat	Frekuensi (orang)	Prosentase (%)
1.	Ketua RT	11	24,44
2.	Ketua RW	10	22,22
3.	KSM	21	46,67
4.	Fasilitator Kelurahan	3	6,67
Jumlah		45	100,00

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak adalah jumlah KSM yaitu sebanyak 21 orang (46,67%) baik dari Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng. Berarti masing-masing kelurahan ada 7 orang. Untuk Ketua RT sejumlah 11 orang (24,44%), Ketua RW berjumlah 10 orang (22,22%). Dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) berjumlah 3 orang (6,67%), dimana tiap-tiap kelurahan terdiri dari 1 orang fasilitator kelurahan (faskel). Untuk Ketua RT/RW diambil setiap RT yang daerahnya berdekatan antara RT/RW yang satu dengan yang lainnya di setiap kelurahan.

Responden yang menjadi perwakilan baik dari tokoh masyarakat, KSM maupun fasilitator kelurahan (faskel) akan memberikan informasi yang benar tentang kinerja BKM nya masing-masing. Karena suatu lembaga dapat dikatakan baik atau

buruk yang dapat menilai adalah orang luar. Maksudnya, meskipun ketiga perwakilan yang terpilih menjadi responden juga ikut terlibat dan menjadi bagian dari P2KP. Tetapi mereka tidak semuanya termasuk pengurus BKM. Jadi responden tersebut akan menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan apabila kinerja BKM nya kurang baik, tetapi jika dikatakan sudah baik maka akan merugikan BKM tersebut dalam menjalankan perannya. Maka dari itu penulis mengambil responden tersebut. Karena mereka nantinya akan menjawab dengan sebaik-baiknya.

Untuk semua KSM mempunyai tugas dan peran yaitu sebagai kelompok yang menjalankan dan memanfaatkan bantuan dana dari P2KP yang lebih berguna. KSM yang benar-benar berusaha dengan baik dari pinjaman dana tersebut dan ia mendapat keuntungan yang lebih besar dari hasil usahanya maka pada saat jatuh tempo waktu yang telah ditentukan untuk mengangsur, mereka akan mudah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Artinya angsuran dibayar tepat pada waktunya. Sedangkan untuk fasilitator kelurahan (faskel), mereka juga mempunyai tugas masing-masing yaitu membantu KSM maupun BKM yang mempunyai kesulitan dalam menjalankan perannya.

BAB V

ANALISA DATA

Setelah data dari hasil kuesioner maupun dari interview diperoleh, maka disini penulis akan mengadakan penganalisaan data. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif dan dibantu dengan data kuantitatif seperti yang sudah dijelaskan pada BAB I di bagian Metode Penelitian tentang Analisa Data. Analisa data sangat penting untuk mengetahui hasil kinerja dari BKM sebagai jantungnya P2KP mampu atau tidak dalam memberdayakan kelembagaan komunitas lokal melalui perannya dalam lembaga tersebut. Disamping itu adanya penganalisaan data akan memudahkan pembaca dalam memahami keberadaan P2KP dan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan secara rinci.

Dalam menganalisa data ini, penulis menghitung derajat kinerja BKM tiap kelurahan yang menjadi obyek sasaran dalam penelitian ini meliputi Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Trajeng sehingga dapat diketahui dari tabel tersebut, BKM pada kelurahan mana yang kinerjanya paling baik selama ini. Untuk itu penulis akan menjabarkan tentang Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) berdasarkan aspek penilaian yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut :

5.1 Adanya aturan main yang adil dan disepakati bersama.

Maksudnya bahwa aturan-aturan yang ada pada institusi lokal itu sifatnya mengatur dan memaksa setiap anggota yang terlibat sepenuhnya pada institusi tersebut demi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan bersama.

5.1.1 Aturan Pengambilan Keputusan

a. Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tentang lembaga BKM yaitu diperoleh hasil keputusan yang adil dan jujur serta keputusan berguna bagi keberlanjutan lembaga tersebut maka seluruh

anggota BKM selain mematuhi aturan main dalam pengambilan keputusan tersebut yang sudah ditetapkan juga harus konsisten dalam menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat dari hasil rapat tersebut. Berarti apabila kedua hal tersebut diperhatikan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota dengan baik maka tujuan pengambilan keputusan di BKM tercapai, dimana proses dan prinsip P2KP ditegakkan. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel tentang kinerja BKM pada tiap-tiap kelurahan berkaitan dengan tujuan dan proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Tanggapan Responden Tentang Kinerja BKM Terhadap Perumusan Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	3 (20 %)	7 (46,66 %)	3 (20 %)	1 (6,67 %)	1 (6,67 %)	15 (100 %)
2.	Karanganyar	3 (20 %)	9 (60 %)	2 (13,33 %)	1 (6,67 %)	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	2 (13,33 %)	8 (53,33 %)	4 (26,67 %)	1 (6,67 %)	-	15 (100 %)
Jumlah		8	24	9	3	1	45
Keseluruhan		(17,78 %)	(53,33 %)	(20 %)	(6,67 %)	(2,22 %)	(100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Karanganyar menunjukkan kinerja yang paling baik terhadap tujuan proses pengambilan keputusan yaitu dalam menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat secara konsisten yang didasarkan pada jawaban responden sejumlah 9 orang (60%) dibanding BKM pada kelurahan lainnya. Artinya pada

Kelurahan Karanganyar baik pengurus maupun anggotanya secara keseluruhan, berpedoman sepenuhnya pada aturaan-aturan dalam pengambilan keputusan yang berpegang pada prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi sehingga keputusan yang diambil diperoleh suatu keputusan yang adil dan nantinya akan berguna bagi kehidupan lembaga BKM dalam menjalankan perannya untuk dimasa yang akan datang.

Dimana aturan tersebut dibuat sendiri, maka apabila tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh anggota BKM berarti mereka tidak konsekuen dengan aturan yang telah dibuatnya. Karena aturan dibuat sendiri, misalkan yang membuatnya saja tidak mematuhi maka wajarlah kalau orang lain tidak mematuhi juga. Lain halnya jika si pembuat aturan mematuhi segala aturan yang ada maka orang lain akan mencontohnya.

b. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan menyangkut tentang tata cara atau kinerja dalam proses pengambilan keputusan di lembaga BKM sampai menghasilkan keputusan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam mekanisme pengambilan keputusan dibutuhkan keterlibatan langsung dari anggota BKM dan sekaligus sebagai subyek yang menjalankan hasil keputusan yang diambil. Jika anggota BKM aktif dan baik dalam menjalankan perannya dalam proses pengambilan keputusan berarti mereka telah mematuhi aturan main yang berlaku. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja BKM pada mekanisme pengambilan keputusan, penulis rinci pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Tanggapan Responden Tentang Kinerja BKM Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	4 (26,67 %)	8 (53,33 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	4 (26,67 %)	10 (66,66 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	3 (20 %)	9 (60 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		11 (24,44 %)	27 (60 %)	7 (15,56 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BKM pada Kelurahan Karanganyar kinerjanya dalam mekanisme pengambilan keputusan menunjukkan kinerja paling baik berdasarkan penilaian responden sebanyak 10 orang (66,66%). Maksudnya pada Kelurahan Karanganyar, anggota BKM terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain anggota aktif (*active member-based organization*) mulai dari awal akan diadakannya kegiatan untuk mengambil keputusan. Keputusan tersebut menyangkut musyawarah tentang wakil masyarakat yang akan menjadi anggota BKM, aturan-aturan tentang kerja yang harus dilaksanakan oleh anggota BKM yang terpilih maupun yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang menjadi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yaitu suatu kelompok yang menerima bantuan dana. Sehingga dengan keterlibatan dari semua anggota masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan maka tujuan dalam menanggulangi kemiskinan akan berhasil, karena semua pihak mengetahui aturan apa saja yang harus dikerjakan dan wakil mereka yang terpilih sesuai dengan keinginan

serta prestasi yang mereka miliki untuk berhak menjadi anggota BKM. Untuk itu dengan adanya keikutsertaan dari seluruh anggota masyarakat maka mereka akan mematuhi aturan yang berlaku didalam BKM nya demi kepentingan bersama.

5.1.2 Pembagian Tugas

a. Distribusi Kekuasaan

Dalam suatu lembaga pasti ada pembagian tugas terhadap anggotanya. Begitu juga pada BKM mereka mendapatkan kewenangan untuk menjalankan tugas berdasarkan perannya masing-masing serta aktivitas yang dilakukan oleh anggota. Untuk itu keberadaan dan keterlibatan dari anggota BKM sangat membantu dalam pelaksanaan program P2KP untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan tepat sasaran. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan tentang distribusi kekuasaan untuk anggota BKM sebagai berikut :

Tabel 22. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Distribusi Kekuasaan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	5 (33,33 %)	7 (46,67 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	3 (20 %)	10 (66,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	4 (26,67 %)	8 (53,33 %)	2 (13,33 %)	-	1 (6,67 %)	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		12 (26,67 %)	25 (55,55 %)	7 (15,56 %)	-	1 (2,22 %)	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 10 orang (66,67%) responden dari Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam memberikan penilaian baik terhadap kinerja BKM nya dibanding responden dari kelurahan lain. Berarti BKM di Kelurahan Karanganyar anggotanya sudah termasuk baik dalam keterlibatannya untuk menjalankan aktivitas dan kewenangan sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Berarti pada kelurahan tersebut kekuasaan tidak bertumpu pada satu orang saja (pemimpin) ataupun pada pengurusnya saja. Tetapi semua anggota yang terlibat dalam BKM secara langsung melaksanakan aktivitasnya berdasarkan peran masing-masing baik tentang tugas maupun pengambilan setiap keputusan dalam upaya membantu menanggulangi kemiskinan. Ada 1 orang (6,67%) dari Kelurahan Trajeng yang menilai "buruk sekali" terhadap kinerja BKM nya. Artinya pada BKM Kelurahan Trajeng dalam kinerjanya ada anggota yang belum terlibat dalam menjalankan aktivitas dan kewenangan berdasarkan perannya.

b. Corak Kepemimpinan

Corak kepemimpinan suatu lembaga sangat penting, sebab akan menentukan keberhasilan terhadap lembaga tersebut. Apabila seorang pemimpinnya adil dan tegas maka hasilnya akan baik dan apabila pemimpinnya tidak adil maka hasilnya tidak baik terhadap lembaga yang dipimpinnya. Begitu juga pada BKM itu sendiri bahwa anggota mempunyai peran sebagai fasilitator bagi KSM. Apabila anggota BKM dalam memberikan fasilitas dan pelayanan baik maka KSM akan menjalankan kegiatan dengan baik, sedangkan apabila anggota BKM dalam memfasilitasi dan melayani tidak baik maka KSM tidak akan mematuhi aturan yang berlaku. Untuk itu anggota BKM dalam hal ini harus mampu secara nyata memberikan pelayanan dan membantu warga masyarakat setempat (khususnya anggota KSM) didalam menjalankan kegiatannya dengan baik. Untuk lebih mengetahui kinerja BKM tentang corak kepemimpinan, maka penulis sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 23. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Corak Kepemimpinan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	8 (53,33 %)	6 (40 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	4 (26,67 %)	8 (53,33 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	5 (33,33 %)	7 (46,67 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah		17	21	7	-	-	45
Keseluruhan		(37,77 %)	(46,67 %)	(15,56 %)			(100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Karanganyar anggota BKM nya menunjukkan kinerja paling baik yaitu ternyata mereka mampu berperan sebagai fasilitator (pihak yang memfasilitasi warga) khususnya anggota KSM agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik yang didasarkan pada penilaian responden sebanyak 8 orang (53,33%). Berarti dalam hal ini, BKM Kelurahan Karanganyar kinerja anggota BKM nya mampu memberikan fasilitas yang memadai baik berupa fisik yang berupa dorongan untuk melakukan usaha yang modalnya diperoleh dari pinjaman kredit dan cara pengembaliannya setiap bulan sekali diangsur sesuai dengan perjanjian, memberikan nasihat apabila ada KSM yang bermalas-malasan dalam menjalankan kegiatan usahanya, manampung segala keluh kesah dari KSM selama berusaha, menyediakan kotak saran yang berguna untuk kemajuan BKM sekaligus penilaian kinerja BKM nya. Kemungkinan dalam kinerja BKM kurang baik dalam memberikan pelayanan pada KSM yang berakibat buruk bagi masa depan KSM. Sedangkan dalam bentuk materi dengan memberikan pinjaman uang secara kredit.

c. Peran Anggota BKM

Sebagai anggota BKM dalam menjalankan suatu tugas tidak akan lepas dari perannya. Dalam memainkan perannya mereka dapat wujudkan melalui pelaksanaan semua tugas yang telah dibagi secara adil. Maksudnya secara ideal anggota BKM yang terpilih melalui proses yang demokrasi didalam Rembug Warga diharapkan mampu berperan sebagai pengambil inisiatif baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan program P2KP khususnya dan penanganan masalah-masalah kemiskinan di kelurahan atau desa setempat. Untuk mengetahui lebih jelas tentang peran anggota dari ketiga BKM maka penulis sajikan dalam tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Peran Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	3 (20 %)	8 (53,33 %)	4 (26,67 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	3 (20 %)	9 (60 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	5 (33,34 %)	8 (53,33 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah		11	25	9	-	-	45
Keseluruhan		(24,44 %)	(55,56 %)	(20 %)			(100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) responden dari Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam memberikan penilaian baik terhadap kinerja BKM dibanding responden dari kelurahan lain. Berarti anggota

BKM di Kelurahan Karanganyar sudah memenuhi perannya sebagai pengambil inisiatif perencanaan dan pelaksanaan. Artinya setiap anggota yang berkecimpung dalam BKM, mereka mempunyai wewenang dan hak untuk merencanakan suatu kegiatan dengan mengupayakan segala tenaga, pikiran maupun materi yang berguna bagi kemajuan BKM yang akan datang supaya keberadaannya diterima oleh masyarakat selamanya.

Disamping itu anggota BKM jugagugus sebagai pelaksana untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itu antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu wadah yaitu BKM harus selalu mengadakan kerjasama yang baik, keseragaman dalam langkah sehingga apabila ada inisiatif atau gagasan cepat disepakati bersama dan akhirnya membuahkan hasil yang bermanfaat.

5.2 Adanya institusi atau lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan aturan main secara jujur dan terbuka.

Maksudnya bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk membangun kembali kehidupan masyarakat madani yang mampu mengatasi secara mandiri tentang masalah kemiskinan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya.

5.2.1 Proses Pembentukan BKM

a. Proses Pembentukan BKM

Untuk menyalurkan dana P2KP agar sampai kepada KSM yang berhak menerima bantuan tersebut maka P2KP harus membentuk lembaga BKM yang akan dipandu oleh seorang fasilitator kelurahan pada BKM masing-masing. BKM merupakan model kelembagaan lokal ditingkat bawah, oleh sebab itu dalam proses pembentukannya didasarkan atas kepentingan warga sehingga dengan adanya BKM, KSM yang mempunyai kesulitan baik tentang kegiatan usaha maupun pengembalian kredit semua masalah akan ditampung, setelah pada rapat BKM akan dibahas dan dicarikan pemecahannya.

Maka dari itu dalam proses pembentukan BKM agar sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip P2KP serta menjadi lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, ada 2 aturan umum yang harus dipenuhi yaitu *tahap persidangan* (baik persidangan untuk memilih delegasi atau wakil maupun persidangan untuk memilih anggota BKM), dan *tahap penetapan delegasi atau wakil* yang berperan mengambil keputusan-keputusan strategis. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap kinerja BKM tentang proses pembentukan pada 3 BKM, penulis sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 25. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Proses Pembentukan BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	8 (53,33 %)	6 (40 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	9 (60 %)	4 (26,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	6 (40 %)	7 (46,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah		23	17	5	-	-	45
Keseluruhan		(51,11 %)	(37,78 %)	(11,11 %)			(100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan Karanganyar, proses pembentukan BKM nya menunjukkan kinerja baik sekali dimana prosesnya dibentuk dari “bawah” dan atas kepentingan warga, program P2KP dijalankan serta pembentukannya menggunakan teknik pendekatan dan partisipatif dibanding BKM lain. Artinya semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil mereka yang cocok dan layak menjadi pengurus BKM. Karena

anggota BKM diambil dari anggota masyarakat itu sendiri yang mempunyai kedudukan dan potensi yang lebih tinggi di dalam masyarakatnya dibanding anggota yang lain. BKM yang dibentuk juga untuk kepentingan warga, dimana kehadirannya sangat membantu masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan.

Jika proses pembentukan BKM tidak dikehendaki oleh masyarakat baik yang menyangkut pengajuan calon yang akan menjadi wakil masyarakat hingga proses pelaksanaan maka pembentukan BKM tidak dilanjutkan sampai membawa hasil sehingga program yang direncanakan juga tidak berlaku untuk diterapkan pada kelurahan tersebut dan masyarakat tidak berhak mematuhi aturan tersebut.

Untuk mencegah proses pembentukan BKM yang tidak disetujui masyarakat maka harus digunakan pendekatan secara halus, berhadap-hadapan tanpa emosi agar anggota masyarakat lain sepakat terhadap pendapat anggota lain dalam mencalonkan wakil masyarakat untuk menjadi anggota BKM serta partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh warga masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin.

b. Pengaruh Dari Luar

Dalam proses pembentukan BKM, pengaruh luar tidak begitu penting. Karena dibentuk atas kehendak dari warga atau masyarakat setempat saja dan BKM harus otonom dalam menjalankan tugasnya, dimana bantuan dana P2KP itu diberikan pada wilayah tersebut. Jadi pada waktu BKM dibentuk hanya masyarakat setempat dan yang berkepentingan menghadiri rapat tersebut. Keberadaan dari warga setempat sangat membantu dalam memberikan pendapat, usulan, masukan maupun saran yang berguna bagi kelancaran proses pembentukan BKM hingga diketahui hasil keputusan rapat, pengurus serta tugas masing-masing dari pengurus inti maupun untuk anggota BKM. Untuk lebih jelasnya tentang pengaruh dari luar di masing-masing BKM dapat disimak pada tabel di bawah ini :

Tabel 26. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Pengaruh Dari Luar di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	7 (46,67 %)	6 (40 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	9 (60 %)	5 (33,33 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	7 (46,67 %)	7 (46,67 %)	1 (6,66 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		23 (51,11 %)	18 (40 %)	4 (8,89 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari data tabel di atas dapat dilihat, Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah responden terbanyak yang menilai baik sekali terhadap kinerja BKM nya yaitu berjumlah 9 orang (60%). Berarti BKM pada kelurahan ini kinerjanya sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu pengaruh dari luar relatif rendah dibanding masyarakat setempat dimana bantuan dana P2KP diberikan pada wilayah tersebut, BKM yang terbentuk atas kehendak warga dan relatif bersifat otonom. Karena proses pembentukan BKM cenderung berorientasi pada masyarakat yang ada di kelurahan itu sendiri maka tidak ada unsur campur tangan dari BKM kelurahan lain, yang tujuannya untuk memberikan suara maupun membantu dalam pelaksanaan kerja pembentukan BKM. Tetapi mereka percaya pada kemampuan yang dimiliki. Sebab biasanya pengaruh dari luar itu ada yang sifatnya positif dan ada juga yang negatif. Jika positif tidak menjadi masalah. Tetapi dikhawatirkan justru kearah negatif yang ingin mempengaruhi kinerja anggota BKM supaya tidak tercapai tujuannya sehingga BKM yang dipengaruhi kalah dalam saingan.

5.2.2 Kelembagaan BKM

a. Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota

Untuk kelembagaan BKM sifat kepemimpinannya harus berorientasi ke "bawah". Maksudnya anggota BKM selalu mengutamakan masyarakat bawah khususnya KSM sebagai sasaran dalam melaksanakan kinerjanya sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu mereka dalam mengatasi masalahnya terutama tentang penanganan masalah kemiskinan. Sedangkan loyalitas anggota BKM dapat diwujudkan dalam bentuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Jadi seluruh tugas maupun pekerjaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan berkurang beban penderitaannya. Untuk lebih jelasnya tentang orientasi kepemimpinan dan loyalitas dari anggota BKM dapat disimak pada tabel di bawah ini :

Tabel 27. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	5 (33,33 %)	7 (46,67 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	5 (33,33 %)	9 (60 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	5 (33,33 %)	8 (53,34 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah		15	24	6	-	-	45
Keseluruhan		(33,33 %)	(53,34 %)	(13,33 %)			(100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam menilai kinerja BKM nya yaitu sebanyak 9 orang (60%) maka BKM pada kelurahan ini paling baik dalam kepemimpinannya yang selalu berorientasi ke bawah dan mayoritas anggota BKM dalam menjalankan tugasnya hanya untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian lembaga BKM ada atau tidaknya tergantung sepenuhnya pada anggota masyarakat, mulai dari awal pembentukan hingga pelaksanaan tugas tetap berorientasi pada masyarakat. Karena keberadaan BKM tersebut atas inisiatif masyarakat dan tujuannya kembali pada masyarakat sendiri yaitu memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik.

Dalam kelembagaan BKM loyalitas dari anggota BKM terhadap lembaga BKM harus tinggi dan berpegang teguh untuk mengabdikan kepada masyarakat. Artinya terselenggaranya semua kegiatan yang berhubungan dengan kinerja BKM maka anggota masyarakat memiliki peluang yang sama untuk terlibat didalam BKM tanpa memandang kondisi sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, status perkawinan, suku bangsa maupun agama dan mereka harus terjun secara langsung ke lapangan untuk membantu menanggulangi kemiskinan supaya tidak ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

b. Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Di BKM, model kepemimpinan yang diharapkan adalah bersifat kolektif (atas nama kelompok) atau tidak bertumpu pada satu orang saja atau yang paling menonjol (*one man show*). Dan proses pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah BKM atau setidaknya dilakukan dengan suara terbanyak. Maksudnya bahwa hasil keputusan yang diambil berpedoman pada musyawarah atau suara terbanyak dan bukan merupakan pendapat dari satu orang saja sehingga dari hasil keputusan tersebut berlaku bagi seluruh anggota BKM. Untuk lebih jelasnya tentang kinerja BKM terhadap model kepemimpinan dan pengambilan keputusan penulis sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 28. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	5 (33,33 %)	8 (53,34 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	3 (20 %)	10 (66,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	4 (26,67 %)	9 (60 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		12 (26,67 %)	27 (60 %)	6 (13,33 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 10 orang (66,67 %) responden dari Kelurahan Karanganyar yang paling banyak menilai baik terhadap BKM nya dibanding responden dari BKM pada kelurahan lain. Berarti BKM di kelurahan ini kinerjanya sudah baik tentang model kepemimpinannya bersifat kolektif dan tidak berpedoman pada satu orang saja serta pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah atau suara terbanyak.

Karena lembaga BKM berorientasi pada masyarakat maka kepemimpinannya bersifat kelompok, tidak tergantung pada satu individu saja yang berkuasa. Meskipun individu tersebut mempunyai kelebihan disegala bidang, tetapi belum tentu menjadi wakil sebagai seorang pemimpin. Tetapi persamaan pendapat dan tujuan bersama yang terhimpun dalam kelompok diutamakan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan di lembaga BKM baik itu untuk pemilihan anggota BKM maupun hal-hal yang berhubungan dengan keputusan tentang BKM maka dilakukan dengan cara bermusyawarah. Melalui musyawarah

untuk mufakat akan dihasilkan keputusan yang adil dan sah yang berguna bagi kelancaran pekerjaan. Jika untuk pengambilan keputusan sudah melalui musyawarah tetapi belum mencapai suatu kesepakatan dan kebulatan pendapat maka dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak. Keputusan dapat dinyatakan sah dan dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak ataupun menjadi aturan baru yang mengikat seluruh anggota BKM agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, apabila suara banyak yang menang atau dominan.

5.2.3 Tujuan BKM

a. Tipe dan Tingkat Partisipasi

Dalam hal ini tentang kinerja BKM terhadap aspek tipe dan partisipasi maka anggota BKM dituntut mempunyai partisipasi penuh, aktif dan konsisten dalam pengambilan keputusan maupun dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing untuk tercapainya tujuan program P2KP serta pengelompokan anggota BKM terjadi atas dasar kesadaran akan kepentingan bersama sehingga nilai solidaritas antara sesama warga masyarakat tumbuh lagi dan selalu berpihak pada masalah orang miskin. Jadi jelas tujuan BKM sebagai wadah berbagai aktivitas dari warga masyarakat dan meningkatkan kekuatan untuk membantu masyarakat miskin dalam menanggulangi persoalan yang dihadapi oleh mereka. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja BKM terhadap tipe dan tingkat partisipasi dapat disimak pada tabel di bawah ini :

Tabel 29. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Tipe dan Tingkat Partisipasi di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	6 (40 %)	7 (46,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	9 (60 %)	4 (26,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	7 (46,67 %)	5 (33,33 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		22 (48,88 %)	16 (35,56 %)	7 (15,56 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan Karanganyar paling banyak menilai baik sekali tentang kinerja BKM nya. Berarti BKM di kelurahan ini tipe dan tingkat partisipasi dari anggotanya aktif, penuh dan konsisten serta pengelompokan anggota BKM terjadi atas dasar kesadaran akan kepentingan bersama sehingga berpihak pada masalah orang miskin. Dengan demikian anggota BKM mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin.

Bentuk dari partisipasi anggota BKM adalah mereka menjalankan tugasnya berdasarkan perannya masing-masing dan merupakan suatu kesadaran yang timbul dari dalam individu yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota BKM. Apabila partisipasi muncul dari semua anggota BKM maka pencapaian tujuan akan cepat tercapai yaitu membantu menangani masalah kemiskinan. Maka dari itu didalam mencapai tujuan, masyarakat miskinlah yang selalu menjadi obyeknya. Karena dengan berpihak pada masyarakat miskin (melihat ke bawah) maka hati kita

akan tergugah secara sendirinya untuk segera ingin membantunya dari kenyataan yang benar-benar terjadi yaitu muncul suatu usaha untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan mapan.

b. Kondisi Komunikasi

Keberadaan BKM banyak menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sebab seseorang yang dulunya tidak dikenal dengan yang lain, karena letak antara RT yang satu dengan RT yang lainnya saling berjauhan. Tetapi dengan adanya BKM mereka saling bertemu sehingga mereka sering mengadakan komunikasi dan komunikasi yang terjadi adalah dua arah. Dimana mereka saling bertukar pendapat, saling memberi dan saling menerima akhirnya antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya saling melengkapi membicarakan tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan P2KP sehingga tujuan BKM didirikan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan sesama warga masyarakat dapat terwujud.

Disamping itu tujuan BKM sebagai lembaga forum musyawarah juga diterapkan, dimana pada waktu rapat BKM diadakan semua anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat dari anggota diterima dan tidak ada unsur perbedaan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi komunikasi pada BKM di tiap-tiap kelurahan, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 30. Tangapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Kondisi Komunikasi di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	4 (26,67 %)	9 (60 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	9 (60 %)	5 (33,33 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	8 (53,34 %)	5 (33,33 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		21 (46,67 %)	19 (42,22 %)	5 (11,11 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan Karanganyar terbanyak yang menilai baik sekali terhadap kinerja BKM nya. Berarti BKM di Kelurahan Karanganyar komunikasi yang terjadi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain baik sekali. Dengan kata lain komunikasi terjadi dua arah dan semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Di dalam lembaga BKM, komunikasi yang terjadi antara pihak pengurus, anggota maupun pada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) harus ada hubungan yang timbal balik (dua arah) sehingga pengurus akan memahami dan mengetahui segala permasalahan, hambatan yang dialami oleh KSM baik dalam proses pembentukan BKM hingga penyaluran dana. Maka dari itu dengan adanya informasi maupun keluhan yang diberikan oleh KSM, pengurus BKM akan segera menanggapi dan mencari solusi yang terbaik.

Begitu juga apabila ada pengumuman dari pusat yang berkaitan dengan KSM maka BKM segera memberitahukan kepada KSM agar segera dilaksanakan dan dipatuhi semua aturan yang berasal dari pusat tersebut. Disamping itu KSM, setiap 3 bulan sekali diberikan kuesioner (daftar pertanyaan) untuk mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja BKM, kemudian oleh pihak Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), kuesioner yang telah diisi dikumpulkan dan dihitung untuk mengetahui seberapa jauh kinerja BKM sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam mengemban tugasnya. Semua anggota yang terhimpun dalam BKM mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya sebatas pendapatnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku di BKM.

5.3 Adanya kesadaran kolektif seluruh warga komunitas.

Maksudnya bahwa proses kesadaran yang ada pada suatu kelompok untuk mematuhi aturan-aturan permainan yang ada.

5.3.1 Menjaga Aturan Main

a. Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik

Apabila dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada rapat BKM muncul perbedaan pendapat dari para anggotanya maka dari perbedaan pendapat tersebut segera diambil suatu tindakan yaitu bersama-sama untuk menyelesaikan dan sejauh mungkin mencari jalur keluar supaya pendapat yang berbeda tadi dapat menyatu sehingga diperoleh kebulatan pendapat yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam satu wadah yaitu BKM. Karena hasil keputusan nanti akan mempengaruhi bagi keberlanjutan pelaksanaan program P2KP. Jadi hasil keputusan mendapat kesepakatan bersama bukan berpihak pada satu pendapat atau keputusan yang diambil berat sebelah. Untuk lebih jelasnya tentang kinerja BKM terhadap langkah yang diambil apabila terjadi perbedaan pendapat dan manajemen konflik di tiap-tiap kelurahan dapat disimak pada tabel di bawah ini :

Tabel 31. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	7 (46,67 %)	6 (40 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	9 (60 %)	5 (33,33 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	8 (53,34 %)	5 (33,33 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		24 (53,33 %)	16 (35,56 %)	5 (11,11 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan Karanganyar menunjukkan jumlah terbanyak dalam menilai baik sekali terhadap BKM nya. Berarti apabila terjadi perbedaan pendapat dan konflik di BKM Kelurahan Karanganyar segera mencari jalan keluar yang nantinya akan bermanfaat bagi semua anggota. Apabila anggota yang satu mempunyai pendapat yang berbeda dengan anggota yang lain tentang pemilihan calon pengurus BKM, penentuan aturan maka diselesaikan secara bersama supaya tidak sampai mengarah pada perselisihan pendapat. Karena nantinya akan membawa dampak yang buruk terhadap hasil keputusan BKM yang diambil dan menghambat pada proses pencapaian tujuan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, lebih-lebih semua anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Disamping itu jika terjadi pendapat yang berbeda maka anggota mencari jalan keluar yang pada intinya saling menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) sehingga akan mengurangi timbulnya konflik. Adanya konflik didalam suatu lembaga

BKM akan merugikan pada anggota yang lain yang tidak mempunyai masalah terutama dalam menjalankan tugas anggota lain. Karena anggota tersebut dalam satu wadah. Jadi apabila anggota yang satu bermasalah maka anggota yang lain terpengaruh terhadap aktivitasnya dalam usaha pencapaian tujuan bersama.

b. Hubungan Kerja Anggota BKM

BKM yang menjadi forum milik masyarakat dan sebagai institusi yang mendapat kepercayaan dari masyarakat maka hubungan kerja yang dikembangkan antara para anggota yang satu dengan anggota yang lain harus bersifat informal dan tidak kaku, akrab dan bersuasana saling mendukung serta tidak ada unsur paksaan. Apabila sampai saat ini anggota BKM tetap menjalankan hubungan tersebut dengan baik, berarti mereka menjaga aturan main yang telah disepakati bersama. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hubungan kerja antara para anggota BKM tiap-tiap kelurahan maka dalam hal ini, penulis rinci pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Hubungan Kerja Anggota BKM di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	6 (40 %)	5 (33,33 %)	3 (20 %)	1 (6,67 %)	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	8 (53,33 %)	4 (26,67 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	7 (46,67 %)	6 (40 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		21 (46,67 %)	15 (33,33 %)	8 (17,78 %)	1 (2,22 %)	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 orang (53,33%) dari Kelurahan Karanganyar menunjukkan kinerja para anggota BKM nya baik sekali terhadap hubungan kerja yang dikembangkan yaitu bersifat informal dan tidak kaku, akrab dan bersuasana saling mendukung. Memang dalam kehidupan di suatu lembaga terutama BKM yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan perannya maka hubungan kerja yang terjadi antara anggota yang satu dengan yang lain harus bersifat informal dan tidak kaku, agar didalam pelaksanaan semua pekerjaan cepat selesai. Artinya hubungan yang berlangsung tidak resmi, santai asalkan tetap berpegang pada azas keadilan, kejujuran, kesetaraan gender, kemitraan dan kesederhanaan. Bahkan prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. Dengan berpedoman pada azas dan prinsip tersebut maka tujuan akan tercapai.

Disamping itu keakraban antara anggota yang satu dengan yang lain harus terjalin dengan baik dalam upaya pencapaian tujuan. Dengan saling akrab, apabila anggota yang satu mempunyai masalah dalam pekerjaannya maka mereka tidak akan merasa malu untuk bertanya dengan yang lain. Begitu juga apabila anggota mempunyai pendapat yang berkaitan dengan kemajuan dan keberhasilan BKM maka anggota lain akan banyak yang mendukungnya. Karena mereka antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya merasa sudah menjadi satu keluarga.

5.3.2 Menegakkan Aturan Main

a. Posisi Masyarakat

Keberadaan masyarakat di dalam BKM sangat berperan, dimana posisinya sebagai subyek atau penentu kebijakan yang terkait dengan permasalahan mereka sendiri. Artinya mereka sebagai peserta rapat dalam BKM, apabila mempunyai masalah atau tidak, maka mereka sendiri yang mengetahui hal tersebut merupakan masalah atau bukan dan jika hal tersebut merupakan masalah berarti membutuhkan langkah segera untuk memecahkan masalah tersebut. Dan pada saat forum BKM

diadakan maka masalah yang dihadapi dilaporkan kemudian pada rapat tersebut akan dibahas untuk dicarikan pemecahan yang terbaik.

Apabila masyarakat waspada terhadap berbagai masalah pada dirinya dan segera berusaha untuk membawanya ke forum BKM berarti mereka telah menegakkan aturan main sehingga dari forum yang diadakan BKM dalam membahas masalah tersebut akan diambil suatu keputusan yang berguna bagi semua anggota BKM. Untuk lebih jelasnya tentang posisi masyarakat sebagai subyek dan penentu kebijakan terhadap masalahnya sendiri, maka penulis rinci pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Posisi Masyarakat di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	4 (26,67 %)	8 (53,33 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	3 (20 %)	11 (73,33 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	4 (26,67 %)	10 (66,66 %)	1 (6,67 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		11 (24,44 %)	29 (64,45 %)	5 (11,11 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 11 orang (73,33%) dari Kelurahan Karanganyar menilai baik terhadap keberadaan dari anggota masyarakat yang berperan sebagai subyek (pelaku) atau penentu kebijakan terhadap hasil keputusan. Artinya masyarakat secara langsung harus mengetahui kinerja dari masing-masing

anggota BKM nya dan memantau semua pekerjaan yang dilakukan demi keberhasilan BKM untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu masyarakat juga harus aktif dalam BKM yang ada dimasing-masing kelurahan dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berada pada kondisi yang miskin.

Kebijakan yang diambil harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat miskin dalam merubah kehidupan mereka dan berguna bagi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Disamping itu kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi atas permasalahan yang ada sehingga aturan tetap ditegakkan.

b. Model Penanganan Pekerjaan

Pekerjaan yang ada di BKM menjadi tanggung jawab bersama dan harus dikerjakan bersama oleh seluruh anggota BKM. Meskipun pembagian tugas didasarkan pada jabatan mereka masing-masing, bukan berarti yang mendapat bagian tugas saja yang harus mengerjakan sedangkan yang lain atau yang tidak memperoleh bagian hanya melihat dan berpangku tangan saja. Tetapi maksudnya adalah mereka semua yang menjadi anggota BKM harus saling membantu demi kelancaran program P2KP.

Dalam melaksanakan suatu tugas apabila ada anggota yang tidak bisa maka mereka yang bisa harus segera mengajarnya, sedangkan pihak yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas merasa tidak bisa maka harus segera mencari tahu agar semua pekerjaan selesai tepat waktu sehingga tujuan P2KP terwujud. Dengan demikian apabila kesadaran akan tanggung jawab dan rasa kebersamaan terhadap pelaksanaan tugas muncul pada seluruh anggota berarti mereka telah menegakkan aturan main yang berlaku. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap kinerja ketiga BKM tentang model penanganan pekerjaan, penulis rinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 34. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Model Penanganan Pekerjaan di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	5 (33,33 %)	7 (46,67 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	3 (20 %)	9 (60 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	6 (40 %)	7 (46,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		14 (31,11 %)	23 (51,11 %)	8 (17,78 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan Karanganyar menilai baik terhadap kinerja BKM tentang model penanganan pekerjaan. Berarti BKM pada kelurahan ini, semua pekerjaan yang dilakukan menjadi tanggung jawab semua anggota BKM dan tidak ada pembedaan terhadap anggota yang mendapat tugas berdasarkan jabatan mereka masing-masing dengan mereka yang tidak mendapat tugas.

Untuk masalah pekerjaan menjadi tanggung jawab seluruh anggota BKM. Maka dari itu apabila individu sudah menjadi anggota BKM, mereka harus konsekuen dengan menjalankan tugasnya. Misalnya bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai penerima bantuan dana, apabila terlambat untuk mengembalikan dana pinjaman maka pihak dari BKM yang berfungsi sebagai penyalur dana memberikan sanksi yang telah disepakati bersama. Bentuk sanksi antara kelurahan

yang satu dengan kelurahan yang lainnya berbeda-beda tergantung perjanjian yang dibuat bersama, misalnya pemberian denda.

Sebelumnya nama-nama KSM terlambat membayar angsuran diumumkan pada papan pengumuman di depan kantor BKM. Jadi nama-nama tersebut diketahui oleh KSM lain. Maka KSM yang terlambat tersebut akan menjadi bahan pembicaraan KSM lain atau anggota masyarakat sehingga KSM yang terlambat membayar akan merasa malu, akhirnya KSM berusaha untuk cepat-cepat mengangsurnya dan berusaha tidak mengulangi kembali keterlambatannya dalam mengangsur. Sedangkan bagi pengurus BKM harus mengambil kebijakan secara adil terhadap permasalahan yang dihadapi oleh KSM sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Artinya pengurus BKM mencari alternatif terbaik (jalan keluar) untuk membantu KSM yang bermasalah.

5.3.3 Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main

a. Motif Keterlibatan Anggota

Dalam mengawasi aturan main diperlukan adanya kesadaran dan keterlibatan langsung yang tumbuh dari seluruh anggota BKM secara sukarela dan tanpa pamrih. Karena apabila tidak didasari adanya rasa ikhlash maka pekerjaan yang telah dilakukan akan sia-sia. Disamping itu dalam kegiatan pengawasan terhadap aturan yang ada membutuhkan tenaga dan pikiran yang secara keseluruhan harus difokuskan pada kegiatan tersebut khususnya yang menyangkut tentang pengambilan keputusan pada rapat BKM maupun pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KSM, yang pada intinya masih ada hubungannya dengan program P2KP. Keterlibatan dari anggota merupakan hal yang essensial maka apabila tidak ada anggota, pekerjaan di BKM tidak ada yang menjalankan. Untuk itu keberadaan dari anggota yang aktif, baik dalam memberikan pendapat, pikiran maupun tenaga sangat membantu dalam terwujudnya tujuan P2KP. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada tabel di bawah ini :

Tabel 35. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Motif Keterlibatan dari Anggotanya di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	7 (46,67 %)	6 (40 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	9 (60 %)	4 (26,67 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	8 (53,34 %)	5 (33,33 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		24 (53,33 %)	15 (33,33 %)	6 (13,34 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) dari Kelurahan Karanganyar menunjukkan keterlibatan dari anggotanya secara sukarela dan tanpa pamrih bernilai baik sekali. Anggota yang terlibat dalam lembaga BKM harus bekerja sepenuhnya bagi kemajuan BKM. Maka dari itu sifat sukarela yang harus ditanamkan pada setiap individu baik dalam pembagian tugas, pemberian hak suara secara ikhlas tanpa ada unsur pamrih dikemudian hari. Tidak dapat dipungkiri memang manusia hidup di dunia untuk mencari nilai tambah dihadapan individu lain. Lebih-lebih dihadapan pada pimpinan. Tetapi sifat tersebut dalam BKM tidak diterapkan baik itu pengurus, anggota sama saja. Semua mempunyai peluang atau hak yang sama sebagai anggota dalam BKM.

Artinya individu yang mempunyai kelebihan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak bisa dalam menjalankan tugasnya sedangkan individu yang mempunyai kekurangan untuk menjalankan tugasnya dihilangkan rasa malu untuk bertanya dan anggapan sebagai manusia yang rendah. Oleh sebab itu mereka yang

merasa kurang pengetahuannya harus segera mencari tahu atau bertanya kepada mereka yang mempunyai kelebihan.

5.3.4 Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main Dianggap Perlu Diubah

a. Adanya Umpan Balik

Apabila aturan main yang telah disepakati bersama tetapi setelah diterapkan banyak anggota yang merasa keberatan untuk melaksanakan. Karena disebabkan oleh kondisi yang tidak mendukung, maka apabila perlu untuk diubah secepatnya dapat dilakukan demi tercapainya program P2KP sehingga aturan yang semula sifatnya memberatkan tetapi setelah diganti dengan aturan dan menjadi kesepakatan bersama maka seluruh anggota BKM dapat melaksanakan aturan baru tersebut dengan baik dan tidak ada unsur paksaan.

Maka dari itu dalam mengubah aturan semula menjadi aturan yang baru juga dibutuhkan adanya umpan balik sebagai titik masuk (*entry point*) dari anggota yang satu dengan yang lain, apabila dalam melaksanakan pekerjaan mengalami kesulitan sehingga dari kesulitan tersebut akan dibahas pada rapat BKM kemudian dihasilkan suatu keputusan yang berguna bagi kelancaran kegiatan berikutnya yang akhirnya dapat bermanfaat bagi seluruh anggota BKM. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap kinerja BKM tentang diperlukannya umpan balik dalam mengadakan perubahan dari aturan semula diganti dengan yang baru, penulis sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 36. Tanggapan Responden Terhadap Kinerja BKM Tentang Adanya Umpan Balik Untuk Mengadakan Perubahan pada Aturan Main di Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					JUMLAH
		Baik Sekali	Baik	Cukup	Buruk	Buruk Sekali	
1.	Gadingrejo	5 (33,33 %)	7 (46,67 %)	3 (20 %)	-	-	15 (100 %)
2.	Karanganyar	4 (26,67 %)	9 (60 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
3.	Trajeng	5 (33,34 %)	8 (53,34 %)	2 (13,33 %)	-	-	15 (100 %)
Jumlah Keseluruhan		14 (31,11 %)	24 (53,33 %)	7 (15,56 %)	-	-	45 (100 %)

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 orang (60%) menilai baik terhadap kinerja BKM tentang dibutuhkannya umpan balik dalam mengadakan perubahan terhadap aturan main yang semula untuk diganti yang baru agar dipatuhi oleh seluruh anggota BKM. Karena aturan yang semula sifatnya memberatkan sehingga banyak anggota BKM yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.

Disini KSM yang mempunyai masalah atau hambatan dalam usahanya melapor kepada BKM baik masalah tentang pengembalian pinjaman kreditnya, usaha yang dilakukan hingga fenomena yang terjadi di lapangan sehingga BKM akan mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi oleh KSM. Boleh jadi masalah antara KSM yang satu dengan yang lainnya berbeda bahkan juga ada yang sama. Perolehan informasi dari KSM-KSM maka BKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian apabila permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dari masalah yang muncul baik disebabkan oleh kinerja BKM

yang salah maupun dari KSM sendiri yang tidak disadari, maka dengan adanya umpan balik melalui komunikasi antara kedua belah pihak akan membantu kelancara pekerjaan berikutnya untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan perannya dalam upaya membantu menanggulangi kemiskinan sehingga masalah yang akan datang kecil kemungkinannya

5.4 Perhitungan Untuk Mengukur Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Pada BKM

Selanjutnya untuk mengetahui Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) pada ketiga BKM di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng maka perhitungannya menggunakan Skor Kelayakan Peran BKM dan Skor Tingkat Kinerja BKM seperti yang sudah dijelaskan pada Bab I pada Analisa Data.

5.4.1 Tingkat Kelayakan Peran BKM

Untuk menentukan kelayakan peran BKM maka langkah yang harus ditempuh adalah mencari skor rata-rata agregat dengan cara membagi jumlah skor total responden dengan jumlah responden. Hasilnya digunakan untuk menilai kelayakan BKM dalam menjalankan perannya, dimana BKM dikatakan layak apabila memiliki skor minimal 51. Dalam konteks ini, BKM dapat dianggap memenuhi ciri-ciri sebagai lembaga yang bertumpu pada masyarakat (*community-based organization*). Dari penjelasan di atas, maka untuk mengukur tingkat kelayakan peran BKM menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$\text{Skor Kelayakan Peran BKM} = \frac{\text{Jumlah Skor Total Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Berdasarkan data yang diperoleh maka untuk *Kelurahan Gadingrejo* dari 15 responden terhadap 17 aspek yang mendapat skor 5 sejumlah 92 orang, skor 4 sebanyak 118 orang, skor 3 sejumlah 42 orang, skor 2 berjumlah 2 orang sedangkan yang mendapat skor 1 berjumlah 1 orang. Untuk *Kelurahan Karanganyar* dari 15 orang yang mendapat skor 5 berjumlah 97 orang, skor 4 sebanyak 125 orang, skor 3 sejumlah 32 orang, skor 2 hanya berjumlah 1 orang dan yang mendapat skor 1 tidak ada. Sedangkan untuk *Kelurahan Trajeng* dari responden sebanyak 15 orang yang mendapat skor 5 berjumlah 94 orang, skor 4 sebanyak 122 orang, skor 3 berjumlah 37 orang, yang mendapat skor 2 dan skor 1, masing-masing berjumlah 1 orang.

Dari penjelasan di atas untuk mengetahui lebih jelas tentang jumlah responden terhadap 17 penilaian kinerja BKM pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Gadingrejo maka penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 37. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap Kinerja BKM nya Masing-masing, Berdasarkan 17 Aspek Penilaian pada Kecamatan Gadingrejo

NO.	KELURAHAN	SKOR					JUMLAH (orang)
		5	4	3	2	1	
1.	Gadingrejo	92	118	42	2	1	255
2.	Karanganyar	97	125	32	1	-	255
3.	Trajeng	94	122	37	1	1	255
JUMLAH		283	365	111	4	2	765

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas, maka dapat dihitung skor kelayakan peran BKM di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kelurahan Gadingrejo, Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

$$a) \text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Gadingrejo} = \frac{\text{Jumlah Skor Total Responden Kel. Gadingrejo}}{\text{Jumlah Responden Kel. Gadingrejo}}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Gadingrejo} &= \frac{5(92) + 4(118) + 3(42) + 2(2) + 1(1)}{15} \\ &= \frac{460 + 472 + 126 + 4 + 1}{15} \\ &= \frac{1063}{15} \\ &= 70,87 \end{aligned}$$

- Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa skor kelayakan peran BKM pada Kelurahan Gadingrejo sebesar 70,87.

$$b) \text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Karanganyar} = \frac{\text{Jumlah Skor Total Responden Kel. Karanganyar}}{\text{Jumlah Responden Kel. Karanganyar}}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel Karanganyar} &= \frac{5(97) + 4(125) + 3(32) + 2(1) + 1(0)}{15} \\ &= \frac{485 + 500 + 96 + 2 + 0}{15} \\ &= \frac{1083}{15} \\ &= 72,20 \end{aligned}$$

- Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa skor kelayakan peran BKM pada Kelurahan Karanganyar sebesar 72,20.

$$c) \text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Trajeng} = \frac{\text{Jumlah Total Skor Responden Kel. Trajeng}}{\text{Jumlah Responden Kel. Trajeng}}$$

$$\text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Trajeng} = \frac{5(94) + 4(122) + 3(37) + 2(1) + 1(1)}{15}$$

$$= \frac{470 + 488 + 111 + 2 + 1}{15}$$

$$= \frac{1072}{15}$$

$$= 71,47$$

- Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa skor kelayakan peran BKM pada Kelurahan Trajeng sebesar 71,47.

Berdasarkan perhitungan di atas tentang skor kelayakan peran BKM di tiap-tiap kelurahan pada Kecamatan Gadingrejo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 38. Skor Tingkat Kelayakan Peran BKM Berdasarkan Kinerja BKM pada Tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan Gadingrejo

No.	Kelurahan	Jumlah Responden (orang)	Skor Kelayakan Peran BKM	Kinerja Peran BKM
1.	Gadingrejo	15	70,87	Layak
2.	Karanganyar	15	72,20	Layak
3.	Trajeng	15	71,47	Layak
JUMLAH		45	214,54	Layak

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum ketiga BKM yang ada di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng dianggap sudah layak untuk menjalankan perannya sebagai institusi atau lembaga komunitas lokal dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Karena skor rata-ratanya sebesar 71,51 maka nilainya cukup jauh di atas skor minimal yang disyaratkan dalam *Manual Proyek* yaitu 51. Dimana untuk BKM Kelurahan Gadingrejo skor kelayakannya sejumlah 70,87. BKM Kelurahan Karanganyar skor kelayakannya sejumlah 72,20 dan Kelurahan Trajeng skor kelayakannya sejumlah 71,47 maka ketiga BKM yang ada di kelurahan tersebut sebagai lembaga yang bertumpu pada masyarakat (*community-based organization*) dimana semua kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan baik dari proses pembentukan BKM hingga pelaksanaan tugasnya, masyarakatlah yang mempunyai peran utama. Dari ketiga BKM di kelurahan tersebut terlihat bahwa tingkat skor kelayakan peran BKM yang paling tinggi adalah BKM Kelurahan Karanganyar yaitu senilai 72,20 dibanding BKM pada kelurahan lainnya.

5.4.2 Tingkat Kinerja BKM

Setelah diketahui skor tingkat kelayakan peran masing-masing BKM pada Kelurahan Gadingrejo maka langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat kinerja BKM. Dalam mengukur tingkat kinerja BKM dapat dihitung dari skor rata-rata per aspek yang dievaluasi. Caranya yaitu dengan membagi skor agregat tingkat kelayakan peran BKM dengan jumlah aspek kinerjanya sebanyak 17. Kategori tingkat pencapaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut. Jika :

- (a) tingkat kinerja buruk sekali : skor pencapaian kinerja antara 1,00 hingga 1,80
- (b) tingkat kinerja buruk : skor pencapaian kinerja antara 1,81 hingga 2,60
- (c) tingkat kinerja cukup : skor pencapaian kinerja antara 2,61 hingga 3,40
- (d) tingkat kinerja baik : skor pencapaian kinerja antara 3,41 hingga 4,20
- (e) tingkat kinerja baik sekali : skor pencapaian kinerja antara 4,21 hingga 5,00

Dari penjelasan di atas, maka untuk menghitung tingkat kinerja BKM menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$\text{Skor Tingkat Kinerja BKM} = \frac{\text{Skor Kelayakan Peran BKM}}{17 (\text{aspek})}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan skor kelayakan peran BKM, dimana untuk skor kelayakan peran BKM di Kelurahan Gadingrejo sebesar 70,87, skor kelayakan peran BKM di Kelurahan Karanganyar sebesar 72,20. Sedangkan skor kelayakan peran BKM di Kelurahan Trajeng sebesar 71,47 maka langkah selanjutnya dapat dihitung skor tingkat kinerja BKM pada masing-masing BKM adalah sebagai berikut :

Untuk

$$\begin{aligned} \text{a) Skor Tingkat Kinerja BKM Kel. Gadingrejo} &= \frac{\text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Gadingrejo}}{17} \\ &= \frac{70,87}{17} \\ &= 4,17 \end{aligned}$$

- Dari perhitungan di atas, dihasilkan bahwa untuk skor tingkat kinerja BKM pada Kelurahan Gadingrejo sebesar 4,17.

$$\begin{aligned} \text{b) Skor Tingkat Kinerja BKM Kel. Karanganyar} &= \frac{\text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Karanganyar}}{17} \\ &= \frac{72,20}{17} \\ &= 4,25 \end{aligned}$$

- Dari perhitungan di atas, dihasilkan bahwa untuk skor tingkat kinerja BKM pada Kelurahan Karanganyar sebesar 4,25.

$$\begin{aligned}
 \text{c) Skor Tingkat Kinerja BKM Kel. Trajeng} &= \frac{\text{Skor Kelayakan Peran BKM Kel. Trajeng}}{17} \\
 &= \frac{71,47}{17} \\
 &= 4,20
 \end{aligned}$$

- Dari perhitungan di atas, dihasilkan bahwa untuk skor tingkat kinerja BKM pada Kelurahan Trajeng 4,20.

Berdasarkan perhitungan tentang tingkat kinerja pada ketiga BKM di Kecamatan Gadingrejo, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 39. Skor Tingkat Kinerja BKM di Tiap-Tiap Kelurahan Kecamatan Gadingrejo

No.	Kelurahan	Jumlah Responden (orang)	Skor Kelayakan Peran BKM	Skor Tingkat Kinerja BKM	Predikat
1.	Gadingrejo	15	70,78	4,17	Baik
2.	Karanganyar	15	72,70	4,25	Baik Sekali
3.	Trajeng	15	71,47	4,20	Baik

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja dari tiga BKM menunjukkan tingkat kinerja yang "baik", dimana untuk Kelurahan Gadingrejo dengan skor tingkat kinerja BKM nya sebesar 4,17. Kelurahan Karanganyar sejumlah 4,25 dan Kelurahan Trajeng sebesar 4,20. Data tersebut menunjukkan tingkat kinerja untuk Kelurahan Karanganyar dengan predikat "baik sekali" sedangkan untuk tingkat kinerja pada Kelurahan Trajeng dan Gadingrejo menunjukkan predikat "baik". Terbukti bahwa ketiga BKM tersebut sudah berdaya sebagai kelembagaan komunitas lokal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisa data yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner maupun interview yang kemudian penulis susun dalam bentuk tabel frekuensi silang dan melalui perhitungan Skor Kelayakan Peran BKM, Skor Tingkat Kinerja BKM serta diberi penjelasan maka setelah perhitungan selesai dapat diketahui dari BKM kelurahan mana yang mendapat skor tertinggi dibanding BKM pada kelurahan lainnya. Jika skornya tertinggi berarti BKM tersebut sudah mampu memberdayakan masyarakat setempat melalui kelebagaannya. Untuk itu penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian itu adalah sebagai berikut :

- a. BKM yang ada di Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng kinerjanya sudah menunjukkan kelayakan sebagai kelembagaan komunitas lokal yang bertumpu pada masyarakat (*community based-organization*) dan dapat menjalankan perannya dengan baik. Karena skor kelayakan peran ketiga BKM sudah berada diatas 51. Terbukti untuk Kelurahan Gadingrejo, skor kelayakan peran BKM nya sebesar 70,87, Kelurahan Karanganyar, skor kelayakan peran BKM nya sebesar 72,70 dan untuk Kelurahan Trajeng, skor kelayakan peran BKM nya sebesar 71,47. Berarti ketiga BKM tersebut dalam kinerjanya memang benar-benar mengutamakan untuk kepentingan masyarakat bukan berorientasi pada satu orang saja, baik dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaan tugasnya masyarakatlah yang harus menonjol. Artinya masyarakat mempunyai peran andil di dalam lembaga tersebut. Karena BKM tanpa masyarakat tidak akan berdiri dan terbentuk.
- b. Untuk tingkat kinerja ketiga BKM dari Kelurahan Gadingrejo, Karanganyar dan Trajeng secara umum "baik" dan sudah menunjukkan sebagai kelembagaan komunitas lokal yang semakin berdaya, dengan tingkat pencapaian kinerja tertinggi dicapai oleh BKM pada Kelurahan Karanganyar, dimana untuk

Kelurahan Karanganyar berpredikat “baik sekali” dalam kinerjanya selama ini. Untuk Kelurahan Trajeng dan Gadingrejo menunjukkan predikat “baik”. Artinya ketiga BKM pada kelurahan tersebut sudah berdaya melalui pelaksanaan dalam menjalankan perannya untuk membantu masyarakat yang mempunyai masalah terutama masalah kemiskinan. Berarti dari ketiga BKM tersebut sudah berfungsi keberadaannya sebagai penyalur dana bantuan P2KP untuk masyarakat yang miskin sehingga mereka dapat terbebaskan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

- c. Hasil penelitian yang cenderung bernilai “baik” dari kinerja BKM baik di Kelurahan Karanganyar, Gadingrejo maupun Trajeng disebabkan oleh adanya proses pendampingan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Apabila setelah proses pendampingan tersebut selesai (*process facing out*), akan dimungkinkan atau dikhawatirkan kinerja BKM akan mengalami penurunan

6.2 Saran

Saran sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja BKM yang masih kurang baik agar kinerjanya bertambah baik sekali. Disamping itu sebagai keberlanjutan pelaksanaan dari program P2KP supaya tepat sasaran sehingga BKM yang dianggap kurang baik dalam menjalankan tugasnya dapat diketahui dan dengan segera berusaha untuk merubah sistem kinerjanya yang sesuai dengan aturan BKM yang berlaku. Adapun saran-saran yang sangat bermanfaat untuk perkembangan kinerja BKM untuk yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Untuk BKM Kelurahan Gadingrejo agar lebih ditingkatkan kinerjanya dalam menjalankan perannya sebagai hasil keputusan yang telah disepakati bersama oleh seluruh masyarakat. Disamping itu hubungan kerja harus bersifat informal dan tidak kaku, akrab dan saling mendukung perlu dikembangkan dan diterapkan sebagai perwujudan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama agar seluruh anggota BKM tetap mematuhi sehingga menjadi semakin berdaya sebagai kelembagaan komunitas lokal yang bertumpu pada masyarakat

(*community based-organization*). Dengan jalan meningkatkan dan melaksanakan perannya dengan baik.

2. Perlunya peningkatan kinerja BKM pada Kelurahan Trajeng yaitu keterlibatan dari para anggota BKM nya dalam melaksanakan aktivitasnya berdasarkan pembagian tugas masing-masing. Dengan demikian BKM di kelurahan tersebut akan menjadi semakin berdaya sebagai kelembagaan komunitas lokal.

Dengan demikian untuk BKM Kelurahan Trajeng dan Kelurahan Gadingrejo lebih ditingkatkan dalam kinerja maupun partisipasi dari seluruh anggotanya. Apabila hal tersebut dilakukan dengan baik nantinya akan bisa menyamai BKM pada Kelurahan Karanganyar yang kinerjanya "baik sekali". Disamping itu untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang maka antara anggota BKM yang satu dengan anggota BKM lainnya harus saling berkomunikasi, tukar pendapat agar tujuan P2KP benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, A. Bayo (Ed). 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Anonim. 2000. *Keluarga Sejahtera Versi BKKBN*. Jakarta.
- Anoraga, Pandji dan Sri Suyati. 1995. *Perilaku Dalam Keorganisasian*. Jakarta: P.T Pustaka Jaya.
- Anwar, M. Arsyad, Faisal Basri dan M. Ikhsan (Ed). 1995. *Sumber Daya Teknologi dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ardaniah, Tri. 1997. *Pengantar Sosiologi*. Jember: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jember.
- Dasuki, Alex. 1999. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Davis, Keith dan John Newstrom. 1996. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: P.T Erlangga.
- Effendi, T. Noer. 1993. *Konsep Dan Pendekatan Terpadu Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, Dalil. 1996. "Bentuk Pengorganisasian Yang Cocok Untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah Dan Mengentaskan Kemiskinan". Dalam Noerjaya, Tika (Ed). *Bentuk Pengorganisasian Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: P.T Bina Rena Pariwisata.
- Jaenuri, Ribut. 1993. *Migrasi Penduduk Pedesaan Ke Kota dan Tumbuhnya Pemukiman Liar*. Jember: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
- Kantor Biro Pusat Statistik Pusat. 2000. *BPS Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan*. Pasuruan.
- Koentjaraningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: P.T Gramedia.

- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UH.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat* (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Pramono, Agung. P. W. 2001. *Laporan Evaluasi Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat* (Nopember 2001 – Januari 2001). Jember: Pekerjaan Pelayanan Konsultasi Manajemen Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan. Satuan Wilayah Kerja IX-Jawa Timur.
- Prayitno, Hadi. 1997. "Identifikasi Peranan Dan Hubungan Lembaga-Lembaga Pendukung Impres Desa Tertinggal Di Propinsi Dati I Jawa Timur (Monitory dan Evaluasi Pelaksana)". Dalam *Aspirasi*. (April, VII). No. 01. Jember: Halaman 48-49.
- Poerwanto. 1996. "Budaya Organisasi Dan Pengembangan Organisasi". Dalam *Aspirasi* (Desember, VI). No. 03. Jember: Halaman 36-37.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sarman, Mukhtar. 1997. "Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat". Dalam *Prisma* (Januari, I). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Halaman: 34-35 dan 38.
- Sayogya. 1996. "Pemerataan Pembangunan Dan Penanggulangan Kemiskinan". Dalam *Jurnal Sosiologi Indonesia*. No. 1. Jakarta: Halaman 51.
- Semaoen, Ikhsan dan S.M Kiptiyah. 1998. "Strategi Pemberdayaan Manajemen". Dalam *Aspirasi*. (April, VIII). No. 1. Malang: Halaman 25.
- Shadily, Hasan. 1984. *Sosiologi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed). 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, Masri dan HonLLd. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

- Soetrisno. 1998. *Memberdayakan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Ekologi Budaya.
- Sopater, Sularso. B. Subandrijo dan J. Tobing. 1998. *Pemberdayaan Birokrasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: P.T Penebar Swadaya.
- Sumarnonugroho, T. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: P.T Hanindita Graha Widya.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong. 1995. *Masalah Kemiskinan*. Surabaya: UNAIR.
- Tim Konsultasi Manajemen Wilayah Satuan Wilayah Kerja IX - Jawa Timur. 2000. *Pemberdayaan BKM*. Makalah pada Lokakarya Pelatihan KMW. Malang.
- Tim Pelatihan Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat. Satuan Wilayah Kerja IX-Jawa Timur. 2000. *Konsep P2KP Dan Implementasinya*. Modul No.01/BKM. Jember.
- _____. 2000. *Pengorganisasian Masyarakat (CO)*. Modul No.03/BKM. Jember.
- _____. 2000. *Manajemen Usaha Kecil ERT*. Modul No.06/BKM. Jember.
- Tim Persiapan P2KP. 1999. *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan, Buku Satu, Pedoman Umum*. Jakarta.
- _____. 1999. *Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan, Buku Dua, Petunjuk Teknis*. Jakarta.
- Tim PMD. 2000. *Monografi Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan*. Pasuruan.
- _____. 2000. *Profil Desa Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan*. Pasuruan.
- Tim Sekretariat LSM Bina Desa INPI-Pact. 1998. *Refleksi LSM (Tetes Pikiran dan Renungan)*. Jakarta.
- Todaro, Michael (Ed) 1983. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis memohon kerelaan dan kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi semua pertanyaan di bawah ini. Dan penulis mengharapkan agar jawaban dari saudara sesuai dengan kenyataan dan kondisi yang ada. Artinya tidak ada unsur kerahasiaan dan tertutup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena jawaban dari saudara semua, nantinya akan sangat berguna dan membantu penulis dalam penganalisaan data. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi saudara semua dari bantuan yang anda berikan yang dijadikan sebagai sumber data bagi penulis.

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Isilah identitas anda berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.
2. Berilah tanda check list (✓) pada salah satu kolom derajat pencapaian kinerja sesuai dengan kondisi kinerja yang diharapkan berdasarkan situasi BKM yang ada di kelurahan anda.

Bila Jawaban Anda Untuk Derajat Pencapaian Kinerja, jika memilih :

- (1) Anda menilai buruk sekali, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian yang sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan.
- (2) Anda menilai buruk, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian yang masih jauh dari kinerja yang diharapkan.
- (3) Anda menilai cukup, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian yang telah menjurus pada kinerja yang diharapkan.
- (4) Anda menilai baik, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian yang hampir sama atau mendekati kinerja yang diharapkan.
- (5) Anda menilai baik sekali, berarti BKM anda menggambarkan derajat pencapaian yang sama dengan kinerja yang diharapkan.

KUESIONER
Daftar Pertanyaan

No. responden :

Kelurahan :

• **IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin : L / P *)
4. Alamat :
5. Agama :
6. Pendidikan terakhir :
7. Status : Kawin / Belum kawin / Janda / Duda *)
8. Jabatan anda di masyarakat sebagai apa :

*) Coret yang tidak perlu

ISILAH SESUAI DENGAN PETUNJUK YANG TELAH DISEBUTKAN DI ATAS

NO.	ASPEK PENILAIAN	KONDISI KINERJA YANG DIHARAPKAN	DERAJAT PENCAPAIAN KINERJA				
			1	2	3	4	5
1.	Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> BKM secara konsisten menjalankan kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat 					
2.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Anggota terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan 					
3.	Distribusi Kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas dan kewenangan tersebar secara proporsional pada pihak-pihak yang terlibat sebagai anggota BKM 					
4.	Corak Kepentimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Anggota BKM mampu berperan sebagai fasilitator, yaitu pihak yang memfasilitasi warga, khususnya anggota KSM agar dapat menjalankan kegiatannya dengan baik 					
5.	Peran Anggota BKM	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pengambil inisiatif perencanaan dan pelaksanaan 					
6.	Proses Pembentukan BKM	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuk dari "bawah" dan atas kepentingan warga Jika tidak dikehendaki, pembentukan BKM harus dibatalkan dan program tidak dilaksanakan di kelurahan ini Proses pembentukan BKM menggunakan pendekatan dan teknik partisipatif 					
7.	Pengaruh dari Luar	<ul style="list-style-type: none"> Relatif rendah, BKM terbentuk murni atas kehendak warga, dan oleh karena itu bersifat relatif otonom 					
8.	Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Anggota BKM berorientasi ke bawah serta mengabdikan penuh pada kepentingan masyarakat 					
9.	Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Kepemimpinan kolektif, tidak ada individu menonjol 					
10.	Tipe dan Tingkat Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> Diharapkan partisipasi penuh dan konsisten Pengelompokan terjadi atas dasar kesadaran dan kepentingan bersama Berpihak pada masalah orang miskin 					
11.	Kondisi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi dua arah Semua anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya 					
12.	Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik	<ul style="list-style-type: none"> Diselesaikan bersama Sejauh mungkin diupayakan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak (<i>win-win solution</i>) 					
13.	Hubungan Kerja Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Informal dan tidak kaku Akrab dan saling mendukung 					
14.	Posisi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat menjadi subyek atau penentu kebijakan 					
15.	Model Penanganan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pekerjaan adalah tanggung jawab dan dikerjakan bersama oleh seluruh anggota BKM 					
16.	Motif Keterlibatan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sukarela dan tanpa pamrih 					
17.	Adanya Umpan Balik	<ul style="list-style-type: none"> Sangat dibutuhkan sebagai titik masuk (<i>entry point</i>) bagi kelancaran pekerjaan berikutnya 					

Lampiran 1
REKAPITULASI IDENTITAS RESPONDEN

No. Responden	Nama	Kelurahan	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Alamat (Kota Pasuruan)	Agama	Pendidikan Terakhir	Status Perkawinan	Jabatan Di Masyarakat
1	SHOLEHUDDIN	Gadingrejo	L	49	Jl Timor-Timur No. 192 A	Islam	SLTA	Kawin	KSM
2	HASAN	Gadingrejo	L	32	Jl Halmahera No. 32	Islam	SLTP	Kawin	Ketua RT. III
3	IWAN	Gadingrejo	L	52	Jl Halmahera No. 142	Islam	SLTA	Duda	Ketua RW. III
4	M. AMIN	Gadingrejo	L	54	Jl. Timor-Timur No. 43	Islam	SLTP	Kawin	KSM
5	MASRINI	Gadingrejo	P	37	Jl Simonggo No. 18	Islam	SLTA	Janda	KSM
6	MOEDONO	Gadingrejo	L	50	Jl Hangtuh Gg. II	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RW. I
7	SUPARNO	Gadingrejo	L	45	Jl Banda Gg. Mawar No. 14	Islam	PT	Kawin	Ketua RT. II
8	FITROTIN NUSKIAH	Gadingrejo	P	28	Jl Timor-timur III/30	Islam	PT	Belum Kawin	Faskel
9	CHUDURI	Gadingrejo	L	36	Jl. Hangtuh Gg. V	Islam	SLTA	Kawin	KSM
10	M. MACHFUD	Gadingrejo	L	39	Jl. Hangtuh No. 5	Islam	PT	Kawin	Ketua RT. I
11	NAPSI AH	Gadingrejo	P	35	Jl. Hangtuh II/12	Islam	SD	Kawin	KSM
12	SAHRULSONO	Gadingrejo	L	50	Jl. Banda No 17	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RW. IV
13	SUBANDI	Gadingrejo	L	37	Jl. Irian Jaya I/197	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RW. II
14	LILIK	Gadingrejo	P	29	Jl. Hangtuh I/57	Islam	SLTP	Belum Kawin	KSM
15	M. CHAFID	Gadingrejo	L	40	Jl. Halmahera XI/20	Islam	SD	Kawin	KSM
16	JUMARI	Karanganyar	L	41	Jl. Wakhid Hasyim V/37	Islam	PT	Kawin	Ketua RW. V
17	HERU IRIANTO	Karanganyar	L	39	Jl. K.H. Abdul Hamid IX/39	Islam	PT	Kawin	KSM
18	MOCH. RUFAL	Karanganyar	L	35	Jl. Hasanudin VII/34	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RT. V
19	M. MASKHUN	Karanganyar	L	42	Jl. Hasanudin I/47	Islam	SLTA	Kawin	KSM
20	KHALEM	Karanganyar	L	39	Jl. Hasanudin I/2	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RT. IV
21	BAMBANG	Karanganyar	L	48	Jl. K.H. Abdul Hamid No. 18	Islam	PT	Kawin	Ketua RT. II
22	EDY SUPIONO	Karanganyar	L	52	Jl. Halmahera XIX/9	Islam	SLTP	Kawin	KSM

No Responden	Nama	Kelurahan	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Alamat (Kota Pasuruan)	Ayanna	Pendidikan Terakhir	Status Perkawinan	Jabatan Di Masyarakat
23	TIEN KAMITNA	Karanganyar	P	45	Jl. Halmahera XIII/5	Islam	SLTA	Kawin	KSM
24	IMUK PU ARMI	Karanganyar	P	46	Jl. Hasanudin III/56	Islam	SLTP	Kawin	KSM
25	M ALWI	Karanganyar	L	54	Jl. K.H. Abdul Hamid XI/17	Islam	PT	Kawin	Ketua RT. III
26	MOCH. CHOTIB	Karanganyar	L	50	Jl. Hasanudin II/2	Islam	SLTA	Kawin	KSM
27	M LUTHFI ZAINUL	Karanganyar	L	31	Jl. K.H. Abdul Hamid VII/26	Islam	SLTA	Belum Kawin	Ketua RW. II
28	ANIK KHANIFAH	Karanganyar	P	34	Jl. Hasanudin X/10	Islam	PT	Belum Kawin	KSM
29	ABDUL HAMID	Karanganyar	L	43	Jl. K.H. Abdul Hamid VII/39	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RT. I
30	UTI SUWIWI	Karanganyar	P	28	Jl. K.H. Abdul Hamid No. 11	Islam	PT	Belum Kawin	Faskel
31	NANIK	Trajeng	P	44	Jl. Maluku No. 4	Islam	SLTA	Kawin	KSM
32	MUSTOFA	Trajeng	L	57	Jl. Sulawesi No. 5	Islam	SLTP	Kawin	Ketua RT. IV
33	PONIPAH	Trajeng	P	32	Jl. Brigjend Katamso No. 17	Islam	SLTP	Belum Kawin	KSM
34	BASORI	Trajeng	L	47	Jl. Halmahera No. 41	Islam	SLTP	Kawin	Ketua RT. III
35	DHOER	Trajeng	L	52	Jl. Kolonel Sugiono No. 32	Islam	SLTA	Kawin	KSM
36	SITI KHOFSAH	Trajeng	P	27	Jl. Kolonel Sugiono III/30	Islam	PT	Belum Kawin	Faskel
37	JUWARIYAH	Trajeng	P	38	Jl. Sulawesi Utara No. 10	Islam	SD	Kawin	KSM
38	ROCHIMAH	Trajeng	P	59	Jl. Kalimantan No. 47	Islam	SD	Kawin	KSM
39	RAHMAT	Trajeng	L	55	Jl. Halmahera III/4	Islam	SLTA	Kawin	KSM
40	HASYIM	Trajeng	L	53	Jl. Sulawesi VIII/7	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RW. II
41	SUHARI	Trajeng	L	35	Jl. Sulawesi X/40	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RT. VI
42	INDASAH	Trajeng	P	48	Jl. Kalimantan No. 6A	Islam	PT	Kawin	KSM
43	MADIONO	Trajeng	L	44	Jl. Kalimantan Gg. III	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RW. III
44	GAGUK	Trajeng	L	37	Jl. Halmahera XIV/10	Islam	SLTP	Kawin	Ketua RT. IV
45	M. NASIR	Trajeng	L	35	Jl. Maluku II/17	Islam	SLTA	Kawin	Ketua RW. VI

Lampiran II. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap 17 Aspek Penilaian Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKOR					JUMLAH (orang)
		5	4	3	2	1	
1.	Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan	3	7	3	1	1	15
2.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	4	8	3	-	-	15
3.	Distribusi Kekuasaan	5	7	3	-	-	15
4.	Corak Kepemimpinan	8	6	1	-	-	15
5.	Peran Anggota BKM	3	8	4	-	-	15
6.	Proses Pembentukan BKM	8	6	1	-	-	15
7.	Pengaruh Dari Luar	7	6	2	-	-	15
8.	Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota	5	7	3	-	-	15
9.	Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	5	8	2	-	-	15
10.	Tipe dan Tingkat Partisipasi	6	7	2	-	-	15
11.	Kondisi Komunikasi	4	9	2	-	-	15
12.	Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik	7	6	2	-	-	15
13.	Hubungan Kerja Anggota	6	5	3	1	-	15
14.	Posisi Masyarakat	4	8	3	-	-	15
15.	Model Penanganan Pekerja	5	7	3	-	-	15
16.	Motif Keterlibatan Anggota	7	6	2	-	-	15
17.	Adanya Umpan Balik	5	7	3	-	-	15
JUMLAH		92	118	42	2	1	255

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Lampiran III. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap 17 Aspek Penilaian Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKOR					JUMLAH (orang)
		5	4	3	2	1	
1.	Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan	3	9	2	1	-	15
2.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	4	10	1	-	-	15
3.	Distribusi Kekuasaan	3	10	2	-	-	15
4.	Corak Kepemimpinan	4	8	3	-	-	15
5.	Peran Anggota BKM	3	9	3	-	-	15
6.	Proses Pembentukan BKM	9	4	2	-	-	15
7.	Pengaruh Dari Luar	9	5	1	-	-	15
8.	Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota	5	9	1	-	-	15
9.	Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	3	10	2	-	-	15
10.	Tipe dan Tingkat Partisipasi	9	4	2	-	-	15
11.	Kondisi Komunikasi	9	5	1	-	-	15
12.	Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik	9	5	1	-	-	15
13.	Hubungan Kerja Anggota	8	4	3	-	-	15
14.	Posisi Masyarakat	3	11	2	-	-	15
15.	Model Penanganan Pekerjaan	3	9	3	-	-	15
16.	Motif Keterlibatan Anggota	9	4	2	-	-	15
17.	Adanya Umpan Balik	4	9	2	-	-	15
JUMLAH		97	125	32	1	-	255

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

Lampiran IV. Jumlah Responden yang Menilai Terhadap 17 Aspek Penilaian Berdasarkan Derajat Pencapaian Kinerja BKM (skor) pada BKM Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo

NO.	ASPEK PENILAIAN	SKOR					JUMLAH (orang)
		5	4	3	2	1	
1.	Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan	2	8	4	1	-	15
2.	Mekanisme Pengambilan Keputusan	3	9	3	-	-	15
3.	Distribusi Kekuasaan	4	8	2	-	1	15
4.	Corak Kepemimpinan	5	7	3	-	-	15
5.	Peran Anggota BKM	5	8	2	-	-	15
6.	Proses Pembentukan BKM	6	7	2	-	-	15
7.	Pengaruh Dari Luar	7	7	1	-	-	15
8.	Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota	5	8	2	-	-	15
9.	Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	4	9	2	-	-	15
10.	Tipe dan Tingkat Partisipasi	7	5	3	-	-	15
11.	Kondisi Komunikasi	8	5	2	-	-	15
12.	Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik	8	5	2	-	-	15
13.	Hubungan Kerja Anggota	7	6	2	-	-	15
14.	Posisi Masyarakat	4	10	1	-	-	15
15.	Model Penanganan Pekerjaan	6	7	2	-	-	15
16.	Motif Keterlibatan Anggota	8	5	2	-	-	15
17.	Adanya Umpan Balik	5	8	2	-	-	15
JUMLAH		94	122	37	1	1	255

Sumber : Data Primer, Tahun 2001

LAMPIRAN V. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan
Masing-masing Tentang Aturan Pengambilan Keputusan

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN	
	Tujuan dan Proses Pengambilan Keputusan	Mekanisme Pengambilan Keputusan
1	4	5
2	3	4
3	5	4
4	4	3
5	3	4
6	4	5
7	2	4
8	4	4
9	5	3
10	1	4
11	4	5
12	5	4
13	4	3
14	3	4
15	4	5
16	5	4
17	4	4
18	3	4
19	4	5
20	5	4
21	4	3
22	2	5
23	4	4
24	4	4
25	4	5
26	4	4
27	5	4
28	1	4
29	4	4
30	4	5
31	4	4
32	4	5
33	5	4
34	3	4
35	4	4
36	3	3
37	4	3
38	3	4
39	2	5
40	4	4
41	4	4
42	5	3
43	4	4
44	3	5
45	4	4

LAMPIRAN VI. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan/Desanya Masing-masing Tentang Pembagian Tugas BKM

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN		
	Distribusi Kekuasaan	Corak Kepemimpinan	Peran Anggota BKM
1.	4	5	4
2.	3	4	3
3.	5	3	4
4.	4	5	3
5.	5	4	4
6.	5	4	4
7.	4	5	3
8.	5	4	4
9.	3	5	3
10.	5	4	5
11.	4	5	4
12.	4	5	4
13.	4	5	5
14.	3	5	4
15.	4	4	5
16.	4	4	3
17.	5	4	4
18.	4	3	5
19.	4	5	5
20.	4	4	4
21.	5	4	5
22.	4	3	3
23.	4	4	4
24.	3	5	4
25.	4	4	3
26.	5	3	4
27.	4	4	4
28.	4	5	4
29.	3	5	4
30.	4	4	4
31.	5	4	5
32.	4	5	4
33.	4	4	4
34.	5	3	5
35.	1	5	4
36.	5	5	3
37.	5	4	5
38.	4	4	4
39.	4	3	4
40.	4	4	3
41.	4	3	5
42.	3	5	4
43.	4	4	4
44.	3	5	5
45.	4	4	4

LAMPIRAN VII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Proses Pembentukan BKM

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN	
	Proses Pembentukan BKM	Pengaruh dari Luar
1.	5	5
2.	5	4
3.	4	5
4.	3	3
5.	4	5
6.	5	5
7.	4	4
8.	5	5
9.	4	5
10.	5	4
11.	4	4
12.	5	5
13.	4	3
14.	5	4
15.	5	4
16.	5	4
17.	4	5
18.	5	5
19.	4	4
20.	5	5
21.	5	4
22.	5	5
23.	4	5
24.	3	5
25.	5	5
26.	4	4
27.	5	4
28.	5	3
29.	5	5
30.	3	5
31.	5	5
32.	4	4
33.	5	3
34.	4	5
35.	3	5
36.	5	4
37.	4	4
38.	5	4
39.	4	5
40.	5	4
41.	4	5
42.	4	5
43.	5	4
44.	3	5
45.	4	4

LAMPIRAN VIII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan
Masing-masing Tentang Kelembagaan BKM

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN	
	Orientasi Kepemimpinan dan Loyalitas Anggota	Model Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
1.	4	5
2.	5	4
3.	4	5
4.	5	4
5.	4	3
6.	5	4
7.	5	5
8.	4	4
9.	3	3
10.	5	4
11.	4	5
12.	3	4
13.	4	5
14.	3	4
15.	4	4
16.	5	4
17.	4	4
18.	4	5
19.	5	4
20.	4	4
21.	5	5
22.	4	4
23.	4	4
24.	4	4
25.	4	3
26.	5	4
27.	3	4
28.	5	4
29.	4	4
30.	4	3
31.	4	5
32.	5	4
33.	5	5
34.	4	4
35.	3	4
36.	5	5
37.	4	3
38.	5	4
39.	4	4
40.	4	3
41.	5	4
42.	4	4
43.	4	4
44.	4	5
45.	3	4
		5

LAMPIRAN IX. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan
Masing-masing Tentang Tujuan BKM

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN	
	Tipe dan Tingkat Partisipasi	Kondisi Komunikasi
1	5	4
2	3	5
3	4	4
4	5	4
5	4	4
6	5	3
7	4	4
8	5	4
9	5	5
10	3	3
11	4	4
12	4	4
13	4	5
14	5	4
15	4	5
16	5	4
17	5	5
18	4	5
19	5	4
20	4	3
21	3	5
22	5	4
23	3	5
24	5	4
25	5	5
26	4	5
27	5	5
28	4	5
29	5	4
30	5	5
31	5	5
32	5	4
33	4	5
34	5	4
35	4	5
36	5	4
37	3	5
38	4	3
39	3	5
40	5	4
41	4	5
42	5	3
43	3	5
44	4	4
45	5	5

LAMPIRAN X. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahan Masing-masing Tentang Menjaga Aturan Main

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN	
	Perbedaan Pendapat dan Manajemen Konflik	Hubungan Kerja Anggota
1.	5	4
2.	4	5
3.	5	4
4.	4	3
5.	3	5
6.	5	4
7.	4	3
8.	5	4
9.	3	5
10.	5	4
11.	4	2
12.	4	5
13.	5	5
14.	5	3
15.	4	5
16.	5	5
17.	4	5
18.	5	4
19.	5	5
20.	4	3
21.	5	5
22.	4	3
23.	5	5
24.	5	4
25.	4	5
26.	5	3
27.	5	4
28.	3	5
29.	5	4
30.	4	5
31.	5	5
32.	5	4
33.	4	5
34.	5	4
35.	4	3
36.	5	5
37.	4	3
38.	5	4
39.	3	5
40.	5	4
41.	4	5
42.	5	4
43.	3	5
44.	5	4
45.	4	5

LAMPIRAN XI. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahanannya
Masing-masing Tentang Menegakkan Aturan Main

NO. RESPONDEN	ASEK PENILAIAN	
	Posisi Masyarakat	Model Penanganan Pekerjaan
1	5	4
2	4	4
3	4	3
4	5	5
5	4	4
6	4	5
7	5	4
8	3	4
9	4	3
10	3	5
11	5	4
12	4	3
13	3	5
14	4	4
15	4	5
16	4	5
17	1	4
18	4	4
19	4	3
20	5	4
21	4	3
22	5	4
23	4	4
24	4	3
25	4	4
26	4	5
27	4	4
28	5	4
29	4	5
30	4	4
31	4	5
32	5	4
33	5	5
34	4	4
35	4	3
36	4	4
37	5	5
38	5	4
39	4	5
40	4	4
41	4	5
42	4	4
43	4	3
44	3	5
45	4	4

LAMPIRAN XII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya Masing-masing Tentang Mengawasi Pelaksanaan Aturan Main

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN
	Motif Keterlibatan Anggota
1	4
2	5
3	4
4	5
5	4
6	5
7	3
8	4
9	5
10	4
11	5
12	3
13	5
14	4
15	5
16	3
17	5
18	5
19	4
20	3
21	5
22	5
23	4
24	5
25	5
26	4
27	5
28	4
29	5
30	5
31	4
32	5
33	4
34	5
35	5
36	4
37	5
38	3
39	4
40	5
41	5
42	3
43	5
44	4
45	5

LAMPIRAN XIII. Penilaian Responden Terhadap Kinerja BKM pada Kelurahannya Masing-masing Untuk Mengadakan Perubahan Jika Aturan Main Dianggap Perlu Diubah

NO. RESPONDEN	ASPEK PENILAIAN Adanya Umpan Balik
1	3
2	4
3	5
4	4
5	4
6	3
7	5
8	5
9	4
10	5
11	4
12	5
13	4
14	3
15	4
16	4
17	5
18	4
19	5
20	4
21	4
22	5
23	4
24	5
25	4
26	3
27	4
28	3
29	4
30	4
31	5
32	4
33	5
34	4
35	4
36	3
37	4
38	5
39	3
40	4
41	4
42	5
43	4
44	4
45	5

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 175/J.25.3.1/PL.5/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

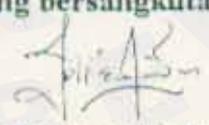
Nama / NIM : TETIEK CHUSNIATY MUIZ 07-1199
Fakultas / Jurusan : FISIP / KS
: Universitas Jember.
Alamat : JL KALIMANTAN X/1 JEMBER
Judul Penelitian : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS
LOKAL MELALUI PROYEK PENANGKALAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2EP)
Lokasi : Di Kecamatan Gadingrejo, Kota Jember
Lama Penelitian :1..... bulan (maksimum 6 bulan).

Kami sanggup menyerahkan buku laporan hasil penelitian kepada :

1. Ketua Bappeda Prop. Dati I Jawa Timur.
2. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Jawa Timur.
3. Bupati / Walikota / Dinas / Jawatan / Lembaga ybs.
4. Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga ybs.
5. Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Laporan Kegiatan Penelitian tersebut kami sampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan penelitian tersebut selesai.

Jember,21 FEBRUARI 2001
yang bersangkutan,


(TETIEK CHUSNIATY MUI)

Tembusan kepada :

1. Sdr. Dekan Fakultas ybs.
2. Mahasiswa ybs.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37, Telepon (0331) 337818, JEMBER 68121
E-mail : lemit@unj.ac.id

Nomor : 175/J.25.3.1/PL.5/2001
Lampiran :
Perihal : **Permohonan ijin melaksanakan penelitian**

Kepada : **Yth. Sdr. Kakan Kesatuan Bangsa
Pemda Kotamadya Pasuruan
di -
PASURUAN.**

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 852/J.25.1-2/PL.5/2001 Tanggal 21 Februari 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa

Nama/NIM : TETIEK CHUSNIATY MU'IS / 97-1145
Fakultas/jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Kesejahteraan Sos.
Ala m a t : Jl. Kalimantan X/1 Jember.
Judul Penelitian : **Pemberdayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Studi Kasus Pada Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kec. Gadingrejo, Kotamadya Pasuruan.**
Lokasi : Kec. Gadingrejo, Kotamadya Pasuruan.
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

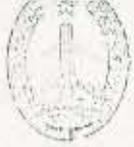


Ketua,

[Signature]
Dr. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip



SURAT - KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVE / RISET / PKL
NOMOR : 072/ 053/330.1/2001.

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 21 Februari 2001, Nomer : 175/J.25.3.1/PL.5/2001, perihal Permohonan Ijin - melaksanakan penelitian.
- Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 187/1972 tanggal 17 Juli 1972.
dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Surve/Riset/PKL oleh :

Nama Penanggung jawab : TEPIEK CHUSNIATY MU'IS
Mhsw. Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNEJ.

Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember

Thema Surve/Riset/PK : " PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL MELALUI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) "

Tempat Surve/Riset/PKL : KOTA PASURUAN

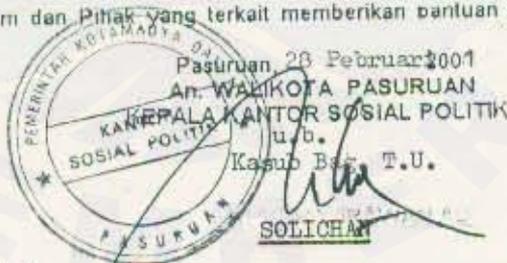
Lamanya Surve/Riset/PKL : 2 (dua) bln. terhitung tgl. 1 Maret 2001

Peserta / Pengikut : _____

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Surve / Riset / PKL yang bersangkutan diwajibkan melapor/konsultasi terlebih dahulu dengan Camat / Kepala Wilayah dan Kepolisian setempat serta Pimpinan Tempat Surve / Riset / PKL.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Surve / Riset / PKL.
3. Dilarang mengikut sertakan Peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Menlaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat, dan menjaga tata-tetib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama Bangsa dan Negara dari suatu golongan Penduduk.
5. Setelah melakukan Surve / Riset / PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan, up. Kepala Kantor Sosial Politik, untuk bahan/data pengembangan Daerah.
6. Apabila Pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancarannya.



TEMBUSAN : disampaikan kepada

- Yth. 1. Walikota Pasuruan. (sebagai laporan)
2. DAN DIM 0819 Pasuruan
3. KAPOLRES Pasuruan.
4. Ketua BAPPEDA Kota Pasuruan.
5. Camat se Kota Pasuruan.
6. Kepala Kelurahan Karanganyar, Gadingrejo & Trajeng di Pasuruan.

Pasuruan, 1 Maret 2001

Nomor : 072/52/430.251/2001
Kategori : Penting
Perihal : Ijin Penelitian / Survey

Kepada :
Ytho Sdr. 1. Ketua BKM Kelurahan
Karanganyar
2. Ketua BKM Kelurahan Gadingrejo
3. Ketua BKM Kelurahan Trajeng
di
PASURUAN.

Memunjuk surat keterangan dari Kepala Kantor Sosial Politik Kota Pasuruan Nomor : 072/053/330.1/2001, tanggal 28 Februari 2001 serta mengingat surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 175/J 25.3.1/PL/65/2001 tanggal 21 Februari 2001 perihal Penelitian / Survey.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : TETIRK CHUSNIATY MU'IS
Alamat : Jalan Kalimantan I/1 Jember
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tempat Survey : Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
Lama Survey : 2 (dua) Bulan
Tema Survey : " Pembedayaan Kelembagaan Komunitas Lokal Melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).

Mahasiswa yang telah disebutkan di atas, akan melakukan penelitian/survey sehubungan dengan hal di atas mengharap kesediaan Saudara untuk membantu memberikan Data dan Informasi yang dibutuhkan peneliti guna kelancaran tugasnya.

Demikian atas partisipasi dan bantuan kami sampaikan terima kasih.





PERHIMPUNAN KESWADAYAN MASYARAKAT

BKM KARANGANYAR

Jalan Hasanudin No. 01 RT. 05 / RW. II Telp. 421128
KOTA PASURUAN 67131

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002 / BKM / 15/3 / 2001

Menerangkan bahwa :

Nama / NIM : TETIEK CHUSNIATY MU'IS / 97 - 1145
Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Alamat : JL. KALIMANTAN X/1 JEMBER
Judul Skripsi : "PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL MELALUI
PROYEK PENABGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
(P2KP)"

Mahasiswa yang tertera di atas telah melakukan kegiatan penelitian/survey pada Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingreja, Kota Pasuruan.

Pasuruan, 8 Maret 2001



(AMAR)
Ketua BKM

PERHIMPUNAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (PKM) GADINGREJO
KELURAHAN GADINGREJO - KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN

Akta Notaris : No. 8 / Wahyu K. S., SH / 15 / III / 2000
Sekertariat : Jln. Irian Jaya No 6 Pasuruan 67134 Telp. (0343) 424894

SURAT KETERANGAN

Nomor : 013 / BKM / III / 2001

Menerangkan bahwa :

Nama/Nim : TETIEK CHUSNIATY MU'IS / 97 - 1145
Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jl. KALIMANTAN X/1 JEMBER
Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL MELALUI
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
(P2KP)

Mahasiswa yang disebutkan di atas telah melakukan kegiatan peneli-
an/survey pada kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Pasuruan, 12 Maret 2001.



(Madji Wahono)

Ketua BKM

Digital Repository Universitas Jember
PAOLYUBAN SEJAHTERA
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
Kelurahan Trajeng – Kecamatan Gadingrejo
KOTA PASURUAN

Sekretariat : Jl. Kolonel Sugiono No. 82 Pasuruan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 030 /BKM/III/2001

Menerangkan bahwa :

Nama/NIK : TETIEK CHUSNIATY MU'IS / 97 - 1145
Fakultas : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (KS)
Alamat : JL. KALIMANTAN X71 JEMBER
Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS LOKAL
MELELUI PROYEK PENANGGULANAGN KEMISKINAN
DI PERKOTAAN (P2KP)

Mahasiswa yang telah disebutkan di atas telah melakukan kegiatan penelitian/survey pada Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Ketua BKM

K. Trajeng



Madam Hawa)

